



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP, SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN
DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, klasifikasi arsip serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Klasifikasi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Pemrakarsa	Sekda
	

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

Pemrakarsa	Sekda
	

5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kriteria dan Jenis Arsip yang Memiliki Nilai Guna Sekunder;
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 238);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Menteri Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP, SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.

Pemrakarsa	Sekda
	

6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
7. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Dinamis.
8. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan Pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
9. Arsip Aktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
10. Arsip Inaktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
11. Arsip Vital adalah Arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional Pencipta Arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
12. Arsip Terjaga adalah Arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.
13. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan Arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi Kearsipan.
14. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas Arsip.
15. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis yang selanjutnya disebut Klasifikasi Keamanan adalah pengkategorian/penggolongan Arsip Dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik dan perorangan.
16. Biasa/Terbuka adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.

Pemrakarsa	Sekda
	

17. Terbatas adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
18. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum.
19. Sangat Rahasia adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa.
20. Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik yang bersifat ketat dan terbatas.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:
 - a. sebagai motivasi Perangkat Daerah agar melakukan pengelolaan Arsip Dinamis secara tertib yang disertai dengan daftar arsipnya;
 - b. sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah agar dapat mengamankan dan mematuhi kewenangan akses terhadap Klasifikasi Arsip yang telah ditetapkan;
 - c. melindungi fisik dan informasi Arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas dan reliabilitas Arsip dapat tetap terjaga; dan
 - d. melindungi Arsip dari pengakses yang tidak sesuai aturan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan Arsip oleh pihak yang tidak berwenang untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. menjadikan acuan pelaksanaan dan pengelolaan Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. menyediakan layanan informasi Arsip Dinamis kepada publik dengan prinsip cepat, tepat, murah, dan aman;
 - c. tersedianya informasi yang dikategorikan Biasa/Terbuka dan dapat diakses seluas-luasnya bagi publik sesuai dengan Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis; dan

Pemrakarsa	Sekda
	

- d. terjaminnya Keamanan Arsip bagi Informasi yang Dikecualikan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati Bulungan meliputi :

- a. pedoman Klasifikasi Arsip
- b. asas dan pengorganisasian
- c. pengamanan Arsip Dinamis: dan
- d. pembiayaan.

BAB II

PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 4

- (1) Klasifikasi Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan tugas dan fungsi Pencipta Arsip yang meliputi:
 - a. fungsi fasilitatif; dan
 - b. fungsi substantif.
- (3) Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan yang menghasilkan produk administratif atau penunjang dari tugas yang dilakukan di unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah.
- (4) Fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan pokok Pencipta Arsip yang membedakan antara pencipta arsip yang satu dengan yang lain.
- (5) Klasifikasi Arsip menggunakan kode Klasifikasi Arsip berupa angka.
- (6) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berfungsi sebagai dasar penomoran surat, pemberkasan, penataan, penyusutan, dan penemuan kembali Arsip.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Klasifikasi Arsip tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pemrakarsa	Sekda
	

BAB III
PENGORGANISASIAN

Pasal 5

Pengorganisasian sisten Klasifikasi Keamanan dan akses Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- a. Tingkat Klasifikasi Arsip yang tercipta di lingkungan Daerah diklasifikasikan sebagai berikut:
 1. Biasa/Terbuka;
 2. Terbatas
 3. Rahasia; dan
 4. Sangat rahasia.
- b. tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbeda dalam teknis pengamanannya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya, semakin tinggi pula tingkat pengamanannya;
- c. tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbeda dalam pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya, semakin ketat dalam pengaturan aksesnya;
- d. pengguna internal hanya dapat mengakses Arsip yang berada pada tanggungjawab dan kewenangannya; dan
- e. pengguna eksternal hanya dapat mengakses informasi Daerah yang dikategorikan Biasa/Terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Pasal 6

- (1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:
 - a. penentu kebijakan yaitu, Bupati, Wakil Bupti, Sekretaris Daerah dan pimpinan perangkat daerah mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya;
 - b. pelaksana kebijakan mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa tetapi tidak diberikan hak akses untuk arsip dengan tingkat klasifikasi terbatas, rahasia, dan sangat rahasia yang terdapat pada kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.

Pemrakarsa	Sekda
	

- c. pengawasan internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan kearsipan internal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:
- a. publik mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip dengan kategori Biasa/Terbuka.
 - b. Pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh Arsip pada Pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan Kearsipan eksternal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses Arsip pada Pencipta Arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditangani dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum.

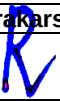
BAB IV PENGAMANAN ARSIP DINAMIS

Bagian Kesatu

Sarana

Pasal 7

- (1) Sarana sistem Klasifikasi Keamanan dan akses Arsip Dinamis di lingkungan pemerintah daerah menggunakan:
- a. perangkat keras (*hardware*); dan
 - b. perangkat lunak (*software*).
- (2) Perangkat keras (*hardware*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. sarana penyimpanan Arsip konvensional berupa *filing cabinet*/rak arsip untuk menyimpan arsip Biasa/Terbuka dan Terbatas, brankas atau lemari besi untuk Arsip Rahasia;
 - b. Sarana penyimpanan Arsip media baru berupa lemari Arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi;
 - c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan

Pemrakarsa	Sekda
	

- d. pengamanan ruang penyimpanan secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti kamera pengawas, kunci pengamanan ruang dan media simpan Arsip;
- (3) Perangkat lunak (*software*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Daftar Arsipaktif, inaktif, terjaga dan vital; dan
 - b. aplikasi pengelolaan Arsip Aktif dan inaktif.

Pasal 8

- (1) Pengamanan Arsip Dinamis dilaksanakan dalam rangka pengamanan fisik dan informasi Arsip.
- (2) Pengamanan fisik dan informasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti pemasangan kamera pengawas, kunci pengaman ruangan dan media simpan Arsip.
- (3) Pengamanan fisik dan informasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kategori Arsip Biasa/ Terbuka:
 - 1. Arsip konvensional, disimpan pada rak besi atau lemari Arsip; dan
 - 2. Arsip elektronik, dilakukan *back-up* secara teratur untuk pemulihan sistem.
 - b. kategori Arsip Terbatas:
 - 1. Arsip konvensional, disimpan pada *filling cabinet*; dan
 - 2. Arsip elektronik, dilakukan *back-up* secara teratur untuk pemulihan sistem, dokumen elektronik (termasuk *database*) harus dilindungi terhadap penggunaan oleh Pengguna Internal atau Pengguna Eksternal.
 - c. kategori Arsip Rahasia:
 - 1. Arsip konvensional, disimpan pada lemari besi (*roll o pack*) atau brankas; dan
 - 2. Arsip elektronik, dilakukan *back-up* secara teratur untuk pemulihan sistem, dokumen elektronik (termasuk *database*) harus dilindungi terhadap penggunaan oleh Pengguna Internal atau Pengguna Eksternal.
- (4) Pengamanan fisik dan informasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penciptaan daftar Arsip Terbatas dan daftar Arsip Rahasia.

Pemrakarsa	Sekda
	

- (5) Pengamanan fisik dan informasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh arsiparis dan/atau petugas Kearsipan yang diberi kewenangan dan tanggung jawab mengelola dan mengamankan fisik serta informasi Arsip.
- (6) Tujuan pengamanan merupakan acuan pembatasan akses yang digunakan oleh penyedia informasi yang berada di *central file* dan *record centre*.

Pasal 9

- (1) Media simpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas sarana perangkat keras dan perangkat lunak.
- (2) Perangkat keras sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. sarana penyimpanan Arsip konvensional berupa *filling cabinet*/rak Arsip untuk menyimpan Arsip Biasa/Terbuka, dan brankas atau lemari besi untuk Arsip Rahasia;
 - b. sarana penyimpanan Arsip media baru berupa lemari Arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan
 - c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi.
 - d. Pengamanan ruang penyimpanan secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti kamera pengawas, kunci pengamanan ruang dan media simpan Arsip.
- (3) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Daftar Arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital; dan
 - b. aplikasi pengelolaan Arsip Aktif dan inaktif.

Bagian Kedua

Penyampaian Fisik Arsip dan Informasi Dinamis

Pasal 10

- (1) Penyampaian fisik Arsip dalam rangka penanganan fisik maupun informasi Arsip Dinamis sesuai dengan tingkat klasifikasi.
- (2) Penyampaian fisik Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengiriman yang dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemrakarsa	Sekda
	

Pasal 11

- (1) Sistem Klasifikasi Keamanan dan akses Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh pejabat fungsional arsiparis dan/atau pengelola Arsip.
- (2) Arsiparis/pengelola arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang dan tanggung jawab serta hak akses sesuai dengan unit kerja pengelolaan Arsipnya.

Bagian Ketiga

Kategori Klasifikasi Keamanan dan Akses

Pasal 12

Arsip dinamis yang tercipta di lingkungan Pemerintah Daerah yang termasuk dalam kategori Arsip tingkat klasifikasi Biasa/Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan arsip yang tidak memiliki dampak dan mengganggu kinerja Daerah, meliputi:

- a. Arsip dinamis pada lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Arsip Dinamis pada lingkungan Inspektorat;
- c. Arsip Dinamis pada lingkungan Perangkat Daerah lainnya;
- d. Arsip Dinamis pada lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah; dan
- e. Arsip Dinamis pada lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 13

Arsip Dinamis yang tercipta di lingkungan Pemerintah Daerah yang termasuk dalam kategori Arsip tingkat klasifikasi Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan arsip yang dari segi bobot informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja meliputi:

- a. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi kepegawaian seperti berkas perseorangan, hasil pertimbangan badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan, rekam medis pegawai;
- b. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi unit layanan pengadaan seperti dokumen pengadaan barang dan jasa;
- c. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Inspektorat seperti laporan hasil pemeriksaan auditor internal dan eksternal, laporan hasil pemeriksaan auditor independen;

Pemrakarsa	Sekda
	

- d. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi keuangan seperti berkas pengelolaan anggaran di setiap unit kerja; dan
- e. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi urusan kearsipan seperti daftar arsip vital dan daftar arsip terjaga.

Pasal 14

Arsip Dinamis yang tercipta di lingkungan Pemerintah Daerah yang termasuk dalam kategori Arsip tingkat klasifikasi Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, mengandung dampak yang luas hingga mengganggu kinerja Daerah, meliputi:

- a. Arsip Dinamis yang tercipta dan berkaitan dengan kasus/sengketa hukum, hak atas kekayaan intelektual dan berkas.
- b. Arsip Dinamis yang tercipta dan berkaitan dengan sertifikat tanah, rancangan bangunan;
- c. Arsip yang tercipta yang terkait dengan pertahanan dan keamanan negara;
- d. Arsip yang terkait dengan kerugian ketahanan ekonomi nasional;
- e. Arsip yang terkait dengan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri;
- f. Arsip dengan isi akta otentik yang terakhir ataupun wasiat seseorang keadaan yang berhak secara hukum;
- g. Arsip yang terkait dengan rahasia atau data pribadi;
- h. Arsip yang terkait dengan perjanjian atau Kerjasama (*memorandum of understanding (MOU)*); dan
- i. daftar Arsip Rahasia.

Pasal 15

(1) Arsip Dinamis dengan Klasifikasi Biasa/Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas:

- a. arsip dinamis pada lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. arsip dinamis pada lingkungan Inspektorat;
- d. arsip dinamis pada lingkungan Perangkat Daerah lainnya;
- e. arsip dinamis pada lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah; dan
- f. arsip dinamis pada lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pemrakarsa	Sekda
	

- (2) Arsip Dinamis dengan Klasifikasi Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas:
- a. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi kepegawaian seperti berkas perseorangan, hasil pertimbangan badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan, rekam medis pegawai;
 - b. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi unit layanan pengadaan seperti dokumen pengadaan barang dan jasa;
 - c. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Inspektorat seperti laporan hasil pemeriksaan auditor internal dan eksternal, laporan hasil pemeriksaan auditor independen;
 - d. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi keuangan seperti berkas pengelolaan anggaran di setiap unit kerja; dan
 - e. Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi urusan kearsipan seperti daftar arsip vital dan daftar arsip terjaga.
3. Arsip Dinamis dengan Klasifikasi informasi Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
- a. arsip dinamis yang tercipta dan berkaitan dengan kasus/sengketa hukum, hak atas kekayaan intelektual, dan berkas.
 - b. Arsip dinamis yang tercipta dan berkaitan dengan sertifikat tanah, rancangan bangunan;
 - c. Arsip yang tercipta yang terkait dengan pertahanan dan keamanan negara;
 - d. Arsip yang terkait dengan kerugian ketahanan ekonomi nasional;
 - e. Arsip yang terkait dengan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri;
 - f. Arsip dengan isi akta otentik yang terakhir ataupun wasiat seseorang keadaan yang berhak secara hukum;
 - g. Arsip yang terkait dengan rahasia atau data pribadi;
 - h. Arsip yang terkait dengan perjanjian atau kerjasama (*memorandum of understanding (MOU)*); dan
 - i. daftar Arsip Rahasia.

Pasal 16

- (1) Pengamanan informasi ArsipDinamis di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

Pemrakarsa	Sekda
	

- a. penciptaan daftar Arsip Terbatas; dan
 - b. daftar Arsip Rahasia.
- (2) Tujuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan pembatasan akses yang digunakan oleh penyedia yang berada di tempat penyimpanan Arsip Aktif (*central file*) dan tempat penyimpanan Arsip Inaktif (*records centre*).
- (3) Pengamanan fisik dan informasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penciptaan daftar Arsip Terbatas dan daftar Arsip Rahasia.
- (4) Pengamanan fisik dan informasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh arsiparis dan/atau petugas Kearsipan yang diberi kewenangan dan tanggung jawab mengelola dan mengamankan fisik serta informasi Arsip.
- (5) Tujuan pengamanan merupakan acuan pembatasan akses yang digunakan oleh penyedia informasi yang berada di *central file* dan *record centre*.

Pasal 17

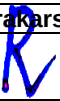
Klasifikasi Keamanan dan akses Arsip Dinamis berdasarkan tugas dan fungsi fasilitatif dan substantif serta tabel Klasifikasi Arsip, sistem Klasifikasi Keamanan dan akses Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pemrakarsa	Sekda
	

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2020 Nomor 48); dan
- b. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2020 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan
Kepala Bagian Hukum,

SUROSO, SE
Pembina TK.I/IVb
NIP. 197003101993031008

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 6 April 2024
BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor,
pada tanggal 6 April 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO

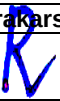
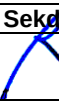
BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2024 NOMOR 14

Pemrakarsa	Sekda
	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP,
SISTEM KLASIFIKASI
KEAMANANDAN AKSES ARSIP
DINAMIS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

A. KLASIFIKASI ARSIP

JENIS/SERIES ARSIP	
000	UMUM
000.1	KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN
000.1.1	Telekomunikasi
000.1.2	Perjalanan Dinas Dalam Negeri
000.1.2.1	Perjalanan Dinas Kepala Daerah
000.1.2.2	Perjalanan Dinas DPRD
000.1.2.3	Perjalanan Dinas Pegawai
000.1.3	Perjalanan Dinas Luar Negeri
000.1.3.1	Perjalanan Dinas Kepala Daerah
000.1.3.2	Perjalanan Dinas DPRD
000.1.3.3	Perjalanan Dinas Pegawai
000.1.4	Penggunaan Fasilitas Kantor (antara lain: Permintaan dan Penggunaan Ruang Rapat, Gedung, Kendaraan, Wisma, Rumah Dinas dan Fasilitas Kantor Lainnya)
000.1.5	Rapat pimpinan (antara lain: Notula/Risalah Rapat)
000.1.6	Penyediaan Konsumsi
000.1.7	Pengurusan Kendaraan Dinas
000.1.7.1	Pengurusan surat-surat

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
		kendaraan dinas
	000.1.7.2	Pemeliharaan dan perbaikan
	000.1.7.3	Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan
000.1.8	Pemeliharaan Gedung, Taman dan Peralatan Kantor	
	000.1.8.1	Pertamanan/ Landscape
	000.1.8.2	Penghijauan
	000.1.8.3	Perbaikan Gedung
	000.1.8.4	Perbaikan Peralatan Kantor
	000.1.8.5	Perbaikan Rumah Dinas/ Wisma
	000.1.8.6	Kebersihan Gedung dan Taman
000.1.9	Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Komputer	
	000.1.9.1	Perbaikan / Pemeliharaan
	000.1.9.2	Pemasangan
000.1.10	Ketertiban dan Keamanan	
	000.1.10.1	Pengamanan, Penjagaan, dan Pengawasan terhadap Pejabat, Kantor dan Rumah Dinas
	000.1.10.2	Laporan Ketertiban dan Keamanan
000.1.11	Administrasi Pengelolaan Parkir	
000.1.12	Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan dan Pegawai lainnya	
000.2	PERLENGKAPAN	
000.2.1	Inventarisasi dan Penyimpanan	
	000.2.1.1	Data hasil inventarisasi dan penyimpanan
	000.2.1.2	Laporan dan evaluasi inventarisasi dan
Pemrakarsa	Sekda	
		

JENIS/SERIES ARSIP			
		Penyimpanan	
	000.2.2	Pemeliharaan peralatan kantor	
		000.2.2.1	Data hasil pemeliharaan kantor
		000.2.2.2	Laporan dan evaluasi pemeliharaan kantor
	000.2.3	Distribusi	
		000.2.3.1	Barang habis pakai
		000.2.3.2	Barang milik daerah
	000.2.4	Penghapusan Barang Milik Daerah (antara lain: Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah, Daftar Barang yang dihapuskan, Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMD termasuk didalamnya proses lelang penghapusan)	
	000.2.5	Pengelolaan Database Barang Milik Daerah	
000.3		PENGADAAN	
	000.3.1	Rencana Pengadaan Barang dan Jasa (antara lain: Identifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran pengadaan, penetapan kebijakan umum, penyusunan kerangka Acuan Kerja (KAK), Pengumuman Rencana Umum Pengadaan)	
	000.3.2	Pengadaan Langsung (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)	
	000.3.3	Pengadaan Tidak Langsung/Lelang (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan	

Pemrakarsa	Sekda
	

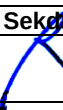
JENIS/SERIES ARSIP						
		kontrak)				
	000.3.4	Swakelola (antara lain: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi)				
	000.3.5	Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan (antara lain: Data base pengguna sistem informasi pengadaan barang/jasa, Data Base kontrak, Data Base Pengadaan Barang/jasa)				
	000.3.6	Monitoring dan Evaluasi (antara lain: Laporan Hasil Monitoring, Laporan hasil evaluasi)				
000.4	PERPUSTAKAAN					
	000.4.1	Kebijakan di bidang Perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah				
	000.4.2	Deposit Bahan Pustaka				
	000.4.2.1	Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam				
	000.4.2.2	Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman				
	000.4.2.3	Terbitan Internasional dan Regional				
	000.4.2.4	Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam				
	000.4.2.5	Bibliografi dan Katalog				
	000.4.3	Koleksi Pustaka				
	000.4.3.1	Pembelian				
	000.4.3.2	Hibah				
	000.4.3.3	Hadiah				
	000.4.3.4	Tukar Menukar				
	000.4.3.5	Implementasi Undang-Undang KCKR				
	000.4.3.6	Terbitan Internal				
	000.4.3.7	Pendistribusian bahan pustaka surplus				
<table><tr><td>Pemrakarsa</td><td>Sekda</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>			Pemrakarsa	Sekda		
Pemrakarsa	Sekda					
						

JENIS/SERIES ARSIP		
	000.4.3.8	Inventarisasi koleksi (Buku Induk)
	000.4.4	Pengolahan Bahan Pustaka
	000.4.5	Pangkalan Data Katalog Koleksi
	000.4.6	Layanan Perpustakaan
	000.4.6.1	Keanggotaan
	000.4.6.2	Peminjaman
	000.4.6.3	Pengembangan gemar baca
	000.4.7	Kerjasama Perpustakaan
	000.4.7.1	MoU
	000.4.7.2	Perjanjian kerjasama
	000.4.7.3	Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional
	000.4.8	Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan
	000.4.8.1	Pengembangan situs web
	000.4.8.2	Pengembangan kemas ulang informasi multimedia
	000.4.8.3	Pengembangan program aplikasi perpustakaan
	000.4.8.4	Pengembangan pangkalan data kepastakaan digital
	000.4.9	Pangkalan Data Layanan Perpustakaan
	000.4.10	Konservasi
	000.4.10.1	Perawatan Bahan Perpustakaan
	000.4.10.2	Perbaikan Bahan Perpustakaan
	000.4.10.3	Penjilidan Bahan Perpustakaan
	000.4.11	Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)
	000.4.12	Transformasi Digital
	000.4.13	Kurasi Digital
	000.4.14	Pengembangan Perpustakaan

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
	000.4.14.1	Perpustakaan Umum
	000.4.14.2	Perpustakaan Khusus
	000.4.14.3	Perpustakaan Sekolah
	000.4.14.4	Percutaneous Perguruan Tinggi
000.5	KEARSIPAN	
	000.5.1	Kebijakan di bidang kearsipan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	000.5.2	Pembinaan Kearsipan
	000.5.2.1	Pengembangan Profesi Arsiparis (antara lain: Formasi Jabatan Arsiparis, Analisis Kebutuhan Arsiparis)
	000.5.2.2	Bimbingan Konsultasi Arsiparis
	000.5.2.3	Penilaian Arsiparis
	000.5.2.4	Pemilihan Arsiparis Teladan (antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan, Berkas Penetapan Arsiparis Teladan)
	000.5.2.5	Data Base Arsiparis
	000.5.2.6	Bimbingan Konsultasi Kearsipan
	000.5.2.7	Supervisi dan Evaluasi (antara lain: Perencanaan Supervisi dan Evaluasi, Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi, Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi)
	000.5.2.8	Data Base Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi
	000.5.2.9	Fasilitasi Kearsipan (antara
Pemrakarsa	Sekda	
		

JENIS/SERIES ARSIP		
		lain: Fasilitas SDM Kearsipan, Fasilitas Prasarana dan Sarana Kearsipan)
	000.5.2.10	Lembaga/Unit Kearsipan Teladan (antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan, Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan)
	000.5.2.11	Jadwal Retensi Arsip (antara lain: Berkas Usulan Persetujuan JRA, Surat Persetujuan JRA dari Kepala ANRI)
000.5.3	Pengelolaan Arsip Dinamis	
	000.5.3.1	Penciptaan (antara lain: Buku Registrasi Naskah Masuk dan Keluar, Buku Agenda, Kartu Kendali, Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi)
	000.5.3.2	Pemberkasan Arsip Aktif (antara lain: Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas)
	000.5.3.3	Penataan Arsip Inaktif (antara lain: Daftar Arsip Inaktif, Daftar Arsip Inaktif Tematik)
	000.5.3.4	Penggunaan (antara lain: Daftar Arsip Dinamis Berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Bukti Pemimjaman Arsip)
	000.5.3.5	Autentikasi Arsip Dinamis

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
		(antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Dinamis)
000.5.4	Program Arsip Vital (antara lain: Identifikasi Arsip Vital, Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital, Penyelamatan Arsip Vital, dan Pemulihan Arsip Vital)	
000.5.5	Pengelolaan Arsip Terjaga (antara lain: Daftar Identifikasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga, Surat Penetapan Autentikasi Arsip Terjaga, Surat Penyerahan Arsip Terjaga, Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga, Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga)	
000.5.6	Penyusutan Arsip	
	000.5.6.1	Pemindahan Arsip (antara lain:Berita Acara Pemindahan, Daftar Arsip yang dipindahkan)
	000.5.6.2	Pemusnahan Arsip (antara lain: SK Penetapan Panitia Penilai Arsip, Pertimbangan Panitia Penilai, Permintaan Persetujuan Kepala ANRI untuk pemusnahan arsip dengan retensi sekurang-kurangnya 10 Tahun atau Persetujuan Kepala Daerah selaku Pimpinan Pencipta Arsip untuk pemusanahan arsip dengan retensi di bawah 10 Tahun, Penetapan Arsip Yang Dimusnahkan, Berita

Pemrakarsa	Sekda
	

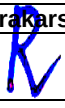
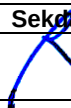
JENIS/SERIES ARSIP		
		Acara Pemusnahan Arsip, Daftar arsip Yang Dimusnahkan)
000.5.6.3		Penyerahan Arsip Statis (antara lain: Pembentukan panitia penilai, Notulen rapat panitia, Surat pertimbangan panitia penilai, Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan, Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan digunakan dari pencipta arsip, Keputusan Penetapan Penyerahan, Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang diserahkan)
000.5.7		Alih Media Arsip (antara lain: Kebijakan alih media, Autentikasi, Berita Acara, Daftar Arsip yang alih mediakan)
000.5.8		Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis
	000.5.8.1	Data Base Pengelolaan Arsip Aktif
	000.5.8.2	Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif
000.5.9		Pengelolaan Arsip Statis
	000.5.9.1	Akuisisi (antara lain: Monitoring fisik dan daftar, Verifikasi terhadap daftar arsip , Menetapkan status arsip statis, Persetujuan untuk Penyerahan, Penetapan arsip yang diserahkan Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar arsip

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP	
	yang diserahkan)
000.5.9.2	Penghargaan dan Imbalan
000.5.9.3	Sejarah Lisan (antara lain: Administrasi kegiatan, Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan, Laporan Kegiatan, Hasil Wawancara (Kaset/CD/media lain sesuai perkembangan TI) dan Transkrip)
000.5.9.4	Daftar Pencarian Arsip Statis (antara lain: pengumuman, akuisisi daftar pencarian arsip statis)
000.5.9.5	Menyusun Sarana Bantu Temu Balik (antara lain: daftar arsip statis, inventaris arsip statis, guide
000.5.9.6	Preservasi Preventif (antara lain: penyimpanan, pengendalian hama terpadu, reproduksi (alih media)
000.5.9.7	Preservasi Kuratif
000.5.9.8	Autentikasi Arsip Statis (antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Statis)
000.5.9.9	Akses Arsip Statis (antara lain: Layanan arsip, Penerbitan naskah sumber)
000.5.10	Jasa Kearsipan (antara lain konsultasi kearsipan, manual kearsipan, penataan arsip, otomasi kearsipan, penyimpanan arsip,

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
perawatan dan pemeliharaan arsip)		
000.5.11	Pengelolaan SIKN dan JIKN	
000.5.12	Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana	
000.5.13	Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan	
000.5.14	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	
000.5.15	Pengawasan Kearsipan	
	000.5.15.1	Pengawasan Kearsipan Internal
	000.5.15.2	Pengawasan Kearsipan Eksternal
	000.5.15.3	Sanksi
000.6 PERSANDIAN		
000.6.1	Kebijakan di bidang Persandian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
000.6.2	Pengamanan persandian	
	000.6.2.1	Pengamanan sinyal: teknik sandi dan kripto
	000.6.2.2	Analisis sinyal: teknik sandi dan kripto
	000.6.2.3	Materiil sandi: sistem dan peralatan
000.6.3	Pengkajian persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi	
	000.6.3.1	Perencanaan Pengkajian
	000.6.3.2	Administrasi Pengkajian
	000.6.3.3	Pelaksanaan
	000.6.3.4	Pelaporan
000.6.4	Pembinaan dan Pengendalian Persandian	
	000.6.4.1	Sumber Daya Manusia (SDM)

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
	000.6.4.2	Jaring Komunikasi
000.6.5	Layanan Sertifikasi Elektronik	
	000.6.5.1	Perencanaan dan Administrasi
	000.6.5.2	Pelaksanaan Verifikasi
	000.6.5.3	Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama
	000.6.5.4	Penyesuaian Sistem dan Testing
	000.6.5.5	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna
	000.6.5.6	Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik
	000.6.5.7	Pelaporan
000.7	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	
000.7.1	Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang	
	000.7.1.1	Musrenbang Provinsi
	000.7.1.2	Musrenbang Nasional
	000.7.1.3	Musrenbang Kab/Kota
	000.7.1.4	Musrenbang Kecamatan
	000.7.1.5	Musrenbang Kelurahan
	000.7.1.6	Musrenbang Desa
000.7.2	Perencanaan Pembangunan Daerah	
	000.7.2.1	Rencana Pembangunan Jangka Panjang
	000.7.2.2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
	000.7.2.3	Rencana Anggaran Daerah
	000.7.2.4	Rencana Pembangunan Tahunan
	000.7.2.5	Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah
	000.7.2.6	Program kerja tahunan
Pemrakarsa	Sekda	
		

JENIS/SERIES ARSIP		
	000.7.2.7	Penetapan / Kontrak Kinerja
	000.7.2.8	Laporan Berkala
	000.7.2.9	Laporan Insidental
	000.7.2.10	Evaluasi Program
	000.7.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
	000.7.4	Konsultasi Perencanaan Pembangunan
	000.7.5	Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan
	000.7.6	Aksi Strategis Daerah
	000.7.6.1	Rancangan awal perencanaan aksi strategi daerah
	000.7.6.2	Rapat pembahasan rancangan awal dengan Perangkat Daerah
	000.7.6.3	Sosisalisasi dengan Perangkat Daerah
	000.7.6.4	Rancangan akhir perencanaan aksi strategi daerah
	000.7.6.5	Penerapan perencanaan aksi strategi daerah
	000.7.7	Perencanaan Pendanaan Pembangunan
	000.7.7.1	Pendanaan Nasional dan Hibah
	000.7.7.2	Pendanaan Daerah
	000.7.7.3	Kerjasama Pembangunan Nasional
	000.7.7.4	Surat Berharga Syariah Negara
	000.7.7.5	Pendanaan On Top atau Inisiatif Baru
000.8	ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	
	000.8.1	Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
	000.8.1.1	Pembentukan
Pemrakarsa	Sekda	
		

JENIS/SERIES ARSIP		
	000.8.1.2	Pengubahan
	000.8.1.3	Pembubaran
	000.8.2	Uraian Jabatan dan Tata Kerja
	000.8.2.1	Analisa Jabatan
	000.8.2.2	Analisa Beban Kerja
	000.8.3	Ketatalaksanaan
	000.8.3.1	Proses Bisnis
	000.8.3.2	Standar Pelayanan
	000.8.3.3	Standar Operasional Prosedur
	000.8.3.4	Pelayanan Publik
	000.8.4	Standar Kompetensi jabatan struktural dan fungsional
	000.8.5	Evaluasi Kelembagaan
	000.8.6	Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi
	000.8.6.1	Budaya Kerja
	000.8.6.2	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
	000.8.6.3	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
000.9	PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN	
	000.9.1	Kebijakan di bidang penelitian, pengkajian dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah
	000.9.2	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan (antara lain: Rencana Kerja, Administrasi Penelitian, Pelaksanaan, Hasil Penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan, Rekomendasi)
	000.9.3	Sosialisasi dan Desiminasi Hasil penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan
	000.9.4	Bimbingan teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan
	000.9.5	Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan
Pemrakarsa	Sekda	
		

JENIS/SERIES ARSIP		
		teknologi
000.9.6		Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	000.9.6.1	Data
	000.9.6.2	Statistik
	000.9.6.3	Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian
000.9.7		Master proceeding/jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
000.9.8		Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)
000.9.9		Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
000.9.10		Seminar, Lokakarya, Temukarya, Workshop
100 PEMERINTAHAN		
	100.1	OTONOMI DAERAH
	100.1.1	Kebijakan di bidang Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	100.1.2	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi, Bimbingan , Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi)
	100.1.3	Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)
	100.1.4	Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)
	100.1.4.1	Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah
	100.1.4.2	Administrasi Kepala Daerah dan DPRD

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
	100.1.4.3	Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di Bidang Pemerintahan
	100.1.4.4	Hubungan Antar Lembaga Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)
	100.1.4.5	Assosiasi Daerah
100.1.5	Peningkatan Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)	
	100.1.5.1	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
	100.1.5.2	Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah
	100.1.5.3	Pengembangan Kapasitas Daerah
100.1.6	LKPJ/ LKPJAMJ dan LPPD (Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi)	
100.2	PEMERINTAHAN UMUM	
	100.2.1	Kebijakan di bidang Pemerintahan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	100.2.2	Dekonsentrasi dan Kerjasama
	100.2.2.1	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
	100.2.2.2	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah
	100.2.2.3	Fasilitasi, Koordinasi,

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
		Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah
	100.2.2.4	Fasilitasi Kecamatan
	100.2.2.5	Fasilitasi Pelayanan Umum
100.2.3	Wilayah Administrasi dan Perbatasan	
	100.2.3.1	Toponimi dan Data Wilayah
	100.2.3.2	Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara
	100.2.3.3	Batas Antar Daerah Wilayah
	100.2.3.4	Penataan Batas Wilayah Antar Kecamatan, Batas Wilayah Antar Kelurahan Satu Kecamatan Dan Batas Wilayah Kelurahan Antar Kecamatan
	100.2.3.5	Pemeliharaan Batas Wilayah
100.3 HUKUM		
	100.3.1	Program Legislasi
	100.3.1.1	Bahan/Materi Program Legislasi Daerah
	100.3.1.2	Program Legislasi
100.3.2	Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (antara lain Rancangan Peraturan Daerah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan)	
100.3.3	Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah	
	100.3.3.1	Keputusan/Ketetapan Gubernur
	100.3.3.2	Keputusan/Ketetapan Bupati
	100.3.3.3	Keputusan/Ketetapan Walikota
	100.3.3.4	Keputusan Sekretaris Daerah

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
		Provinsi
	100.3.3.5	Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten
	100.3.3.6	Keputusan Sekretaris Daerah Kota
100.3.4	Instruksi/Surat Edaran	
	100.3.4.1	Instruksi/Surat Edaran Provinsi
	100.3.4.2	Instruksi/Surat Edaran Kabupaten
	100.3.4.3	Instruksi/Surat Edaran Kota
	100.3.4.4	Instruksi/Surat Edaran Setingkat Eselon II
100.3.5	Surat Perintah	
	100.3.5.1	Surat Perintah Gubernur
	100.3.5.2	Surat Perintah Bupati
	100.3.5.3	Surat Perintah Walikota
	100.3.5.4	Surat Perintah Setingkat Eselon II
100.3.6	Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis	
100.3.7	Nota Kesepakatan/Memorandum of Understanding (MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerja Sama	
	100.3.7.1	Dalam Negeri
	100.3.7.2	Luar Negeri
100.3.8	Dokumentasi Hukum (antara lain: Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-Peraturan yang dijadikan referensi)	
100.3.9	Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum	
100.3.10	Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi Pemberian Bantuan Hukum/Konsultasi Hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara	

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
dan Agama)		
100.3.11	Kasus/ Sengketa Hukum	
	100.3.11.1	Pidana Kasus/ sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran
	100.3.11.2	Perdata Kasus/sengketa perdata
	100.3.11.3	Tata Usaha Negara
	100.3.11.4	Perburuhan
	100.3.11.5	Arbitrase
	100.3.11.6	Sengketa Adat
100.3.12	Perijinan	
100.3.13	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)	
	100.3.13.1	Hak Cipta
	100.3.13.2	Hak Paten
	100.3.13.3	Hak Desain Industri
	100.3.13.4	Hak Rahasia Dagang
	100.3.13.5	Hak Merk
100.3.14	Permohonan HaKI yang ditolak	
200	POLITIK	
200.1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
200.1.1	Kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
200.1.2	Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	
	200.1.2.1	Ketahanan Ideologi Negara
	200.1.2.2	Wawasan Kebangsaan
	200.1.2.3	Bela Negara
	200.1.2.4	Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan
	200.1.2.5	Pembauran dan Kewarganegaraan
200.1.3	Kewaspadaan Nasional	
	200.1.3.1	Fasilitasi dan Evaluasi

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
		Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan
	200.1.3.2	Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan
	200.1.3.3	Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan
	200.1.3.4	Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial
	200.1.3.5	Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing
200.1.4	Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan	
	200.1.4.1	Ketahanan Seni
	200.1.4.2	Ketahanan Budaya
	200.1.4.3	Agama dan Kepercayaan
	200.1.4.4	Organisasi Kemasyarakatan
	200.1.4.5	Masalah Sosial Kemasyarakatan
	200.1.4.6	Fasilitasi
	200.1.4.7	Pelaksanaan Identifikasi dan Kompilasi Organisasi Masyarakat
	200.1.4.8	Laporan Hasil Kerjasama Kegiatan Dengan Ormas/LNL
	200.1.4.9	Evaluasi Aktifitas Ormas : Sanksi Administrasi
	200.1.4.10	Fasilitasi Sengketa Ormas
	200.1.4.11	Fasilitasi Ormas
200.1.5	Politik Dalam Negeri	
	200.1.5.1	Implementasi Kebijakan Politik
	200.1.5.2	Fasilitasi Kelembagaan Politik

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
		Pemerintahan
	200.1.5.3	Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik
	200.1.5.4	Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik Yang Memperoleh Kursi
	200.1.5.5	Partai Politik Yang Tidak Memperoleh Kursi
	200.1.5.6	Pemerintah Daerah
	200.1.5.7	Database Parpol
	200.1.5.8	Pendidikan Budaya Politik
	200.1.5.9	Pemilihan Umum
200.1.6	Ketahanan Ekonomi	
	200.1.6.1	Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian
	200.1.6.2	Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter
	200.1.6.3	Perilaku Perekonomian Masyarakat
	200.1.6.4	Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi
200.2	PEMILU	
	200.2.1	Kebijakan di bidang Pemilu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	200.2.2	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
	200.2.2.1	Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu
	200.2.2.2	Daftar Pemilih Sementara (DPS)
	200.2.2.3	Daftar Pemilih Tambahan
	200.2.2.4	Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT)
	200.2.2.5	Rekapitulasi Daftar Pemilih
Pemrakarsa	Sekda	
		

JENIS/SERIES ARSIP		
Tetap (DPT)		
200.2.3	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	
	200.2.3.1	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari partai politik
	200.2.3.2	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual partai politik
	200.2.3.3	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari Calon Perseorangan
	200.2.3.4	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faKtual
200.2.4	Penetapan Peserta Pemilu	
	200.2.4.1	Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota
	200.2.4.2	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR
	200.2.4.3	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR
	200.2.4.4	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota
	200.2.4.5	Peta Daerah Pemilihan
200.2.5	Pencalonan Pemilu	
	200.2.5.1	Petunjuk teknis pencalonan
	200.2.5.2	Surat pencalonan pendaftaran
	200.2.5.3	Daftar bakal calon
	200.2.5.4	Dokumen persyaratan masing-masing bakal calon
	200.2.5.5	Dokumen verifikasi administrasi

Pemrakarsa	Sekda
	

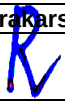
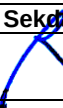
JENIS/SERIES ARSIP		
	200.2.5.6	Daftar Calon Sementara dan Calon Tetap
200.2.6	Kampanye Pemilu	
	200.2.6.1	Keputusan KPU tentang penetapan jadwal kampanye
	200.2.6.2	Nama juru kampanye/pelaksana kampanye
	200.2.6.3	Peringatan tertulis/penghentian kegiatan kampanye
200.2.7	Dana Kampanye	
	200.2.7.1	Pedoman audit dana kampanye
	200.2.7.2	Laporan dana kampanye peserta Pemilu
	200.2.7.3	Laporan hasil audit dana kampanye
200.2.8	Pemungutan dan Penghitungan Suara	
	200.2.8.1	Keputusan KPU tentang desain dan spesifikasi surat suara
	200.2.8.2	Master surat suara
	200.2.8.3	Surat suara yang terpakai
	200.2.8.4	Surat Suara Tidak terpakai (rusak, salah, dan tidak digunakan)
	200.2.8.5	Formulir pemilu di Pemerintah Daerah
200.2.9	Penetapan Hasil Pemilu	
200.2.10	Perselisihan Hasil Pemilu	
	200.2.10.1	Surat-surat mengenai Perselisihan Hasil Pemilu
	200.2.10.2	Jawaban dan kesimpulan termohon

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
	200.2.10.3	Salinan Putusan lembaga peradilan
	200.2.11	Laporan hasil penyelenggaraan Pemilu
300	KEAMANAN DAN KETERTIBAN	
300.1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	300.1.1	Kebijakan di bidang Polisi Pamong Praja yang dilakukan di Pemerintah Daerah
	300.1.2	Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi Pamong Praja
	300.1.2.1	Tata Operasiona Polisi Pamong Praja
	300.1.2.2	Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja
	300.1.3	Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja
	300.1.4	Perlindungan Masyarakat
	300.1.5	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
	300.1.6	Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia
300.2	PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN, DAN PERTOLONGAN	
	300.2.1	Kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	300.2.2	Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan
	300.2.2.1	Rencana dan standardisasi dan pengawakan dan perbekalan
	300.2.2.2	Kurikulum dan silabus, evaluasi dan monitoring
	300.2.2.3	Tenaga pencarian pertolongan, penyiapan potensi pencarian

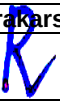
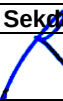
Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
		dan pertolongan
	300.2.2.4	Permasyarakatan pencarian dan pertolongan, sertifikasi pencarian dan pertolongan
	300.2.2.5	Perencanaan dan standardisasi, penyelenggaraan operasi SAR, Siaga dan latihan, tempat latihan
	300.2.2.6	Registrasi BEACON
	300.2.3	Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	300.2.4	Potensi Pencarian dan Pertolongan
	300.2.5	Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan
	300.2.5.1	Rencana Pendidikan dan Pelatihan
	300.2.5.2	Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan
	300.2.5.3	Pemasyarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
	300.2.5.4	Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan)
	300.2.5.5	Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
	300.2.6	Operasi Pencarian dan Pertolongan
	300.2.7	Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi
	300.2.8	Operasi Komunikasi
	300.2.8.1	Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR)
	300.2.8.2	Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR)
	300.2.8.3	Registrasi BEACON

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
	300.2.9	Inventarisasi dan Pemeliharaan
	300.2.10	Pengembangan Sistem Informasi
	300.2.11	Penyajian dan Layanan Informasi
	300.2.12	Pelapooran dan Evaluasi
	300.2.12.1	Laporan Harian
	300.2.12.2	Laporan Bulanan
	300.2.12.3	Laporoan Tahunan
	300.2.12.4	Evaluasi
400	KESEJAHTERAAN RAKYAT	
400.1	PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	
	400.1.1	Kebijakan di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	400.1.2	Pembangunan Sumber Daya
	400.1.2.1	Fasilitasi Pendidikan ketrampilan Pengembangan Sumber Daya
	400.1.2.2	Fasilitasi Kesehatan Pengembangan Sumber Daya
	400.1.2.3	Fasilitasi Sumber daya hayati dan Pengembangan Sumber Daya
	400.1.2.4	Fasilitasi Mineral, energi dan lingkungan hidup
	400.1.2.5	Fasilitasi Teknologi dan inovasi
	400.1.2.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya
	400.1.2.7	Pemantauan dan evaluasi
	400.1.3	Peningkatan Infrastruktur
	400.1.3.1	Fasilitasi Transportasi peningkatan infrastruktur
	400.1.3.2	Fasilitasi Informasi dan
Pemrakarsa	Sekda	
		

JENIS/SERIES ARSIP		
		Telekomunikasi dalam peningkatan infrastruktur
	400.1.3.3	Fasilitasi Sosial dalam peningkatan infrastruktur
	400.1.3.4	Fasilitasi Ekonomi dalam peningkatan infrastruktur
	400.1.3.5	Fasilitasi energi dalam peningkatan infrastruktur
	400.1.3.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan infrastruktur
	400.1.3.7	Pemantauan dan evaluasi
400.1.4	Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha	
	400.1.4.1	Fasilitasi Invenstasi pembinaan ekonomi dan dunia usaha
	400.1.4.2	Fasilitasi Kelembagaan ekonomi dan dunia usaha
	400.1.4.3	Fasilitasi Usaha mikro, kecil dan menengah
	400.1.4.4	Fasilitasi Kemitraan usaha
	400.1.4.5	Fasilitasi Pengembangan komoditas unggulan
	400.1.4.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ekonomi dan dunia usaha
	400.1.4.7	Pemantauan dan evaluasi
	400.1.4.8	Identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal
	400.1.4.9	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal
	400.1.4.10	Monitoring dan evaluasi

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
		Ekonomi desa tertinggal
	400.1.4.11	Identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal
	400.1.4.12	Fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal
	400.1.4.13	Monitoring dan evaluasi Masyarakat tertinggal
	400.1.4.14	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
400.1.5	Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya	
	400.1.5.1	Penguatan kapasitas lembaga lokal
	400.1.5.2	Penguatan organisasi masyarakat
	400.1.5.3	Pemberdayaan masyarakat
	400.1.5.4	Kerjasama antar lembaga sosial dan budaya
	400.1.5.5	Ketenagakerjaan
	400.1.5.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan lembaga sosial dan budaya
	400.1.5.7	Pemantauan dan evaluasi
400.1.6	Pengembangan Daerah Khusus	
	400.1.6.1	Fasilitasi pengembangan Daerah perbatasan
	400.1.6.2	Fasilitasi pengembangan Daerah rawan konflik dan bencana
	400.1.6.3	Fasilitasi pengembangan Daerah Perdesaan
	400.1.6.4	Fasilitasi pengembangan Daerah pulau terpencil dan

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
		terluar
	400.1.6.5	Fasilitasi pengembangan Wilayah strategis
	400.1.6.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah khusus
	400.1.6.7	Pemantauan dan evaluasi
400.2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	400.2.1	Kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	400.2.2	Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik Sosial dan Hukum
	400.2.2.1	Data gender
	400.2.2.2	Advokasi dan fasilitasi
	400.2.3	Perlindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah Sosial, Tenaga Kerja, Korban Perdagangan)
	400.2.3.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
	400.2.3.2	Data perlindungan perempuan
	400.2.3.3	Advokasi dan fasilitasi
	400.2.3.4	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan
	400.2.3.5	Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender
	400.2.3.6	Analisis dan penyajian informasi gender
	400.2.3.7	Partisipasi publik untuk kesejahteraan ibu
	400.2.4	Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Berhadapan
Pemrakarsa	Sekda	
		

JENIS/SERIES ARSIP		
Dengan Hukum)		
	400.2.4.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak
	400.2.4.2	Data perlindungan anak
	400.2.4.3	Advokasi dan fasilitasi
	400.2.4.4	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak
	400.2.4.5	Partisipasi publik untuk kesejahteraan anak
400.2.5	Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur, Pengembangan Kota Layak Anak)	
	400.2.5.1	Pemenuhan Hak Anak
	400.2.5.2	Data Klaster Hak Anak
	400.2.5.3	Data tumbuh kembang anak
	400.2.5.4	Advokasi dan fasilitasi
	400.2.5.5	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak
	400.2.5.6	Penyelenggaraan parenting pola pengasuhan anak
400.2.6	Penghargaan terkait gender (Anugerah Parahita Ekapraya/APE)	
400.2.7	Penghargaan Kabupaten Layak Anak	
400.2.8	Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak	
400.3	PENDIDIKAN	
400.3.1	Kebijakan di bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
400.3.2	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal,	

Pemrakarsa	Sekda
	

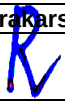
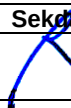
JENIS/SERIES ARSIP		
	Informal	
	400.3.2.1	Bahan Ajar (Alat Permainan Edukatif)
	400.3.2.2	Pelatihan Sosial
	400.3.2.3	Peringatan Hari anak
	400.3.2.4	Block Grant
400.3.3	Pendidikan Masyarakat	
	400.3.3.1	Penyelenggaraan Program
	400.3.3.2	Penilaian dan pemberian bantuan sosial
	400.3.3.3	Pembinaan Program
	400.3.3.4	Lomba/Pemberian Penghargaan
	400.3.3.5	Pameran
	400.3.3.6	Rakor
	400.3.3.7	Sosialisasi
	400.3.3.8	Sertifikasi dan Akreditasi
400.3.4	Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik	
400.3.5	Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama	
	400.3.5.1	Kurikulum, bahan ajar
	400.3.5.2	Block Grant
	400.3.5.3	Pelatihan, Bimtek, sosialisasi,
	400.3.5.4	Lomba, penghargaan, penganugerahan
	400.3.5.5	Bantuan operasional sekolah (BOS)
	400.3.5.6	Bantuan Siswa Miskin
400.3.6	Pendidikan khusus/Layanan Khusus	
	400.3.6.1	Kurikulum,Bahan ajar, alat bantu pembelajaran
	400.3.6.2	Block Grant
	400.3.6.3	Lomba, festival
	400.3.6.4	Sosialisasi, bimtek

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
	400.3.6.5	Pendataan
	400.3.6.6	Kelembagaan
400.3.7	Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik	
	400.3.7.1	Pendataan dan Pemeetaan
	400.3.7.2	Uji Kompetensi Guru
	400.3.7.3	Sertifikasi Guru
	400.3.7.4	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan
	400.3.7.5	Peningkatan kesejahteraan guru
	400.3.7.6	Sosialisasi, bimtek
	400.3.7.7	Block Grant
400.3.8	Sekolah Menengah Atas	
	400.3.8.1	Kurikulum
	400.3.8.2	Bahan Ajar
	400.3.8.3	Pelatihan
	400.3.8.4	Block grant
	400.3.8.5	Bimbingan teknis/sosialisasi
	400.3.8.6	Lomba , Sayembara, festival
	400.3.8.7	Bantuan operasional Sekolah (BOS)
	400.3.8.8	Bantuan siswa miskin
400.3.9	Pendidikan Khusus-Layanan Khusus	
	400.3.9.1	Bahan ajar
	400.3.9.2	Petunjuk Teknis
	400.3.9.3	Block grant
	400.3.9.4	Sosialisasi, bimtek
	400.3.9.5	Lomba, sayembara, jambore, festival
	400.3.9.6	Kurikulum/bahan pembelajaran
	400.3.9.7	Alat bantu pembelajaran
	400.3.9.8	Pendataan
	400.3.9.9	Kelembagaan (Unit kesehatan

Pemrakarsa	Sekolah
	

JENIS/SERIES ARSIP		
		sekolah, Pendidikan jasmani adaptif, pendidikan inklusi
400.3.10	Pendidik dan Tenaga Pendidik	
	400.3.10.1	Pendataan dan Pemetaan
	400.3.10.2	Uji Kompetensi Guru
	400.3.10.3	Setifikasi Guru
	400.3.10.4	Penilaian prestasi kerja guru dan pengawas sekolah
	400.3.10.5	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan
	400.3.10.6	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik
	400.3.10.7	Block grant
	400.3.10.8	Bimbingan teknis/sosialisasi
400.3.11	Penilaian Pendidikan	
	400.3.11.1	Penilaian Akademik
	400.3.11.2	Penilaian Non Akademik
	400.3.11.3	Analisis dan Sistem Informasi Penilaian
400.3.12	Data dan Statistik Pendidikan	
	400.3.12.1	Data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan
	400.3.12.2	Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran
400.3.13	Prasarana dan Sarana Pendidikan	
	400.3.13.1	Prasarana Pendidikan
	400.3.13.2	Sarana Pendidikan
	400.3.13.3	Monitoring dan Evaluasi
400.4 KEOLAHRAGAAN		
400.4.1	Kebijakan di bidang Keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
400.4.2	Pengelolaan Olahraga Pendidikan	
	400.4.2.1	Olahraga Pendidikan Dasar

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
		dan Menengah
	400.4.2.2	Olahraga Pendidikan Tinggi
	400.4.2.3	Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal
400.4.3	Pengelolaan Olahraga Rekreasi	
	400.4.3.1	Olahraga Massal
	400.4.3.2	Olahraga Tradisional
	400.4.3.3	Olahraga Petualangan, Tantangan dan Wisata
400.4.4	Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	
	400.4.4.1	Olahraga Pendidikan
	400.4.4.2	Olahraga Rekreasi
	400.4.4.3	Olahraga Prestasi
	400.4.4.4	Sekolah Khusus Olahraga
400.4.5	Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus	
	400.4.5.1	Olahraga Tradisional
	400.4.5.2	Layanan Khusus
400.4.6	Kemitraan dan Penghargaan Olahraga	
	400.4.6.1	Kemitraan Keolahragaan
	400.4.6.2	Penghargaan Olahraga
400.4.7	Pembibitan dan IPTEK Olahraga	
	400.4.7.1	Pembibitan Olahraga
	400.4.7.2	Kompetisi
	400.4.7.3	IPTEK Olahraga
400.4.8	Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan	
	400.4.8.1	Tenaga Keolahragaan
	400.4.8.2	Organisasi Keolahragaan
400.4.9	Industri dan Promosi Olahraga	
	400.4.9.1	Industri Olahraga
	400.4.9.2	Promosi Olahraga
400.4.10	Olahraga Prestasi	

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
	400.4.10.1	Daerah
	400.4.10.2	Nasional
	400.4.10.3	Internasional
400.4.11	Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga	
	400.4.11.1	Standardisasi Keolahragaan
	400.4.11.2	Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan
	400.4.11.3	Infrastruktur Olahraga
400.5	KEPEMUDAAN	
	400.5.1	Kebijakan di bidang Kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	400.5.2	Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda
	400.5.2.1	Penelusuran (Duta Kepemudaan)
	400.5.2.2	Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui forum kepemudaan)
	400.5.2.3	Pengembangan
	400.5.3	Peningkatan Wawasan Pemuda
	400.5.3.1	Wawasan Kebangsaan
	400.5.3.2	Wawasan Lingkungan
	400.5.3.3	Wawasan Sosial dan Hukum
	400.5.4	Peningkatan Kapasitas Pemuda
	400.5.4.1	Kapasitas Iman dan Taqwa
	400.5.4.2	Kapasitas IPTEK
	400.5.4.3	Pemanfaatan IPTEK
	400.5.5	Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/seni kepemudaan)
	400.5.5.1	Pengkajian
	400.5.5.2	Pengembangan
	400.5.5.3	Pendayagunaan (fasilitasi)
	400.5.6	Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
	400.5.6.1	Kepemimpinan : Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan
	400.5.6.2	Kepeloporan Pemuda : Kesukarelawan. Pengembangan kepedulian, pendampingan
400.5.7	Kewirausahaan	
	400.5.7.1	Kelembagaan
	400.5.7.2	Pengaderan
	400.5.7.3	Perintisan
400.5.8	Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan	
	400.5.8.1	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan : Kelembagaan dan Sumberdaya
	400.5.8.2	Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan : Kelembagaan dan Sumberdaya
	400.5.8.3	Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran: Kelembagaan dan Sumberdaya
	400.5.8.4	Pengawasan Kepramukaan : Kelembagaan, Program dan Sumberdaya
400.5.9	Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda	
	400.5.9.1	Standardisasi
	400.5.9.2	Infrastruktur Pemuda
400.5.10	Kemitraan dan Penghargaan Pemuda	
	400.5.10.1	Kemitraan
	400.5.10.2	Penghargaan Pemuda
400.6 KEBUDAYAAN		
	400.6.1	Kebijakan di bidang Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Pemrakarsa	Sekda
	

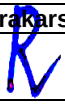
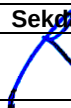
JENIS/SERIES ARSIP		
400.6.2	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	
	400.6.2.1	Registrasi Nasional
	400.6.2.2	Pelindungan
	400.6.2.3	Pengembangan dan Pemanfaatan
	400.6.2.4	Eksplorasi dan Dokumentasi
400.6.3	Pembinaan Kesenian dan Perfilman	
	400.6.3.1	Pembinaan Seni Pertunjukan
	400.6.3.2	Pembinaan Seni Rupa
	400.6.3.3	Pembinaan Seni Literasi dan apresiasi film
	400.6.3.4	Dokumentasi dan Publikasi
400.6.4	Sejarah dan Nilai Budaya	
	400.6.4.1	Sejarah
	400.6.4.2	Pemetaan nilai
	400.6.4.3	Verifikasi dan Perumusan Nilai
	400.6.4.4	Dokumentasi dan Publikasi
	400.6.4.5	Dokumentasi sejarah dan nilai sejarah
	400.6.4.6	Publikasi sejarah dan nilai sejarah
400.6.5	Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya	
	400.6.5.1	Internalisasi nilai budaya
	400.6.5.2	Kekayaan budaya
	400.6.5.3	Warisan budaya nasional dan dunia
	400.6.5.4	Diplomasi budaya
400.7 KESEHATAN		
400.7.1	Kebijakan di bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
400.7.2	Upaya Kesehatan Dasar	
	400.7.2.1	Pelayanan kedokteran keluarga

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
	400.7.2.2	Praktek klinis dokter di pelayanan kesehatan primer
	400.7.2.3	Pelaksanaan kesehatan primer
	400.7.2.4	Kesehatan gigi dan mulut di puskesmas
	400.7.2.5	Kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit
	400.7.2.6	ICD 10, Destistry & Stomatology
	400.7.2.7	Infeksi menular lewat transfusi darah
	400.7.2.8	Penyakit mulut di tingkat primer
	400.7.2.9	Pembiayaan darah
	400.7.2.10	Penggunaan darah rasional
	400.7.2.11	Unit transfusi darah, bank darah rumah sakit dan jejaring pelayanan darah
	400.7.2.12	Pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan
	400.7.2.13	Akreditasi puskesmas
	400.7.2.14	Puskesmas berprestasi
400.7.3	Upaya Kesehatan Rujukan	
	400.7.3.1	Pelayanan kesehatan rujukan
	400.7.3.2	Pelayanan kedokteran, organisasi profesi dan konsorsium upaya kesehatan (KUK)
	400.7.3.3	Pelayanan rumah sakit privat
	400.7.3.4	Pelayanan kesehatan rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
	400.7.3.5	Pelayanan kesehatan rumah

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
		sakit pendidikan
	400.7.3.6	Pelayanan pasien jaminan kesehatan
	400.7.3.7	Fasilitas pelayanan kesehatan asing dan perdagangan jasa
	400.7.3.8	Badan pengawas rumah sakit
	400.7.3.9	Perizinan dan penetapan kelas rumah sakit kelas A dan Penanam Modal Asing (PMA)
	400.7.3.10	Akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya
400.7.4	Keperawatan dan keteknisian medik	
	400.7.4.1	Pelayanan Keperawatan Dasar
	400.7.4.2	Pelayanan keperawatan profesional di rumah sakit
	400.7.4.3	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum
	400.7.4.4	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus
	400.7.4.5	Bina pelayanan kebidanan
400.7.5	Penunjang medik dan sarana kesehatan	
	400.7.5.1	Mikrobiologi dan imunologi
	400.7.5.2	Patologi dan toksilogi
	400.7.5.3	Radiologi
	400.7.5.4	Perizinan dan sertifikasi
	400.7.5.5	Sarana dan prasarana kesehatan
	400.7.5.6	Peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan
	400.7.5.7	Aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan
400.7.6	Kesehatan Jiwa	
	400.7.6.1	Kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
	400.7.6.2	Bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan
	400.7.6.3	Etikolegal dan asesmen
	400.7.6.4	Pencegahan dan penanggulangan narkotika dan sejenisnya
	400.7.6.5	Etikolegal dan asesmen
	400.7.6.6	Kesehatan jiwa kelompok beresiko
400.7.7	Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra	
	400.7.7.1	Surveilans dan respon kejadian luar biasa
	400.7.7.2	Imunisasi
	400.7.7.3	Karantina kesehatan dan kesehatan di pelabuhan
	400.7.7.4	Kesehatan matra
400.7.8	Pengendalian penyakit menular langsung	
	400.7.8.1	Pengendalian tuberkolosis
	400.7.8.2	Pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual
	400.7.8.3	Pengendalian infeksi saluran pernafasan akut
	400.7.8.4	Pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan
	400.7.8.5	Pengendalian kusta dan frambusia
400.7.9	Pengendalian penyakit bersumber binatang	
	400.7.9.1	Pengendalian malaria
	400.7.9.2	Pengendalian arbovirosis
	400.7.9.3	Pengendalian zoonosis
	400.7.9.4	Pengendalian filariasis dan kecacingan
400.7.10	Pengendalian penyakit tidak menular	

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
	400.7.10.1	Pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah
	400.7.10.2	Pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik
	400.7.10.3	Penyakit kanker
	400.7.10.4	Penyakit kronis dan generatif
	400.7.10.5	Gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan
400.7.11	Penyehatan lingkungan	
	400.7.11.1	Penyehatan air dan sanitasi dasar
	400.7.11.2	Pemukiman dan tempat umum
	400.7.11.3	Kawasan dan sanitasi darurat
	400.7.11.4	Higien sanitasi pangan
	400.7.11.5	Pengamanan limbah, udara, radiasi
400.7.12	Pengembangan teknologi laboratorium dan penapisan teknologi pengendalian penyakit dan pengendalian lingkungan	
400.7.13	Gizi	
	400.7.13.1	Gizi makro
	400.7.13.2	Gizi mikro
	400.7.13.3	Gizi klinik dan diatetik
	400.7.13.4	Konsumsi makanan dan jasa makanan
	400.7.13.5	Kewaspadaan gizi
400.7.14	Kesehatan ibu	
	400.7.14.1	Kesehatan ibu hamil
	400.7.14.2	Kesehatan ibu bersalin dan nifas
	400.7.14.3	Kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi
	400.7.14.4	Keluarga berencana

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
	400.7.14.5	Perlindungan kesehatan reproduksi
400.7.15	Kesehatan anak	
	400.7.15.1	Kelangsungan hidup bayi
	400.7.15.2	Kelangsungan anak balita dan pra sekolah
	400.7.15.3	Kewaspadaan penanganan balita beresiko
	400.7.15.4	Kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja
	400.7.15.5	Perlindungan kesehatan anak
400.7.16	Kesehatan Tradisional alternatif dan komplementer	
	400.7.16.1	Kesehatan tradisional keterampilan
	400.7.16.2	Kesehatan tradisional ramuan
	400.7.16.3	Kesehatan alternatif dan komplementer
	400.7.16.4	Penapisan dan kemitraan
400.7.17	Kesehatan kerja dan Olah raga	
	400.7.17.1	Pelayanan kesehatan kerja
	400.7.17.2	Kapasitas kerja
	400.7.17.3	Lingkungan kerja
	400.7.17.4	Kemitraan kesehatan kerja
	400.7.17.5	Kesehatan perkotaan
	400.7.17.6	Kesehatan olahraga
400.7.18	Obat Publk dan perbekalan kesehatan	
	400.7.18.1	Harga obat publik
	400.7.18.2	Pengadaan obat
	400.7.18.3	Perbekalan kesehatan
400.7.19	Produksi dan distribusi alat kesehatan	
	400.7.19.1	Alat kesehatan
	400.7.19.2	Produsen dan distributor alat kesehatan dan obat

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
	400.7.19.3	Produk diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga
400.7.20	Kefarmasian	
	400.7.20.1	Pelayanan kefarmasian
	400.7.20.2	Farmasi klinis
	400.7.20.3	Farmasi Komunitas
	400.7.20.4	Penggunaan obat rasional
400.7.21	Produksi dan distribusi kefarmasian	
	400.7.21.1	Obat tradisional
	400.7.21.2	Kosmetik dan makanan
	400.7.21.3	Narkotika, psikotropika, prekursor farmasi dan sediaan farmasi khusus
	400.7.21.4	Kemandirian obat dan bahan baku obat
400.7.22	Surat Keterangan, Sertifikasi dan Perijinan	
	400.7.22.1	Surat keterangan
	400.7.22.2	Sertifikasi dan perijinan
400.7.23	Penanggulangan Krisis Kesehatan	
	400.7.23.1	Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan
	400.7.23.2	Tanggap darurat dan pemulihan
	400.7.23.3	Pemantauan dan informasi
	400.7.23.4	Penanggulangan krisis kesehatan dalam bidang pengendalian penyakit dan penyehatan
	400.7.23.5	Pelayanan kesehatan reproduksi situasi bencana
400.7.24	Pengembangan dan Jaminan Kesehatan	
	400.7.24.1	Tersedianya data NHA setiap tahun

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
	400.7.24.2	Tersedianya dokumen teknis penguatan pelaksanaan JKN
400.7.25	Intelegensia Kesehatan	
	400.7.25.1	Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia kesehatan
	400.7.25.2	Penanggulangan masalah inteligensia kesehatan
400.7.26	Kesehatan Haji	
	400.7.26.1	Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji
	400.7.26.2	Peningkatan kesehatan dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji
400.7.27	Promosi Kesehatan	
	400.7.27.1	Sarana Promosi Kesehatan
	400.7.27.2	Pembinaan advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan peran
	400.7.27.3	Pengembangan pesan promosi kesehatan
	400.7.27.4	Hari kesehatan
400.7.28	Data dan Informasi	
	400.7.28.1	Statistik kesehatan
	400.7.28.2	Analisis dan diseminasi informasi
	400.7.28.3	Pengembangan sistem informasi dan bank data kesehatan
400.7.29	Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen	
	400.7.29.1	Penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
	400.7.29.2	Standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen
	400.7.29.3	Inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen
	400.7.29.4	Obat Asli Indonesia
400.7.30	Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	
	400.7.30.1	Penilaian keamanan pangan
	400.7.30.2	Standardisasi produk pangan
	400.7.30.3	Inspeksi dan sertifikasi produk pangan
	400.7.30.4	Surveilans dan penyuluhan keamanan pangan
	400.7.30.5	Pengawasan produk dan bahan berbahaya
400.7.31	Rekam Medis	
400.8	AGAMA DAN KEPERCAYAAN	
	400.8.1	Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	400.8.2	Fasilitasi
	400.8.2.1	Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Prov/Kab/Kota
	400.8.2.2	Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan
	400.8.2.3	Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dan Kepercayaan
	400.8.2.4	Kasus Keagamaan
	400.8.2.5	Kasus Aliran Keagamaan
400.8.3	Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME	
	400.8.3.1	Kelembagaan dan kepercayaan
	400.8.3.2	Pembinaan Kerukunan Hidup

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
		Beragama
	400.8.3.3	Komunitas Kepercayaan
	400.8.3.4	Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional
	400.8.3.5	Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial
400.9	SOSIAL	
	400.9.1	Kebijakan di bidang Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	400.9.2	Kesejahteraan Sosial Anak
	400.9.2.1	Kesejahteraan sosial anak balita
	400.9.2.2	Kesejahteraan sosial anak terlantar
	400.9.2.3	Kesejahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum
	400.9.2.4	Kesejahteraan sosial anak dengan kecatatan
	400.9.2.5	Kesejahteraan sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus
	400.9.3	Rehabilitasi Sosial
	400.9.3.1	Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara, mental
	400.9.3.2	Kelembagaan dan advokasi sosial
	400.9.3.3	Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan sosial
	400.9.4	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
	400.9.4.1	Gelandangan, pengemis dan pemulung

Pemrakarsa	Sekda
	

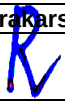
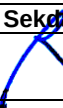
JENIS/SERIES ARSIP		
	400.9.4.2	Tuna susila dan korban trafficking perempuan
	400.9.4.3	Warga binaan lembaga pemasyarakatan meliputi penyiapan, reintegrasi
	400.9.4.4	Pelayanan sosial orang dengan HIV / AIDS dan kelompok minoritas
400.9.5	Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA	
400.9.6	Pelayanan sosial lanjut usia	
	400.9.6.1	Pelayanan sosial dalam dan luar panti
	400.9.6.2	Pengembangan kelembagaan meliputi pembinaan lembaga, kerjasama lembaga
	400.9.6.3	Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan
400.9.7	Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana bantuan sosial	
400.9.8	Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran	
400.9.9	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	
	400.9.9.1	Ketahanan sosial masyarakat meliputi keserasian sosial, penguatan Sumber Daya
	400.9.9.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi Sosial
	400.9.9.3	Pemulihan sosial meliputi penguatan sosial, reintegrasi sosial
	400.9.9.4	Kerjasama meliputi kerjasama pemerintah, kerjasama non

Pemrakarsa	Sekda
	

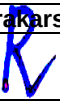
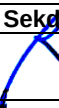
JENIS/SERIES ARSIP		
pemerintah		
400.9.10	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	
	400.9.10.1	Kesiapsiagaan dan mitigasi
	400.9.10.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial
	400.9.10.3	Pemulihan sosial dan penguatan sosial
	400.9.10.4	Kerjasama
400.9.11	Jaminan Sosial	
	400.9.11.1	Seleksi dan verifikasi
	400.9.11.2	Asuransi kesejahteraan sosial meliputi kelembagaan, pengelolaan premi
	400.9.11.3	Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan meliputi pendampingan dan penyaluran
	400.9.11.4	Kerjasama
400.9.12	Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan Sosial	
	400.9.12.1	Ketahanan keluarga
	400.9.12.2	Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan
	400.9.12.3	Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial
	400.9.12.4	Kemitraan dunia usaha
	400.9.12.5	Karang taruna meliputi kelembagaan, pengembangan kapasitas
400.9.13	Pemberdayaan komunitas adat terpencil	
	400.9.13.1	Persiapan pemberdayaan
	400.9.13.2	Pemberdayaan sumber daya

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
		manusia
	400.9.13.3	Penggalian dan pengembangan potensi
	400.9.13.4	Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil
	400.9.13.5	Kerjasama kelembagaan
400.9.14	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan	
	400.9.14.1	Identifikasi dan analisis
	400.9.14.2	Pengembangan kapasitas
	400.9.14.3	Penataan sosial lingkungan kumuh
	400.9.14.4	Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas
	400.9.14.5	Bantuan Langsung
	400.9.14.6	Kerjasama Kelembagaan
400.9.15	Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	
	400.9.15.1	Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan
	400.9.15.2	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan
	400.9.15.3	Pengembangan kesetiakawanan sosial
	400.9.15.4	Pengelolaan taman makam pahlawan
400.10 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		
400.10.1	Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
400.10.2	Pemerintahan Desa dan Kelurahan	
	400.10.2.1	Fasilitasi Pengembangan Desa

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
		dan Kelurahan
	400.10.2.2	Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
	400.10.2.3	Fasilitasi Permusyawaratan Desa
	400.10.2.4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
	400.10.2.5	Pengembangan Kapasitas Desa
400.10.3	Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat	
	400.10.3.1	Lembaga Masyarakat
	400.10.3.2	Pembangunan Partisipatif
	400.10.3.3	Pendataan Potensi Masyarakat
	400.10.3.4	Pengembangan Kawasan Perdesaan
	400.10.3.5	Pelatihan Masyarakat
400.10.4	Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat	
	400.10.4.1	Budaya Nusantara Budaya Nusantara
	400.10.4.2	Pemberdayaan Perempuan
	400.10.4.3	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
	400.10.4.4	Kesejahteraan Sosial
	400.10.4.5	Tenaga Kerja Perdesaan
400.10.5	Usaha Ekonomi Masyarakat	
	400.10.5.1	Usaha Pertanian dan Pangan
	400.10.5.2	Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam
	400.10.5.3	Produksi dan Pemasaran
	400.10.5.4	Usaha Ekonomi dan Keluarga
	400.10.5.5	Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal
400.10.6	Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan	

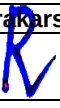
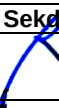
Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
	400.10.6.1	Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan
	400.10.6.2	Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan
	400.10.6.3	Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan
	400.10.6.4	Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan
	400.10.6.5	Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan
	400.10.7	Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
400.11 PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN		
	400.11.1	Kebijakan di bidang Pertamanan dan Pemakaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	400.11.2	Pertamanan
	400.11.2.1	Perencanaan Pertamanan
	400.11.2.2	Taman Kota
	400.11.2.3	Tata Hias dan Ornamen Kota
	400.11.3	Pemakaman
	400.11.3.1	Perencanaan Pemakaman
	400.11.3.2	Pemakaman
	400.11.3.3	Pelayanan Pemakaman
	400.11.4	Jalur Hijau
	400.11.4.1	Perencanaan Jalur Hijau
	400.11.4.2	Jalur Hijau Jalan
	400.11.4.3	Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air
	400.11.5	Peran Serta Masyarakat
	400.11.6	Pengawasan dan Penindakan
	400.11.7	Pengelolaan Data
Pemrakarsa	Sekda	

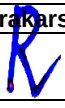
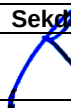
JENIS/SERIES ARSIP		
	400.11.8	Evaluasi dan Pelaporan
400.12	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
	400.12.1	Kebijakan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
	400.12.2	Pendaftaran Penduduk
	400.12.2.1	Identitas Penduduk
	400.12.2.2	Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI
	400.12.2.3	Pindah Datang Penduduk Antar Negara
	400.12.2.4	Pendataan Penduduk Rentan
	400.12.2.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
	400.12.3	Pencatatan Sipil
	400.12.3.1	Kelahiran dan Kematian
	400.12.3.2	Perkawinan dan Perceraian
	400.12.3.3	Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan
	400.12.3.4	Pencatatan Kewarganegaraan
	400.12.3.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
	400.12.4	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	400.12.4.1	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
	400.12.4.2	Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan
	400.12.4.3	Pengelolaan data Administrasi Kependudukan
	400.12.4.4	Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
	400.12.4.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
400.12.5	Pengembangan Kebijakan Kependudukan	
	400.12.5.1	Kuantitas Penduduk
	400.12.5.2	Kualitas Penduduk
	400.12.5.3	Mobilitas Penduduk
	400.12.5.4	Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk
	400.12.5.5	Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi
400.12.6	Penyerasian Kependudukan	
	400.12.6.1	Indikator Kependudukan
	400.12.6.2	Proyeksi Penduduk
	400.12.6.3	Perencanaan Kependudukan
	400.12.6.4	Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah
	400.12.6.5	Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah
400.13 KELUARGA BERENCANA		
400.13.1	Kebijakan di bidang Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
400.13.2	Analisis pengaduan kebijakan pengendalian penduduk	
	400.13.2.1	Pengumpulan dan pengolahan data
	400.13.2.2	Evaluasi dan pelaporan
400.13.3	Fasilitas pengaduan kebijakan pengendalian penduduk	
	400.13.3.1	Penyiapan fasilitas
	400.13.3.2	Evaluasi dan pelaporan
400.13.4	Profil dan proyeksi penduduk	

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
	400.13.4.1	Data profil dan proyeksi penduduk
	400.13.4.2	Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk
400.13.5	Penetapan parameter pengendalian penduduk	
	400.13.5.1	Penetapan sasaran parameter
	400.13.5.2	Evaluasi sasaran parameter
400.13.6	Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk	
	400.13.6.1	Pemanfaatan profil dan proyeksi
	400.13.6.2	Pemanfaatan parameter
400.13.7	Pengembangan Sistem	
	400.13.7.1	Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal
	400.13.7.2	Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
400.13.8	Pengembangan Materi	
	400.13.8.1	Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Formal
	400.13.8.2	Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
400.13.9	Monitoring dan Evaluasi	
	400.13.9.1	Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal
	400.13.9.2	Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
400.13.10	Analisis Sosial	
400.13.11	Analisis Ekonomi	
400.13.12	Analisis Dampak Politik, Pertahanan dan Keamanan	

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
400.13.13	Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	
400.13.14	Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah	
400.13.15	Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana	
400.13.16	Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah	
	400.13.16.1	Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah
	400.13.16.2	Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah
400.13.17	Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta	
400.13.18	Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta	
400.13.19	Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta	
	400.13.19.1	Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta
	400.13.19.2	Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta
400.13.20	Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan	
	400.13.20.1	Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan
	400.13.20.2	Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil,

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
		dan perbatasan
400.13.21	Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan	
	400.13.21.1	Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
	400.13.21.2	Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
400.13.22	Kesertaan keluarga berencana pria	
	400.13.22.1	Peningkatan akses keluarga berencana pria
	400.13.22.2	Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria
400.13.23	Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak	
400.13.24	Pencegahan PMS dan HIV/AIDS	
400.13.25	Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas	
400.13.26	Pelebagaan bina keluarga Balita dan anak	
	400.13.26.1	Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak
	400.13.26.2	Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak
400.13.27	Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak	
	400.13.27.1	Monitoring bina keluarga Balita dan anak
	400.13.27.2	Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak
400.13.28	Pelebagaan bina ketahanan remaja	
	400.13.28.1	Pelebagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan
	400.13.28.2	Pelebagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
400.13.29	Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja	
	400.13.29.1	Monitoring bina ketahanan remaja
	400.13.29.2	Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja
400.13.30	Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	
	400.13.30.1	Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia
	400.13.30.2	Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Rentan
400.13.31	Pelembagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan	
	400.13.31.1	Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
	400.13.31.2	Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
400.13.32	Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan	
	400.13.32.1	Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
	400.13.32.2	Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
400.13.33	Pengembangan program usaha ekonomi keluarga	
400.13.34	Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga	
400.13.35	Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga	
	400.13.35.1	Pengembangan administrasi

Pemrakarsa	Sekda
	

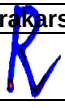
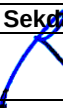
JENIS/SERIES ARSIP		
		dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga
	400.13.35.2	Pengembangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga
	400.13.36	Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga
	400.13.37	Pengembangan Program Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera
	400.13.38	Pelebagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
	400.13.38.1	Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
	400.13.38.2	Pengembangan Kemiitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
	400.13.39	Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
	400.13.39.1	Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
	400.13.39.2	Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
	400.13.40	Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
	400.13.40.1	Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
	400.13.40.2	Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
	400.13.41	Advokasi dan pencitraan
	400.13.42	Komunikasi, Informasi dan Edukasi
	400.13.42.1	Promosi
	400.13.42.2	Sarana produksi media

Pemrakarsa	Sekda
	

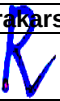
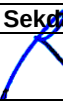
JENIS/SERIES ARSIP		
		komunikasi
	400.13.42.3	Produk media komunikasi
400.13.43	Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi	
400.13.44	Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota	
	400.13.44.1	Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
	400.13.44.2	Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
400.13.45	Hubungan dengan lembaga nonpemerintah	
	400.13.45.1	Pengembangan hubungan dengan lembaga nonpemerintah
	400.13.45.2	Penguatan hubungan dengan lembaga nonpemerintah
400.13.46	Tenaga Lini Lapangan	
	400.13.46.1	Pengembangan tenaga lini lapangan
	400.13.46.2	Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan
400.13.47	Institusi Masyarakat Pedesaan	
	400.13.47.1	Pengembangan institusi masyarakat pedesaan
	400.13.47.2	Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan
400.13.48	Mekanisme Operasional lini lapangan	
	400.13.48.1	Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan
	400.13.48.2	Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
400.13.49	Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan	
	400.13.49.1	Perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan
	400.13.49.2	Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan
400.13.50	Pengumpulan dan pengolahan data	
400.13.51	Analisis dan evaluasi	
	400.13.51.1	Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk
	400.13.51.2	Analisis dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera
400.13.52	Sistem aplikasi dan bank data	
	400.13.52.1	Pengembangan sistem aplikasi
	400.13.52.2	Pengelolaan bank data
400.13.53	Infrastruktur teknologi informasi	
	400.13.53.1	Pengembangan infrastruktur teknologi informasi
	400.13.53.2	Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi
400.13.54	Dokumentasi dan penyebarluasan informasi	
	400.13.54.1	Dokumentasi dan perpustakaan
	400.13.54.2	Pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi
400.14 HUBUNGAN MASYARAKAT		
400.14.1	Keprotokolan	
	400.14.1.1	Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar)
	400.14.1.2	Buku tamu Keprotokolan

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
	400.14.1.3	Agenda kegiatan pimpinan daerah
	400.14.1.4	Kunjungan dinas dalam dan luar negeri
400.14.2	Daftar nama/alamat kantor /pejabat	
400.14.3	Dokumentasi/ liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa bidang masing-masing, dalam berbagai media : kertas, foto/video/rekaman suara/multi media	
400.14.4	Pengumpulan,pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan	
	400.14.4.1	Kliping koran
	400.14.4.2	Brosur/Leaflet/poster/plakat
	400.14.4.3	Pengumuman/pemberitaan
400.14.5	Hubungan antar lembaga dan Pemerintahan Daerah	
	400.14.5.1	Hubungan antar lembaga pemerintah
	400.14.5.2	Hubungan dengan organisasi sosial / LSM
	400.14.5.3	Hubungan dengan perusahaan
	400.14.5.4	Hubungan dengan Perguruan Tinggi/sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/Praktek Kerja Lapang (PKL)
	400.14.5.5	Forum Kehumasan
	400.14.5.6	Hubungan dengan Media Massa
400.14.6	Dengar pendapat/hearing DPRD	
400.14.7	Bahan/materi pidato/sidang Muspida Provinsi/Kota/Kabupaten	
400.14.8	Penerbitan Majalah,buletin,koran dan jurnal	

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP	
400.14.9	Publikasi melalui media cetak maupun elektronik
400.14.10	Pameran/sayemara/lomba/festival,pembuatan spanduk dan iklan
400.14.11	Penghargaan/tanda kenang-kenangan
400.14.12	Ucapan Terimakasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf
500	PEREKONOMIAN
500.1	KETAHANAN PANGAN
500.1.1	Kebijakan di bidang Ketahanan Pangan yang dilakukan Pemerintah Daerah
500.1.2	Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
	500.1.2.1 Ketersediaan Pangan
	500.1.2.2 Akses Pangan
	500.1.2.3 Kerawanan Pangan
500.1.3	Distribusi dan Cadangan Pangan
	500.1.3.1 Distribusi Pangan
	500.1.3.2 Harga Pangan
	500.1.3.3 Cadangan Pangan
500.1.4	Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan
	500.1.4.1 Konsumsi Pangan
	500.1.4.2 Penganekaragaman Pangan
	500.1.4.3 Keamanan Pangan Segar
500.1.5	Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan
	500.1.5.1 Dewan Ketahanan Pangan
	500.1.5.2 Penghargaan Ketahan Pangan
500.1.6	Swasembada Pangan (Kearifan Lokal)
500.1.7	Bimbingan Teknis
500.1.8	Evaluasi
500.2	PERDAGANGAN
500.2.1	Kebijakan di bidang Perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.2.2	Perdagangan

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
Dalam Negeri		
	500.2.2.1	Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha
	500.2.2.2	Bisa Usaha Jasa Perdagangan
	500.2.2.3	Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan
	500.2.2.4	Informasi Perusahaan
	500.2.2.5	Pelaku Pasar
	500.2.2.6	Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah
	500.2.2.7	Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah
	500.2.2.8	Pengembangan Produk Lokal
	500.2.2.9	Pencitraan Produk Dalam Negeri
	500.2.2.10	Pengembangan Sarana Distribusi
	500.2.2.11	Pengelolaan Sarana Distribusi
	500.2.2.12	Kerjasama Pengembangan Sistem Logistik
	500.2.2.13	Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik
	500.2.2.14	Informasi Pasar
	500.2.2.15	Informasi Hasil Industri
	500.2.2.16	Barang Strategis
	500.2.2.17	Bahan Pokok Agro
500.2.3	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	
	500.2.3.1	Kelembagaan dan informasi standar
	500.2.3.2	Kerjasama Standarisasi
	500.2.3.3	Perumusan dan penerapan standar

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
	500.2.3.4	Tata usaha
	500.2.3.5	Kerjasama, informasi, dan publikasi
	500.2.3.6	Analisa penyelenggaraan perlindungan konsumen
	500.2.3.7	Bimbingan konsumen dan pelaku usaha
	500.2.3.8	Fasilitas kelembagaan
	500.2.3.9	Produk pertambangan dan aneka industri
	500.2.3.10	Produk pertanian, kimia dan kehutanan
	500.2.3.11	Jasa
	500.2.3.12	Kerjasama
	500.2.3.13	Sarana dan Kerjasama
	500.2.3.14	Kelembagaan dan dan penilaian
	500.2.3.15	UTTP dan Standar Ukuran
	500.2.3.16	Pengawasan
	500.2.3.17	Balai pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran
	500.2.3.18	Balai Pengujian UTTP
500.2.4	Perdagangan Berjangka Komoditi	
	500.2.4.1	Pengkajian pasar
	500.2.4.2	Pengawasan Transaksi
	500.2.4.3	Pengawasan Keuangan dan Audit
	500.2.4.4	Pengkajian pasar
	500.2.4.5	Pengembangan Pasar
	500.2.4.6	Sistem informasi
	500.2.4.7	Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang
	500.2.4.8	Pengawasan pasar lelang
	500.2.4.9	Pengawasan sistem gudang

Pemrakarsa	Sekda
	

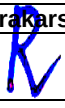
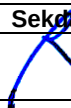
JENIS/SERIES ARSIP		
	500.2.5	Bimbingan Teknis
	500.2.6	Evaluasi
500.3	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	500.3.1	Kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.3.2	Kelembagaan Koperasi dan UKM
	500.3.2.1	Organisasi dan Badan Hukum Koperasi
	500.3.2.2	Tata Laksana Koperasi dan UKM
	500.3.2.3	Keanggotaan Koperasi
	500.3.2.4	Pengendalian dan Akuntabilitas
	500.3.3	Produksi
	500.3.3.1	Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	500.3.3.2	Kehutanan dan Perkebunan
	500.3.3.3	Perikanan dan Peternakan
	500.3.3.4	Industri Kerajinan dan Pertambangan
	500.3.3.5	Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha
	500.3.4	Pembiayaan
	500.3.4.1	Program Pendanaan
	500.3.4.2	Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam
	500.3.4.3	Urusan Permodalan
	500.3.4.4	Asuransi dan Jasa Keuangan
	500.3.4.5	Pembiayaan dan Penjaminan Kredit
	500.3.4.6	Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)
	500.3.5	Pemasaran dan Jaringan Usaha

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
	500.3.5.1	Perdagangan Dalam Negeri
	500.3.5.2	Ekspor dan Impor
	500.3.5.3	Sarana dan Prasarana Pemasaran
	500.3.5.4	Kemitraan dan Jaringan Usaha
	500.3.5.5	Informasi dan Publikasi Bisnis
	500.3.5.6	Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM
500.3.6	Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	500.3.6.1	Pengembangan Kewirausahaan
	500.3.6.2	Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM
	500.3.6.3	Peran Serta Masyarakat
	500.3.6.4	Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM
	500.3.6.5	Advokasi
500.3.7	Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha	
	500.3.7.1	Produktifitas dan Mutu
	500.3.7.2	Restrukturisasi Usaha
	500.3.7.3	Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)
	500.3.7.4	Fasilitasi Investasi UKMK
	500.3.7.5	Pengembangan Sarana Bisnis
500.3.8	Pengkajian Sumber Daya UKMK	
	500.3.8.1	Penelitian Koperasi
	500.3.8.2	Penelitian UKM
	500.3.8.3	Penelitian Sumber Daya
	500.3.8.4	Pengembangan Perkaderan UMK
500.3.9	Kerja Sama Hubungan Antar Lembaga	
500.3.10	Pedagang Kaki Lima (PKL)	
	500.3.10.1	Peraturan Perundang- Undangan
	500.3.10.2	Sarana dan Prasarana

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
	500.3.11	Monitoring dan Evaluasi
500.4	KEHUTANAN	
	500.4.1	Kebijakan di bidang Kehutanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.4.2	Penyuluhan
	500.4.2.1	Program Kerja Penyuluhan
	500.4.2.2	Materi Penyuluhan
	500.4.2.3	Program Penyuluhan
	500.4.2.4	Sarana Penyuluhan
	500.4.2.5	Pengembangan Tenaga Penyuluhan
	500.4.2.6	Pelaksanaan Penyuluhan
	500.4.2.7	Pemberdayaan Masyarakat
	500.4.2.8	Deseminasi
	500.4.2.9	Evaluasi, dan Laporan
	500.4.3	Planologi Kehutanan
	500.4.3.1	Perencanaan Makro Kawasan Hutan
	500.4.3.2	Penataan Ruang Kawasan Hutan
	500.4.3.3	Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan
	500.4.3.4	Pengukuhan dan Penataaan Kawasan Hutan
	500.4.3.5	Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan
	500.4.3.6	Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan
	500.4.3.7	Inventarisasi Sumber Daya Hutan
	500.4.3.8	Pemantauan Sumber Daya Hutan
	500.4.3.9	Pemetaan Sumber Daya Hutan
	500.4.3.10	Jaringan Data Spasial

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
	500.4.3.11	Penggunaan Kawasan Hutan
	500.4.3.12	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan
	500.4.3.13	Informasi Penggunaan Kawasan Hutan
	500.4.3.14	Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
	500.4.3.15	Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan
	500.4.3.16	Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
500.4.4	Bina Usaha Kehutanan	
	500.4.4.1	Data areal HPH /HTI/IUPHHK
	500.4.4.2	SK HPH/HTI/IUPHHK
	500.4.4.3	Kerjasama
	500.4.4.4	Pembatalan/Penolakan
	500.4.4.5	Perpanjangan
	500.4.4.6	Modal dan Peralatan
	500.4.4.7	Investasi Industri
	500.4.4.8	Peralatan
	500.4.4.9	Tenaga Kerja
	500.4.4.10	Pemegang Saham
	500.4.4.11	Neraca Perusahaan
	500.4.4.12	Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)
	500.4.4.13	Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH)
	500.4.4.14	Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT)
	500.4.4.15	Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL)

Pemrakarsa	Sekda
	

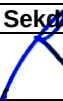
JENIS/SERIES ARSIP		
	500.4.4.16	Target Produksi RKT dan Beban Kerja
	500.4.4.17	Produksi Kayu
	500.4.4.18	Produksi non kayu
	500.4.4.19	Industri Kayu HPH/HTI/IUPHHK
	500.4.4.20	Industri Kayu Non HPH/HTI/IUPHHK
	500.4.4.21	Industri Non Kayu
	500.4.4.22	Hutan Tanaman Industri Pulp
	500.4.4.23	Hutan Tanaman Industri Pertukangan
	500.4.4.24	Pelanggaran dan Sanksi
	500.4.4.25	Pemblokiran
	500.4.4.26	Denda
	500.4.4.27	Pencabutan Areal HPH/HTI/IUPHHK
	500.4.4.28	Pola Pemanfaatan Hutan Produksi
	500.4.4.29	Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi
	500.4.4.30	Informasi Sumber Daya Hutan Produksi
	500.4.4.31	Pengembangan Investasi Usaha
	500.4.4.32	Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam
	500.4.4.33	Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam/Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil
	500.4.4.34	Produksi Hutan Alam
	500.4.4.35	Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam
	500.4.4.36	Pengembangan Hutan

Pemrakarsa	Sekda
	

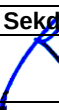
JENIS/SERIES ARSIP		
		Tanaman Industri
	500.4.4.37	Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat
	500.4.4.38	Pengembangan Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman/Rencana Kerja Usaha Produksi
	500.4.4.39	Penilaian Kinerja Pengembangan Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman
	500.4.4.40	Pembiayaan Hutan Tanaman
	500.4.4.41	Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan
	500.4.4.42	Peredaran Hasil Hutan
	500.4.4.43	Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan
	500.4.4.44	Penertiban Peredaran Hasil Hutan
	500.4.4.45	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
	500.4.4.46	Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer Hasil Hutan
	500.4.4.47	Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan
	500.4.4.48	Pembinaan HPH/HTI/IUPHHK
	500.4.4.49	Pembinaan TPTI/TPTJ/Silvikultur
500.4.5	Standardisasi dan Lingkungan	
	500.4.5.1	Standardisasi
	500.4.5.2	Sarana Pengujian Hasil Hutan
	500.4.5.3	Pengembangan
	500.4.5.4	Pemasaran Hasil Hutan
	500.4.5.5	Pengendalian Lingkungan

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
	500.4.5.6	Angkutan Hasil Hutan
	500.4.5.7	Tanda Pengenal Perusahaan Tata Usaha Hasil Hutan
	500.4.5.8	Legalitas Tata Usaha Hasil Hutan
	500.4.5.9	Palu Tok Kualitas Tata Usaha Hasil Hutan
	500.4.5.10	Pass Angkutan Hasil Hutan
	500.4.5.11	Sertifikat Ekspor Hasil Hutan
500.4.6	Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	
	500.4.6.1	Flora dan Fauna yang Dilindungi
	500.4.6.2	Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi
	500.4.6.3	Lembaga Konservasi/Kebun Binatang
	500.4.6.4	Konvensi Keanekaragaman Hayati
	500.4.6.5	Kawasan Konservasi
	500.4.6.6	Pengamanan Hutan
	500.4.6.7	Program dan Evaluasi Penyidikan dan Perlindungan
	500.4.6.8	Penyidikan dan Perlindungan Wilayah Hutan
	500.4.6.9	Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
	500.4.6.10	Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
	500.4.6.11	Bina Cinta Alam
	500.4.6.12	Kader Konservasi Sumber Daya Alam
	500.4.6.13	Data organisasi pencinta alam dan kader konservasi SDA
500.4.7	Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan	

Pemrakarsa	Sekda
	

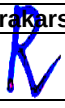
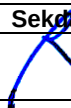
JENIS/SERIES ARSIP		
	Perhutanan Sosial	
	500.4.7.1	Pengelolaan Benih
	500.4.7.2	Kebun Benih
	500.4.7.3	Tegakan Benih
	500.4.7.4	Pengadaan Benih
	500.4.7.5	Pengujian dan Penyimpanan Benih
	500.4.7.6	Lalu Lintas Angkutan Benih
	500.4.7.7	Pembibitan
	500.4.7.8	Lalu Lintas Angkutan Benih
	500.4.7.9	Pengembangan Usaha Perbenihan
	500.4.7.10	Pengendalian Peredaran Benih
	500.4.7.11	Rehabilitasi Hutan dan Lahan
	500.4.7.12	Tanaman Reboisasi
	500.4.7.13	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
	500.4.7.14	Perhutanan Sosial
	500.4.7.15	Pengendalian Perladangan
500.4.8	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	
	500.4.8.1	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Kehutanan
	500.4.8.2	Monitoring dan Evaluasi Penelitian
	500.4.8.3	Diseminasi
	500.4.8.4	Gelar Teknologi
	500.4.8.5	Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan
500.5	KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	500.5.1	Kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.5.2	Perikanan Tangkap
	500.5.2.1	Data dan Statistik Perikanan Tangkap

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
	500.5.2.2	Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan
	500.5.2.3	Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Tangkap Ikan
	500.5.2.4	Pendaftaran Kapal Perikanan
	500.5.2.5	Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan
	500.5.2.6	Perbantuan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
	500.5.2.7	Alokasi Usaha Penangkapan Ikan
	500.5.2.8	Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan
	500.5.2.9	Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan
	500.5.2.10	Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan
	500.5.2.11	Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan
	500.5.2.12	Kelembagaan Usaha Penangkapan
	500.5.2.13	Investasi dan Permodalan Usaha
	500.5.2.14	Kenelayanan
	500.5.2.15	Pembinaan Pengelolaan Usaha
	500.5.2.16	Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan
500.5.3	Perikanan Budidaya	
	500.5.3.1	Potensi Lahan dan Air
	500.5.3.2	Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar
	500.5.3.3	Pengelolaan Induk Perbenihan

Pemrakarsa	Sekda
	

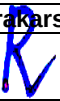
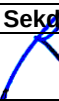
JENIS/SERIES ARSIP		
		ikan air tawar
	500.5.3.4	Perbenihan Skala Kecil
	500.5.3.5	Informasi dan Distribusi Pembenihan
	500.5.3.6	Budidaya Air Tawar
	500.5.3.7	Budidaya Ikan Hias
	500.5.3.8	Sertifikasi Budidaya Perikanan
	500.5.3.9	Data dan Statistik Perikanan Budidaya
	500.5.3.10	Hama dan Penyakit Ikan
	500.5.3.11	Perlindungan Lingkungan Budidaya
	500.5.3.12	Investasi dan Permodalan Usaha Budidaya
	500.5.3.13	Kewirausahaan Budidaya
	500.5.3.14	Pelayanan Usaha Budidaya
	500.5.3.15	Kelembagaan dan Ketenagaakerjaan
	500.5.3.16	Promosi Usaha dan Budaya
500.5.4		Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
	500.5.4.1	Standarisasi Pengolahan Hasil
	500.5.4.2	Pengembangan Produk
	500.5.4.3	Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
	500.5.4.4	Industri Pengolahan
	500.5.4.5	Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil
	500.5.4.6	Standarisasi Pengembangan Produk Non Konsumsi
	500.5.4.7	Promosi dan Jaringan Ikan Hias
	500.5.4.8	Pengembangan Industri
	500.5.4.9	Sarana dan Prasarana Pengembangan Produk Non

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
		Konsumsi
	500.5.4.10	Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri
	500.5.4.11	Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri
	500.5.4.12	Jaringan Distribusi dan Kemitraan Pemasaran Dalam Negeri
	500.5.4.13	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Dalam Negeri
	500.5.4.14	Sarana dan Prasarana Pemasaran Dalam Negeri
	500.5.4.15	Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri
	500.5.4.16	Analisis dan Informasi Pemasaran Luar Negeri
	500.5.4.17	Pengembangan Ekspor
	500.5.4.18	Pengembangan Impor
	500.5.4.19	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Luar Negeri
	500.5.4.20	Pelayanan Usaha
	500.5.4.21	Kemitraan Usaha
	500.5.4.22	Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran
	500.5.4.23	Investasi dan Permodalan
	500.5.4.24	Informasi dan Promosi
500.5.5	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	
	500.5.5.1	Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yurisdiksi
	500.5.5.2	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah I
	500.5.5.3	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah II

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
	500.5.5.4	Informasi dan Evaluasi Spasial
	500.5.5.5	Jejaring, Data, dan Informasi Konservasi
	500.5.5.6	Konservasi Wawasan
	500.5.5.7	Konservasi Jenis Ikan
	500.5.5.8	Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan
	500.5.5.9	Mitigasi Bencana Lingkungan
	500.5.5.10	Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan
	500.5.5.11	Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir dan Laut
	500.5.5.12	Rehabilitasi dan Reklamasi
	500.5.5.13	Identifikasi Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.5.14	Pengelolaan Ekosistem Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.5.15	Investasi dan Promosi Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.5.16	Sarana dan Prasarana Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.5.17	Akses Permodalan
	500.5.5.18	Akses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
	500.5.5.19	Sosial Budaya Masyarakat
	500.5.5.20	Pengembangan Usaha
500.5.6	Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	
	500.5.6.1	Pengawasan Penangkapan Wilayah Barat
	500.5.6.2	Pengawasan Penangkapan Wilayah Timur
	500.5.6.3	Pengawasan Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
	500.5.6.4	Pengawasan Usaha Budidaya
	500.5.6.5	Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi
	500.5.6.6	Pengawasan Pencemaran Perairan
	500.5.6.7	Pengawasan Pesisir dan Pulau- Pulau Terkecil
	500.5.6.8	Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya Non Hayati
	500.5.6.9	Logistik dan Operasional Wilayah Barat
	500.5.6.10	Logistik dan Operasional Wilayah Timur
	500.5.6.11	Perawatan Kapal Pengawas
	500.5.6.12	Pengawakan Kapal Pengawas
	500.5.6.13	Sistem Pemantauan
	500.5.6.14	Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan
	500.5.6.15	Pemantauan Sumber Daya Perikanan
	500.5.6.16	Pengembangan Infrastruktur Pengawasan
	500.5.6.17	Penyidikan
	500.5.6.18	Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal
	500.5.6.19	Kerja Sama Penegakan Hukum dan Fasilitas PPNS Perikanan
	500.5.6.20	Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran
	500.5.7	Karantina Ikan
	500.5.7.1	Pemeriksaan Ikan
	500.5.7.2	Penahanan
	500.5.7.3	Pengasingan

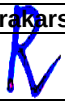
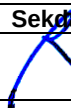
Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP						
	500.5.7.4	Pengamatan				
	500.5.7.5	Pengakuan				
	500.5.7.6	Penolakan				
	500.5.7.7	Pemusnahan				
	500.5.7.8	Persyaratan lalu Lintas Pemasukan				
	500.5.7.9	Persyaratan lalu Lintas Pengeluaran				
	500.5.7.10	Permohonan Sertifikat				
	500.5.7.11	Pemasukan Formulir				
	500.5.7.12	Pemasukan Sertifikat				
	500.5.7.13	Evaluasi dan Monitoring Sertifikat				
	500.5.7.14	Surat Perintah				
	500.5.7.15	Rekomendasi				
	500.5.7.16	Penutupan Suatu Area				
	500.5.7.17	Pelanggaran Lalu Lintas Ikan				
	500.5.7.18	Pengawasan Peraturan Perkarantinaan				
	500.5.7.19	Pengawasan Pelaksanaan Operasional				
	500.5.7.20	Instalasi Karantina Sementara				
	500.5.7.21	Lokasi Karantina				
500.6	PERTANIAN					
	500.6.1	Kebijakan di bidang Pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah				
	500.6.2	Perlindungan hortikultura				
	500.6.2.1	Perlindungan Tanaman Buah				
	500.6.2.2	Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat				
	500.6.2.3	Perlindungan Tanaman Florikultura				
	500.6.2.4	Dampak iklim dan Persyaratan Teknis				
<table><tr><td>Pemrakarsa</td><td>Sekda</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>			Pemrakarsa	Sekda		
Pemrakarsa	Sekda					
						

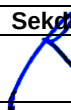
JENIS/SERIES ARSIP		
500.6.3	Perbenihan Hortikultura	
	500.6.3.1	Penilaian Varietas
	500.6.3.2	Pengawasan Mutu Benih
	500.6.3.3	Budidaya dan Pascapanen Florikultura
500.6.4	Perluasan dan Pengelolaan Lahan	
	500.6.4.1	Basis Data Lahan
	500.6.4.2	Pengendalian Lahan
	500.6.4.3	Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan
	500.6.4.4	Perluasan Kawasan Tanaman Pangan
	500.6.4.5	Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan
500.6.5	Pengelolaan Air Irigasi	
	500.6.5.1	Pengembangan Sumber Air
	500.6.5.2	Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air
	500.6.5.3	Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup
	500.6.5.4	Kelembagaan
500.6.6	Pembiayaan Pertanian	
	500.6.6.1	Pembiayaan Program
	500.6.6.2	Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama
	500.6.6.3	Pembiayaan agribisnis
	500.6.6.4	Kelembagaan dan Pemberdayaan agribisnis
500.6.7	Pupuk Pestisida	
	500.6.7.1	Pupuk Organik dan Pembenah Tanah
	500.6.7.2	Pupuk Anorganik
	500.6.7.3	Pestisida

Pemrakarsa	Sekda
	

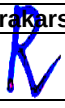
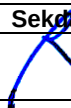
JENIS/SERIES ARSIP		
	500.6.7.4	Pengawasan Pupuk dan Pestisida
500.6.8	Alat dan Mesin Pertanian	
	500.6.8.1	Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian
	500.6.8.2	Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian
	500.6.8.3	Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian
500.6.9	Perbenihan Tanaman Pangan	
	500.6.9.1	Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih
	500.6.9.2	Produksi Benih Serealia
	500.6.9.3	Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi
	500.6.9.4	Kelembagaan Benih
500.6.10	Budidaya Serealia	
	500.6.10.1	Padi Irigasi dan Rawa
	500.6.10.2	Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering
	500.6.10.3	Jagung
	500.6.10.4	Serealia Lain
500.6.11	Budidaya Aneka Kacang dan Umbi	
	500.6.11.1	Kedelai
	500.6.11.2	Ubi Kayu
	500.6.11.3	Aneka Kacang
	500.6.11.4	Aneka Umbi
500.6.12	Tanaman Pangan	
	500.6.12.1	Pengelolaan Data Organisasi Pengganggu Tumbuhan
	500.6.12.2	Dampak Perubahan Iklim
	500.6.12.3	Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
		Tumbuhan
	500.6.12.4	Pengelolaan Pengendalian Hama Tepadu
500.6.13	Pascapanen Tanaman Pangan	
	500.6.13.1	Padi
	500.6.13.2	Jagung dan Serealia alin
	500.6.13.3	Kedelai dan Aneka Kacang
	500.6.13.4	Aneka Umbi
500.6.14	Pengolahan Hasil Pertanian	
	500.6.14.1	Tanaman Pangan
	500.6.14.2	Holtikultura
	500.6.14.3	Perkebunan
	500.6.14.4	Peternakan
500.6.15	Mutu dan Standarasi	
	500.6.15.1	Standardisasi
	500.6.15.2	Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu
	500.6.15.3	Akreditasi dan Kelembagaan
	500.6.15.4	Kerjasama dan Harmonisasi
500.6.16	Pengembangan Usaha dan Investasi	
	500.6.16.1	Kemitraan dan Kewirausahaan
	500.6.16.2	Investasi
	500.6.16.3	Promosi Dalam Negeri
	500.6.16.4	Promosi Luar Negeri
500.6.17	Pemasaran Domestik	
	500.6.17.1	Informasi Pasar
	500.6.17.2	Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga
	500.6.17.3	Sarana dan Kelembagaan Pasar
	500.6.17.4	Jaringan Pemasaran
500.6.18	Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan (antara lain : Rencana Kerja, TOR/ Proposal, Pembentukan Tim Kerja dan	

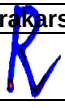
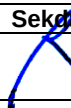
Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
Surat menyurat)		
500.6.19	Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan	
	500.6.19.1	Hasil Penelitian dan Pengembangan
	500.6.19.2	Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi
500.6.20	Diseminasi	
500.6.21	Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian	
	500.6.21.1	Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop
	500.6.21.2	Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Pubikasi lainnya
500.6.22	Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan	
500.6.23	Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan	
500.6.24	Data Penelitian dan Pengembangan	
500.6.25	Evaluasi Penelitian/ Pengkajian dan Pengembangan	
500.6.26	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)	
	500.6.26.1	Hak Cipta
	500.6.26.2	Hak Paten Sederhana
	500.6.26.3	Hak Paten Biasa
	500.6.26.4	Hak Merek
	500.6.26.5	Pendaftaran Varietas Tanaman
	500.6.26.6	Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim dan Tahunan
	500.6.26.7	Permohonan HKI yang ditolak

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP						
500.6.27	Pelayanan Perijinan Pertanian					
	500.6.27.1	Sarana I (bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian)				
	500.6.27.2	Sarana II (bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis pengalihan saham perkebunan)				
	500.6.27.3	Sarana III (bidang bibit, karkas,daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak)				
500.6.28	Pelayanan Hukum					
	500.6.28.1	Sertifikasi				
	500.6.28.2	Pertimbangan Hukum				
500.6.29	Karantina Pertanian					
	500.6.29.1	Karantina Tumbuhan				
	500.6.29.2	Karantina Hewan				
500.6.30	Bimbingan Teknis					
500.6.31	Evaluasi					
500.7	PETERNAKAN					
500.7.1	Kebijakan di bidang Peternakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah					
500.7.2	Peternakan dan Kesehatan Hewan					
	500.7.2.1	Perbibitan Ternak (antara lain: Produksi Bibit Ternak Ruminansia, Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia, Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak, Pengembangan Bibit Ternak, Surat Rekomendasi &				
<table><tr><td>Pemrakarsa</td><td>Sekda</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>			Pemrakarsa	Sekda		
Pemrakarsa	Sekda					
						

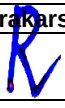
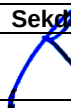
JENIS/SERIES ARSIP		
		Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran)
	500.7.2.2	Pakan Ternak
	500.7.2.3	Budidaya Ternak
	500.7.2.4	Kesehatan Hewan (antara lain: Pengamatan Penyakit Hewan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Perlindungan Hewan, Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan, Pengawasan Obat Hewan)
	500.7.2.5	Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen (antara lain: Pascapanen, Higien Sanitasi, Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan, Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan, Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran)
	500.7.3	Bimbingn Teknis
	500.7.4	Evaluasi
500.8	PERKEBUNAN	
	500.8.1	Kebijakan di bidang Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.8.2	Tanaman Semusim
	500.8.2.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim
	500.8.2.2	Perbenihan Tanaman Semusim

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
	500.8.2.3	Budidaya Teknologi Budidaya Tanaman Semusim
	500.8.2.4	Pemberdayaan Tanaman Semusim
500.8.3	Tanaman Rempah & Penyegar	
	500.8.3.1	Identifikasi dan Pendayaguunaan Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar
	500.8.3.2	Perbenihan Tanaman Rempah & Penyegar
	500.8.3.3	Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar
	500.8.3.4	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Rempah & Penyegar
500.8.4	Tanaman Tahunan	
	500.8.4.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya, Tanaman Tahunan
	500.8.4.2	Perbenihan Tanaman Tahunan
	500.8.4.3	Budidaya Tanaman Tahunan
	500.8.4.4	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan
500.8.5	Perlindungan Perkebunan	
	500.8.5.1	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim, Perlindungan Perkebunan
	500.8.5.2	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah

Pemrakarsa	Sekda
	

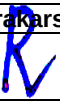
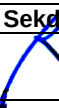
JENIS/SERIES ARSIP		
		dan Penyegar
	500.8.5.3	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan
	500.8.5.4	Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran
500.8.6	Pascapanen dan Pembinaan Usaha	
	500.8.6.1	Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar
	500.8.6.2	Pascapanen Tanaman Tahunan
	500.8.6.3	Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan
	500.8.6.4	Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik
500.8.7	Bimbingan Teknis Perkebunan	
500.8.8	Evaluasi Perkebunan	
500.9	PERINDUSTRIAN	
	500.9.1	Kebijakan di bidang Perindustrian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.9.2	Iklim Usaha dan Kerja Sama
	500.9.2.1	Industri Manufaktur
	500.9.2.2	Industri Agro
	500.9.2.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
	500.9.2.4	Industri Kecil dan Menengah
500.9.3	Promosi Industri	
	500.9.3.1	Industri Manufaktur
	500.9.3.2	Promosi Industri Agro
	500.9.3.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
	500.9.3.4	Industri Kecil dan Menengah

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
500.9.4	Standarisasi dan Teknologi	
	500.9.4.1	Industri Manufaktur
	500.9.4.2	Industri Agro
	500.9.4.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
	500.9.4.4	Industri Kecil dan Menengah
500.9.5	Hak atas Kekayaan Intelektual	
	500.9.5.1	Industri Manufaktur
	500.9.5.2	Industri Agro
	500.9.5.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
	500.9.5.4	Industri Kecil dan Menengah
500.9.6	Industri Hijau	
	500.9.6.1	Industri Manufaktur
	500.9.6.2	Industri Agro
	500.9.6.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
	500.9.6.4	Industri Kecil dan Menengah
500.9.7	Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota	
500.9.8	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri (Provinsi dan Kabupaten/Kota)	
500.9.9	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan Industri	
500.9.10	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri	
500.9.11	Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional	
500.9.12	Standarisasi	
	500.9.12.1	Standar
	500.9.12.2	Penyiapan Penerapan
	500.9.12.3	Infrastruktur Standar
500.9.13	Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri	
	500.9.13.1	Kebijakan Industri
	500.9.13.2	Perpajakan dan Tarif

Pemrakarsa	Sekda
	

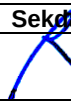
JENIS/SERIES ARSIP		
	500.9.13.3	Pengembangan Model Industrial
500.9.14	Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup	
	500.9.14.1	Industri Hijau
	500.9.14.2	Lingkungan Hidup
	500.9.14.3	Energi
500.9.15	Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual	
	500.9.15.1	Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri
	500.9.15.2	Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri
	500.9.15.3	Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual
500.9.16	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri	
500.10	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
500.10.1	Kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
500.10.2	Rekomendasi Kegeologian	
	500.10.2.1	Mitigasi Gunung Api, Gempa Bumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah
	500.10.2.2	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
	500.10.2.3	Pertambangan
	500.10.2.4	Panas Bumi
	500.10.2.5	Geosains
	500.10.2.6	Pengukuran Time Domain Electromagnetic (TDEM)
	500.10.2.7	Kelayakan Lingkungan
500.10.3	Penelitian Kegeologian	
	500.10.3.1	Administrasi pelaksanaan

Pemrakarsa	Sekda
	

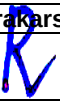
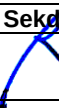
JENIS/SERIES ARSIP		
		penelitian
	500.10.3.2	Administrasi tenaga penelitian
	500.10.3.3	Administrasi penggunaan peralatan penelitian
	500.10.3.4	Log-book peralatan survei/peralatan uji/kalibrasi
	500.10.3.5	Hasil penelitian dan penyelidikan kegeologian
	500.10.3.6	Sumber Daya Geologi
	500.10.3.7	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
	500.10.3.8	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
	500.10.3.9	Survei Geologi
500.10.4	Inventarisasi dan evaluasi kegeologian	
	500.10.4.1	Sumber Daya Geologi
	500.10.4.2	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
	500.10.4.3	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
	500.10.4.4	Survei Geologi
	500.10.4.5	Konservasi
500.10.5	Administrasi Pelayanan Kegeologian dan Penyajian Data dan Informasi	
	500.10.5.1	Peta potensi dan sebaran
	500.10.5.2	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
	500.10.5.3	Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami, Semburan Lumpur/Gas serta kebakaran Batubara
	500.10.5.4	Survei Geologi
500.10.6	Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi	

Pemrakarsa	Sekda
	

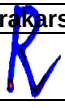
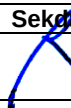
JENIS/SERIES ARSIP		
	500.10.6.1	Rencana Induk Jaringan Gas Bumi
	500.10.6.2	Rencana dan Realisasi Investasi
	500.10.6.3	Penetapan Harga Minyak Mentah
	500.10.6.4	Penetapan Bagii Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak dan Gas Bumi
	500.10.6.5	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP
	500.10.6.6	Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
	500.10.6.7	Rekomendasi Kemampuan Produksi Barang dan Jasa Dalam Negeri
	500.10.6.8	Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) dan Rencana Impor Barang (RIB)
500.10.7	Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	
	500.10.7.1	Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi (Konvensional dan Non Konvensional)
	500.10.7.2	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pemanfaatan Data Migas untuk presentasi makalah, publikasi makalah, pembukaan data, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Unitisasi

Pemrakarsa	Sekda
	

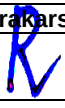
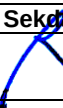
JENIS/SERIES ARSIP	
	Lapangan Minyak dan Gas Bumi, Rekomendasi Pengalihan Interest, Rekomendasi Penyisihan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Penyiapan Dokumen Pengakhiran Kontrak, Laporan Data Survei Seismik, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi per semester, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi Tahunan)
500.10.7.3	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Rekomendasi Penggunaan Data Eksplorasi (publikasi makalah, analisa laboratorium, Reprocessing), Penetapan Pengusahaan Minyak Bumi dari Sumur Tua, Penetapan Pengusahaan Lapangan Produksi yang Dikembalikan Kepada Pemerintah, Buku Cadangan Minyak dan Gas Bumi, Data Cadangan Strategis/Penyangga Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Pemantauan Data Produksi Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Inventarisasi Mutu Minyak dan Gas Bumi)
500.10.7.4	Pengembangan lapangan Minyak dan Gas Bumi (POD)

Pemrakarsa	Sekda
	

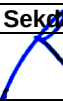
JENIS/SERIES ARSIP		
	500.10.7.5	Perpanjangan Kontrak KKS
	500.10.7.6	Penetapan Alokasi dan Harga Gas
	500.10.7.7	Partisipasi Interest
	500.10.7.8	Tumpang Tindih Lahan
500.10.8	Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	
	500.10.8.1	Perumusan pedoman, prosedur, layanan serta pengawasan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain (antara lain: Pedoman dan Prosedur, Layanan Usaha (Izin/rekomendasi/penandasan, Pengawasan)
	500.10.8.2	Fasilitasi dan pertimbangan pelanggaran
	500.10.8.3	Penetapan Harga dan Subsidi Bahan Bakar yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
500.10.9	Teknik dan Lingkungan	
	500.10.9.1	Perumusan pelaksanaan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) / Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
	500.10.9.2	Registrasi Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) (antara lain: Berkas permohonan, Berita Acara Hasil Evaluasi, Salinan Sertifikat NPT, Register NPT)
	500.10.9.3	Buku Register Welding

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
		Procedure Specification (WPS)/ Procedure Qualification Record (PQR)
500.10.9.4		Register dan Sertifikat Kualifikasi Juru Las
500.10.9.5		Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi)
500.10.9.6		Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi)
500.10.9.7		Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan
500.10.9.8		Dokumen Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Hulu dan Hilir (antara lain: Dokumen Permohonan Pengajuan persetujuan penunjukkan Calon kepala/wakil kepala teknik tambang minyak dan gas bumi, Surat Undangan Presentasi, Makalah Presentasi, Surat Persetujuan/ Pengesahan penunjukan

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
		kepala/wakil Kepala Teknik Tambang Minyak dan Gas Bumi)
500.10.9.9		Penghargaan Keselamatan Kerja (antara lain: Surat Permohonan Mendapatkan Penghargaan, Surat Penugasan Dalam Rangka Verifikasi, Berkas Hasil Evaluasi Verifikasi, Salinan Tanda Penghargaan, Dokumen Pengajuan dan penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi)
500.10.9.10		Usaha penunjang
500.10.10	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	
500.10.10.1		Perencanaan Program Kerja Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
500.10.10.2		Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
500.10.10.3		Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
500.10.10.4		Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Infrastuktur Minyak dan Gas Bumi
500.10.11	Penyiapan Program Energi Terbarukan dan Konservasi Energi	
500.10.11.1		Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi
500.10.11.2		Usul Program Aneka Energi

Pemrakarsa	Sekda
	

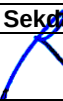
JENIS/SERIES ARSIP		
		Pemerintah Daerah dan Lembaga
	500.10.11.3	Penyiapan Program Pemanfaatan Energi
	500.10.11.4	Proyeksi Kebutuhan Energi dari EBT
	500.10.11.5	Perencanaan Pemanfaatan Energi dari EBT
	500.10.11.6	Penyusunan Neraca Energi
	500.10.11.7	Road Map di Bidang EBT
500.10.12	Panas Bumi	
	500.10.12.1	Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
	500.10.12.2	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI)
	500.10.12.3	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Peralatan
	500.10.12.4	Rekomendasi Bahan Peledak
	500.10.12.5	Perizinan penggunaan gudang bahan peledak
	500.10.12.6	Izin Tangki Bahan Bakar Cair
	500.10.12.7	Persetujuan sertifikasi Welding Prosedure Specifikation (WPS) dan Prosedure Qualification Record (PQR) dan kualifikasi Juru Las
	500.10.12.8	Penerbitasn Izin Usaha Panas Bumi (IUP)
	500.10.12.9	Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB)
	500.10.12.10	Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung (IPL)
	500.10.12.11	Penetapan kapasitas usaha panas bumi

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
	500.10.12.12	Penetapan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
	500.10.12.13	Pengawasan Eksplorasi dan Eksplorasi Panas Bumi
	500.10.12.14	Pelaksanaan Kerja Sama Panas Bumi
	500.10.12.15	Inventarisasi, Verifikasi dan Evaluasi Obvitnas Bidang Panas Bumi
	500.10.12.16	Monitoring Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi
	500.10.12.17	Pembinaan dan Pengawasan Investasi Panas Bumi
500.10.13	Bioenergi	
	500.10.13.1	Penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BNN)
	500.10.13.2	Pengadaan Bahan Bakar Nabati (BBN)
	500.10.13.3	Penerbitan Rekomendasi Ekspor - Impor
	500.10.13.4	Penetapan Indeks Harga Pasar BBN (HIP BBN)
	500.10.13.5	Evaluasi/Revisi HIP BBN
	500.10.13.6	Database Pengusahaan Bioenergi
	500.10.13.7	Penetapan Badan Usaha sebagai Pengelola Energi Biomassa atau Biogas untuk Pembangkit Listrik
	500.10.13.8	Penetapan Spesifikasi Bahan

Pemrakarsa	Sekda
	

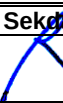
JENIS/SERIES ARSIP		
		Bakar Nabati
	500.10.13.9	Usul Program Bioenergi Pemerintah Daerah dan Lembaga
500.10.14	Aneka Energi	
	500.10.14.1	Penerbitan Izin Usaha Aneka Energi
	500.10.14.2	Penetapan Kapasitas Usaha
	500.10.14.3	Rekomendasi Kompetensi dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
	500.10.14.4	Rekomendasi Persetujuan Perubahan Pemegang Saham
	500.10.14.5	Persetujuan Rencana Impor Barang (RIB)
500.10.15	Konservasi Energi	
	500.10.15.1	Audit Energi melalui program kemitraan Konservasi Energi
	500.10.15.2	Monitoring Implementasi hasil audit energi melalui program kemitraan konservasi energi
	500.10.15.3	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan manajemen energi di pengguna energi di atas 6.000 TOE
	500.10.15.4	Pengawasan sertifikasi label dan tanda hemat energi pada lampu swabalast
	500.10.15.5	Penyusunan daftar peralatan/teknologi efisiensi
	500.10.15.6	Penyusunan emisi energi gas rumah kaca
	500.10.15.7	Pemberian insentif dan disinsentif konservasi energi

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
	500.10.15.8	Profil investasi efisiensi energi
	500.10.15.9	Invesment Grade Audit (IGA)
	500.10.15.10	Bimbingan Teknis Bidang EBTKE
500.10.16	Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE	
	500.10.16.1	Usul Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga
	500.10.16.2	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
	500.10.16.3	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang EBTKE
	500.10.16.4	Evaluasi Program Kerja
500.10.17	Bina Program Tenaga Listrik	
	500.10.17.1	Investasi dan pendanaan tenaga listrik (antara lain: Dokumen grant/hibah/loan agreement luar negeri, Monitoring loan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan penanganan permasalahan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan kegiatan investasi dan pendanaan tenaga listrik)
	500.10.17.2	Pengembangan listrik pedesaan (antara lain: Data program listrik perdesaan, Data rasio elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RD), Monitoring dan evaluasi listrik

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
		perdesaan, Listrik untuk masyarakat tidak mampu)
	500.10.17.3	Data dan Informasi Ketenagalistrikan
500.10.18	Bina Usaha Ketenagalistikan	
	500.10.18.1	Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan (antara lain: Pelayanan izin usaha penyediaan tenaga listrik (IO, IUPL-S, dan IUPL), Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan, Data laporan berkala pemegang Izin)
	500.10.18.2	Harga dan Subsidi Listrik
	500.10.18.3	Hubungan komersial tenaga listrik
	500.10.18.4	Perlindungan konsumen listrik (antara lain: Penanganan pengaduan konsumen listrik, Dokumen Pengawasan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen Evaluasi realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen evaluasi pemberian kompensasi pinalti tingkat mutu pelayanan PT PLN (Persero)
500.10.19	Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	
	500.10.19.1	Kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan
	500.10.19.2	Penyiapan kompetensi dan pengawasan tenaga teknik ketenagalistrikan
	500.10.19.3	Usaha penunjang ketenagalistrikan (antara lain:

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
		Dokumen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL), Dokumen Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telematika (IPJ Telematika), Dokumen Penandasahan Rencana Impor Barang (RIB)
	500.10.19.4	Perlindungan lingkungan ketenagalistrikan (antara lain: Dokumen forum keselamatan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, Dokumen pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sektor ketenagalistrikan, Laporan pembinaan dan pengawasan lingkungan, Dokumen perhitungan faktor emisi Clean Development Mechansim (CDM)
	500.10.20	Sertifikasi
	500.10.20.1	Dokumen Sertifikasi Produk peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik
	500.10.20.2	Dokumen Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)
	500.10.20.3	Dokumen Penerbitan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Instalasi Tenaga Listrik
	500.10.20.4	Dokumen Pembinaan dan pengawasan sertifikat laik operasi (SLO) instalasi tenaga listrik

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
	500.10.20.5	Registrasi Sertifikasi
	500.10.21	Akreditasi Ketenagalistrikan
	500.10.22	Standarisasi Kompetensi
	500.10.23	Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Bidang Ketenagalistrikan
	500.10.23.1	Perumusan rancangan SNI bidang ketenagalistrikan
	500.10.23.2	Forum konsensus rancangan SNI bidang ketenagalistrikan
	500.10.23.3	Program pemberlakuan SNI wajib bidang ketenagalistrikan
	500.10.23.4	Dokumen pengawasan penerapan SNI wajib bidang ketenagalistrikan
	500.10.24	Standardisasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan
	500.10.24.1	Klasifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan
	500.10.24.2	Kualifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan
	500.10.24.3	Dokumen penunjukan LIT (Lembaga Inspeksi Teknis)
	500.10.24.4	Laporan berkala pemegang penunjukan LIT
	500.10.24.5	Laporan hasil pengawasan penunjukan
	500.10.25	Bina Program Mineral dan Batubara
	500.10.25.1	Penyiapan dan Perencanaan Program Mineral dan Batubara
	500.10.25.2	Rencana Induk Mineral dan Batubara
	500.10.25.3	Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Bidang Mineral dan Batubara

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
	500.10.25.4	Data dan Informasai Mineral dan Batubara
	500.10.25.5	Pelaporan Program Mineral dan Batubara
	500.10.25.6	Perencanaan, Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Mineral dan Batubara melalui lelang reguler
	500.10.25.7	Data dan Informasi Wilayah Mineral dan Batubara
	500.10.25.8	Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara
	500.10.25.9	Pengembangan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara
500.10.26	Pembinaan Pengusahaan Mineral	
	500.10.26.1	Ketenagakerjaan
	500.10.26.2	Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang
	500.10.26.3	Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan mineral
	500.10.26.4	Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan mineral
	500.10.26.5	Laporan/data kegiatan eksplorasi mineral
	500.10.26.6	Pengawasan produksi dan pemasaran mineral (logam, bukan logam batuan, radioaktif, dan mineral jarang)
	500.10.26.7	Perizinan usaha pertambangan mineral
	500.10.26.8	Kontrak Karya (KK)
	500.10.26.9	Pengelolaan barang Kontrak Karya (KK)

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
	500.10.26.10	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)
	500.10.26.11	Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan mineral
	500.10.26.12	Teguran kepada pengusahaan Kontrak Karya (KK)
	500.10.26.13	Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan mineral
	500.10.26.14	Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir
	500.10.26.15	Pelaporan usaha pertambangan mineral
	500.10.26.16	Penghargaan usaha pertambangan mineral
	500.10.26.17	Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral
500.10.27	Pembinaan Pengusahaan Batubara	
	500.10.27.1	Ketenagakerjaan
	500.10.27.2	Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang
	500.10.27.3	Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan batubara
	500.10.27.4	Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan batubara
	500.10.27.5	Laporan/data kegiatan eksplorasi batubara
	500.10.27.6	Pengawasan produksi dan pemasaran batubara (bitumen

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP	
	padat, batuan aspal, batubara dan gambut) antara lain: Laporan Produksi dan Penjualan Batubara PKP2B, IUP hingga Laporan Kontrak Penjualan Pertambangan Batubara
500.10.27.7	Perizinan Usaha Pertambangan Batubara
500.10.27.8	Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
500.10.27.9	Pengelolaan Barang Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) antara lain: Persetujuan Pengadaan Barang Modal (Masterlist) PKP2B hingga Data Asset Perusahaan Batubara
500.10.27.10	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)
500.10.27.11	Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
500.10.27.12	Teguran kepada pengusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
500.10.27.13	Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan batubara
500.10.27.14	Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal

Pemrakarsa	Sekda
	

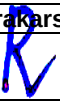
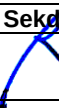
JENIS/SERIES ARSIP		
		sampul dengan rancangan akhir
	500.10.27.15	Pelaporan usaha pertambangan batubara
	500.10.27.16	Penghargaan usaha pertambangan batubara
	500.10.27.17	Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara
500.10.28	Penerimaan Negara	
	500.10.28.1	Penerimaan Negara Bukan Pajak
	500.10.28.2	Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
	500.10.28.3	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP
500.10.29	Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara	
	500.10.29.1	Perumusan RSNI (Rancangan Standar Nasional Indonesia)/ RSKKNI (Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) antara lain: Draft Rancangan, Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI), dan Standar Nasional Indonesia (SNI)
	500.10.29.2	Pengawasan Standardisasi
	500.10.29.3	Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang
	500.10.29.4	Pengawasan Keselamatan Kegiatan dan Keselamatan Pekerja (antara lain: Laporan

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP	
	Kecelakaan Tambang/Statistik hingga Laporan Hasil Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
500.10.29.5	Pemeriksaan teknis dan pengujian instalasi dan peralatan tambang (antara lain: Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi dan Peralatan Tambang hingga Berita Acara Hasil Inspeksi)
500.10.29.6	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
500.10.29.7	Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
500.10.29.8	Rekomendasi bahan kimia
500.10.29.9	Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (antara lain: Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)/Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) hingga Surat Penetapan Jaminan Pasca Tambang)
500.10.29.10	Laporan berkala teknik dan lingkungan pertambangan/ laporan tahunan pelaksanaan reklamasi (antara lain: Laporan Bulanan Terjadinya Pencemaran (LPL-5) hingga Laporan Tahunan Pelaksanaan Reklamasi)

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP	
500.10.29.11	Pemberian Penghargaan (antara lain: Pemberian Penghargaan Lingkungan Pertambangan, Pemberian Penghargaan Keselematan Kerja, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan lingkungan Pertambangan, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan)
500.10.29.12	Pengawasan lingkungan pertambangan
500.10.29.13	Usaha Jasa Mineral dan Batubara
500.10.29.14	Pembinaan dan pengawasan usaha jasa mineral dan batubara
500.10.29.15	Rekomendasi Teknis (antara lain: Pengajuan Rekomendasi Teknis, Hasil Evaluasi Dokumen Pengajuan Rekomendasi Teknis, Surat Rekomendasi Teknis)
500.10.29.16	Persetujuan Teknis (antara lain: Pengajuan Persetujuan Teknis, Hasil Evaluasi Dokumen Pengajuan Persetujuan Teknis, Surat Persetujuan Teknis)
500.10.29.17	Pengawasan Teknis
500.10.29.18	Pengawasan Konservasi Mineral dan Batubara

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
500.10.29.19	Pembinaan Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara (antara lain: Sosialisasi Standardisasi, Bimbingan Teknis Lingkungan Pertambangan, Bimbingan Teknis/Sosialisasi Pertambangan)	
500.10.30	Program Penelitian dan Pengembangan	
500.10.30.1	Rencana Penelitian dan Pengembangan	
500.10.30.2	Pengembangan dan inovasi	
500.10.30.3	Dokumen penerapan/pemanfaatan/pendayagunaan/replikasi/prototipe hasil penelitian/pengkajian/pengembangan/inovasi	
500.10.30.4	Advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi	
500.10.30.5	Diseminasi hasil penelitian,pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	
500.10.30.6	Pembinaan penelitian/Pengembangan,pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	
500.10.30.7	Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	
500.10.30.8	Data dan informasi hasil	

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
		penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.9	Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.10	Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)
	500.10.30.11	Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.12	Layanan jasa penelitian, pengembangan, penerapan IPTEK
	500.10.30.13	Sertifikasi personil peneliti bidang Sumber Daya Mineral
500.10.31	Sarana Litbang	
	500.10.31.1	Administrasi penggunaan peralatan
	500.10.31.2	Log-book Peralatan Survei/Peralatan Uji Kalibrasi
500.10.32	Afiliasi	
	500.10.32.1	Proyek Percontohan
	500.10.32.2	Promosi dan Layanan Jasa Teknologi
	500.10.32.3	Pembinaan Penelitian dan Pengembangan
	500.10.32.4	Penyajian Informasi
500.10.33	Penelitian dan Pengembangan Kegeologian	
	500.10.33.1	Pemetaan dan penelitian geologi, geokimia, dan geofisika kelautan

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
	500.10.33.2	Energi Kelautan dan Kewilayahan Penelitian Energi dan kewilayahan pantai
	500.10.33.3	Penelitian sumber daya energi dan mineral kelautan
	500.10.33.4	Penelitian Sumber Daya Mineral Kelautan
500.10.34	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi	
	500.10.34.1	Teknologi Eksplorasi
	500.10.34.2	Teknologi Eksploitasi
	500.10.34.3	Laboratorium
	500.10.34.4	Study
	500.10.34.5	Teknologi Proses
	500.10.34.6	Teknologi Aplikasi Produk
	500.10.34.7	Teknologi Gas
500.10.35	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral Batubara	
	500.10.35.1	Teknologi Eksploitasi Tambang dan Pengolahan Sumber Daya
	500.10.35.2	Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan mineral
	500.10.35.3	Teknologi Pemanfaatan Batubara
500.10.36	Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan	
	500.10.36.1	Energi baru terbarukan
	500.10.36.2	Teknologi Ketenagalistrikan
	500.10.36.3	Lingkungan dan Konservasi Energi
	500.10.36.4	Penelitian dan Pengembangan Teknologi PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dan Konservasi Energi

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
500.11 PERHUBUNGAN		
500.11.1	Kebijakan di bidang Perhubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
500.11.2	Jaringan Prasarana dan Pelayanan	
	500.11.2.1	Penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang
	500.11.2.2	Penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C
	500.11.2.3	Penetapan lokasi terminal barang utama
	500.11.2.4	Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal
	500.11.2.5	Jaringan trayek angkutan antar kota/provinsi
	500.11.2.6	Jaringan lintas pada jaringan jalan primer
	500.11.2.7	Penetapan kelas jalan primer
	500.11.2.8	Kualifikasi teknis petugas terminal
	500.11.2.9	Jaringan transportasi jalan sekunder
500.11.3	Pengembangan Transportasi Jalan	
	500.11.3.1	Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
	500.11.3.2	Pengembangan transportasi jalan
500.11.4	Pengujian Kendaraan Bermotor	
	500.11.4.1	Pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor
	500.11.4.2	Sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
	500.11.4.3	Sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor
	500.11.4.4	Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor
500.11.5	Teknologi Kendaraan Bermotor	
	500.11.5.1	Sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor
	500.11.5.2	Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor
	500.11.5.3	Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor
	500.11.5.4	Harmonisasi dan standardisasi regulasi kendaraan bermotor
500.11.6	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	
	500.11.6.1	Analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan
	500.11.6.2	Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional
500.11.7	Perlengkapan Jalan	
	500.11.7.1	Pedoman teknis perlengkapan jalan
	500.11.7.2	Penimbangan kendaraan bermotor di jalan
	500.11.7.3	Akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor
	500.11.7.4	Kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor
	500.11.7.5	Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan

Pemrakarsa	Sekda
	

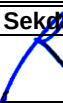
JENIS/SERIES ARSIP		
		nasional
500.11.8	Angkutan Penumpang	
	500.11.8.1	Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi
	500.11.8.2	Izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara
	500.11.8.3	Izin trayek antar kota antar provinsi
	500.11.8.4	Izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas negara & antar kota/provinsi
	500.11.8.5	Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum
	500.11.8.6	Pemberian subsidi angkutan umum
	500.11.8.7	Angkutan perintis
	500.11.8.8	Penghargaan perusahaan angkutan umum
500.11.9	Angkutan Barang	
	500.11.9.1	Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
	500.11.9.2	Tarif angkutan barang
	500.11.9.3	Izin operasi angkutan barang tertentu
	500.11.9.4	Pembinaan angkutan barang
	500.11.9.5	Izin dispensasi angkutan jalan
500.11.10	Monitoring Operasional	
	500.11.10.1	Pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
	500.11.10.2	Pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan
	500.11.10.3	Berkas Pelanggaran Perda
500.11.11	Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil	
	500.11.11.1	Pedoman Teknis
	500.11.11.2	Penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
	500.11.11.3	Bimtek PPNS
	500.11.11.4	Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
500.11.12	Analisa dan Evaluasi Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan	
	500.11.12.1	Pendataan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan
	500.11.12.2	Analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, & penyeberangan
500.11.13	Pengembangan Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan	
	500.11.13.1	Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (peta jaringan, blueprint

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
		jaringan)
	500.11.13.2	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.14	Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
	500.11.15	Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
	500.11.15.1	Perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.15.2	Pengawakan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau dan penyeberangan
	500.11.16	Rancang Bangun Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan
	500.11.16.1	Perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.16.2	Pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan
	500.11.16.3	Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional
	500.11.16.4	Penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.17	Kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai,

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP	
	danau dan penyeberangan
500.11.18	Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan
500.11.18.1	Manajemen lalu lintas
500.11.18.2	Tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan
500.11.18.3	Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan sungai & danau
500.11.18.4	Sertifikasi inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau
500.11.19	Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan
500.11.19.1	Pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan
500.11.19.2	Penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau
500.11.19.3	Perambuan sungai, danau dan penyeberangan
500.11.20	Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
500.11.20.1	Penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan
500.11.20.2	Persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional
500.11.21	Tarif dan Keperintisan

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
	500.11.21.1	Perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.21.2	Kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan
500.11.22	Bina Sistem Transportasi Perkotaan	
	500.11.22.1	Jaringan Transportasi Perkotaan
	500.11.22.2	Transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan
	500.11.22.3	Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi
500.11.23	Lalu Lintas Perkotaan	
	500.11.23.1	Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan
	500.11.23.2	Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan
	500.11.23.3	Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah
500.11.24	Angkutan Perkotaan	
	500.11.24.1	Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek
	500.11.24.2	Jaringan trayek perkotaan
	500.11.24.3	Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
		satu wilayah administrasi provinsi
500.11.25	Pengaduan Moda Transportasi Perkotaan	
	500.11.25.1	Penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang
	500.11.25.2	Pengaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi
	500.11.25.3	Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi
500.11.26	Dampak Transportasi Perkotaan	
	500.11.26.1	Penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan
	500.11.26.2	Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan
	500.11.26.3	Masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan
	500.11.26.4	Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota
	500.11.26.5	Rekomendasi hasil analisis

Pemrakarsa	Sekda
	

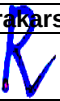
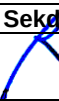
JENIS/SERIES ARSIP		
		dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan
	500.11.26.6	Masterplan transportasi perkotaan
500.11.27	Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan	
	500.11.27.1	Monitoring dan evaluasi data kecelakaan
	500.11.27.2	Kualifikasi unit pengkajian
	500.11.27.3	Pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
500.11.28	Pengembangan Keselamatan	
	500.11.28.1	Program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan
	500.11.28.2	Harmonisasi kebijakan
500.11.29	Promosi dan Kemitraan Keselamatan	
	500.11.29.1	Promosi Keselamatan : penyuluhan, publikasi dan destinasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.29.2	Kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
500.11.30	Bina Keselamatan Angkutan Umum	

Pemrakarsa	Sekda
	

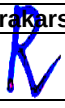
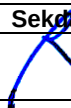
JENIS/SERIES ARSIP		
	500.11.30.1	Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum
	500.11.30.2	Keselamatan Awak Angkutan Umum dan awak kapal sungai dan danau
500.11.31	Audit Keselamatan	
	500.11.31.1	Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia
	500.11.31.2	Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.31.3	Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan
500.11.32	Inspeksi Keselamatan	
	500.11.32.1	Pedoman keselamatan
	500.11.32.2	Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.32.3	Investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan
500.11.33	Parkir	
	500.11.33.1	Surat Tugas Juru Parkir
	500.11.33.2	Izin tempat khusus parkir swasta
	500.11.33.3	Surat Tugas TKP Pemerintah
500.12 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
500.12.1	Kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
500.12.2	Telekomunikasi	
	500.12.2.1	Layanan Jaringan Telekomunikasi
	500.12.2.2	Layanan Jasa Telekomunikasi
	500.12.2.3	Penomoran Telekomunikasi dan Informatika
	500.12.2.4	Kelayakan Sistem Telekomunikasi
500.12.3	Penyiaran	
	500.12.3.1	Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi
	500.12.3.2	Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi
500.12.4	Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal	
	500.12.4.1	Telekomunikasi Khusus Pemerintah Daerah
	500.12.4.2	Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah Daerah
	500.12.4.3	Layanan Khusus Penyiaran
	500.12.4.4	Pelayanan Kewajiban Universal
	500.12.4.5	Pengembangan Infrastruktur
500.12.5	Pengendalian Informatika	
	500.12.5.1	Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi
	500.12.5.2	Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi
	500.12.5.3	Monitoring dan Evaluasi Penyiaran
	500.12.5.4	Pencegahan dan Penertiban
500.12.6	e- Government	

Pemrakarsa	Sekda
	

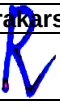
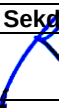
JENIS/SERIES ARSIP		
	500.12.6.1	Tata Kelola e-Government
	500.12.6.2	Teknologi dan Infrastruktur e-Government
	500.12.6.3	Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Government
	500.12.6.4	Aplikasi Layanan Pemerintahan
	500.12.6.5	Aplikasi Layanan Publik
500.12.7	e- Business	
	500.12.7.1	Tata Kelola e-Business
	500.12.7.2	Teknologi dan Infrastruktur e-Business
	500.12.7.3	Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Business
	500.12.7.4	Aplikasi Layanan e-Business
500.12.8	Pemberdayaan Informatika Masyarakat	
	500.12.8.1	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan
	500.12.8.2	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan
500.12.9	Pemberdayaan Industri Informatika	
	500.12.9.1	Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika
	500.12.9.2	Industri Perangkat Informatika Pengguna
	500.12.9.3	Industri Perangkat Lunak
	500.12.9.4	Industri Konten Multimedia
500.12.10	Keamanan Informasi	
	500.12.10.1	Tata Kelola Keamanan Informasi
	500.12.10.2	Teknologi Keamanan Informasi
	500.12.10.3	Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan

Pemrakarsa	Sekda
	

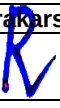
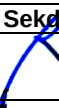
JENIS/SERIES ARSIP		
		Informasi
	500.12.10.4	Penyidikan dan Penindakan
	500.12.10.5	Budaya Keamanan Informasi
500.12.11	Komunikasi Publik	
	500.12.11.1	Tata Kelola Komunikasi Publik
	500.12.11.2	Pengelolaan Opini Publik
	500.12.11.3	Layanan Komunikasi Publik
500.12.12	Pengolahan dan Penyediaan Informasi	
	500.12.12.1	Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan
	500.12.12.2	Informasi Perekonomian
	500.12.12.3	Informasi Kesejahteraan Rakyat
500.12.13	Pengelolaan Media Publik	
	500.12.13.1	Media Cetak
	500.12.13.2	Media Online
	500.12.13.3	Media Luar Ruang dan Audio Visual
500.12.14	Kemitraan Komunikasi	
	500.12.14.1	Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara
	500.12.14.2	Kemitraan Media dan Dunia Usaha
	500.12.14.3	Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi
500.12.15	Infrastruktur Informatika	
	500.12.15.1	Jaringan
	500.12.15.2	Piranti Teknologi Informatika
	500.12.15.3	Keamanan Informatika
500.12.16	Sistem dan Data	
	500.12.16.1	Portal dan Konten
	500.12.16.2	Pengumpulan dan Pengolahan Data
	500.12.16.3	Pengembangan Aplikasi

Pemrakarsa	Sekda
	

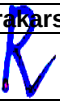
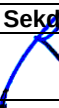
JENIS/SERIES ARSIP		
500.12.17	Pusat Kerjasama	
	500.12.17.1	Kerja Sama daerah
	500.12.17.2	Kerja Sama Bilateral
500.12.18	Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat	
	500.12.18.1	Pelayanan Informasi
	500.12.18.2	Hubungan Masyarakat
	500.12.18.3	Bimbingan Teknis
500.12.19	Evaluasi	
500.13	PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
500.13.1	Kebijakan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
500.13.2	Pengembangan Destinasi Wisata	
	500.13.2.1	Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata
	500.13.2.2	Pengembangan Daya Tarik Wisata
	500.13.2.3	Industri Pariwisata
	500.13.2.4	Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata
	500.13.2.5	Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event
500.13.3	Pemasaran Pariwisata	
	500.13.3.1	Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata
	500.13.3.2	Promosi Pariwisata Luar Negeri
	500.13.3.3	Promosi Pariwisata Dalam Negeri
	500.13.3.4	Pencitraan Indonesia
500.13.4	Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya	
	500.13.4.1	Pengembangan industri Perfilman
	500.13.4.2	Pengembangan Seni

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
		Pertunjukan dan Industri Musik
	500.13.4.3	Pengembangan Seni Rupa
500.13.5	Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK	
	500.13.5.1	Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media
	500.13.5.2	Desain dan Arsitektur
	500.13.5.3	Kerjasama dan Fasilitas
500.13.6	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
	500.13.6.1	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata
	500.13.6.2	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif
	500.13.6.3	Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
	500.13.6.4	Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
500.14 STATISTIK		
	500.14.1	Kebijakan di bidang Statistik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.14.2	Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi
	500.14.2.1	Perencanaan
	500.14.2.2	Persiapan (antara lain: Penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus, Penyusunan Kuesioner, Penyusunan konsep dan definisi, Penyusunan metodologi (cakupan, organisasi, lapangan, ukuran statistik, prosedur),

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
		Penyusunan buku pedoman (pencacahan, pengawasan, pengolahan), Penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah, Penyusunan pedoman sosialisasi, Sosialisasi kegiatan kepada stakeholder dan sumber data (leaflet, poster, pertemuan), Pelaksanaan pertemuan koordinasi (intern dan ekstern), Pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT), Pelaksanaan pelatihan petugas, Penyusunan program pengolahan (rule validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi), Pelatihan petugas pengolahan, Perancangan tabel, Pelaksanaan Ujicoba
	500.14.2.3	Pelaksanaan Lapangan
	500.14.2.4	Pengolahan (antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/pengiriman, pengelompokan/ Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi)
	500.14.2.5	Analisis dan Penyajian Hasil Sensus
	500.14.2.6	Diseminasi hasil sensus
500.14.3	Survei	

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
	500.14.3.1	Perencanaan
	500.14.3.2	Persiapan
	500.14.3.3	Pelaksanaan Lapangan (antara lain: Pelaksanaan listing, Pemilihan sampel, Pengumpulan data, Pemeriksaan, Pengawasan Lapangan, Monitoring kualitas)
	500.14.3.4	Pengolahan (antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/ pengiriman, pengelompokkan/ Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi)
	500.14.3.5	Analisis dan Penyajian Hasil Survei (antara lain: Pembahasan angka hasil pengolahan, Penyusunan angka sementara, Penyusunan angka tetap, Penyusunan/pembahasan draft publikasi, Analisis data, Penyusunan publikasi)
	500.14.3.6	Diseminasi hasil Survei
500.14.4	Konsolidasi Data Statistik	
	500.14.4.1	Kompilasi Data
	500.14.4.2	Analisis data
	500.14.4.3	Penyusunan Publikasi
500.14.5	Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei, dan Konsolidasi Data Statistik	

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
500.15 KETENAGAKERJAAN		
500.15.1	Kebijakan di bidang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
500.15.2	Perencanaan Tenaga Kerja	
	500.15.2.1	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah
	500.15.2.2	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta
500.15.3	Pengembangan Standarisasi Kompetensi	
	500.15.3.1	Penerapan Standar Kompetensi
	500.15.3.2	Pengembangan Standarisasi Kompetensi
	500.15.3.3	Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan
	500.15.3.4	Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan
	500.15.3.5	Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian
500.15.4	Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja	
	500.15.4.1	Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan
	500.15.4.2	Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan
	500.15.4.3	Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan
	500.15.4.4	Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga
500.15.5	Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan	
	500.15.5.1	Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah
	500.15.5.2	Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
	500.15.5.3	Tenaga Pelatihan
	500.15.5.4	Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan
500.15.6	Bina Pemagangan	
	500.15.6.1	Pemagangan Dalam Negeri
	500.15.6.2	Pemagangan Luar Negeri
	500.15.6.3	Perizinan dan Advokasi Pemagangan
	500.15.6.4	Promosi dan Jenjang Pemagangan
500.15.7	Produktivitas dan Kewirausahaan	
	500.15.7.1	Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan
	500.15.7.2	Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas
	500.15.7.3	Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas
	500.15.7.4	Pengembangan Kewirausahaan
500.15.8	Pengembangan Pasar Kerja	
	500.15.8.1	Informasi Pasar Kerja
	500.15.8.2	Analisis Pasar Kerja
	500.15.8.3	Bursa Kerja
	500.15.8.4	Analisis Jabatan
500.15.9	Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	
	500.15.9.1	Antar Kerja
	500.15.9.2	Penempatan Tenaga Kerja Khusus
	500.15.9.3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
	500.15.9.4	Pemberdayaan Pengantar Kerja
500.15.10	Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal	
	500.15.10.1	Tenaga Kerja Mandiri dan

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
		Sektoral Informal
	500.15.10.2	Pengembangan Padat Karya
	500.15.10.3	Terapan Teknologi Tepat Guna
	500.15.10.4	Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga
500.15.11	Standardisasi Profesi	
	500.15.11.1	Sistem Informasi dan Registrasi
	500.15.11.2	Pembakuan Akreditasi
500.15.12	Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi	
	500.15.12.1	Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama
	500.15.12.2	Perjanjian Kerja
	500.15.12.3	Kesejahteraan Pekerja
	500.15.12.4	Analisis Diskriminasi Syarat Kerja
500.15.13	Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial	
	500.15.13.1	Organisasi Pekerja dan Pengusaha
	500.15.13.2	Kelembagaan Hubungan Industrial
	500.15.13.3	Pemasyarakatan Hubungan Industrial
500.15.14	Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	
	500.15.14.1	Pengupahan
	500.15.14.2	Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja
500.15.15	Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial	
	500.15.15.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial

Pemrakarsa	Sekda
	

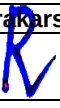
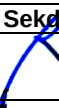
JENIS/SERIES ARSIP		
	500.15.15.2	Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
	500.15.15.3	Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
500.15.16	Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	
	500.15.16.1	Pengawasan Norma Kerja
	500.15.16.2	Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat
	500.15.16.3	Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja
500.15.17	Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak	
	500.15.17.1	Pengawasan Norma Kerja Perempuan
	500.15.17.2	Pengawasan Norma Kerja Anak
	500.15.17.3	Kerjasama Lintas Sektoral
	500.15.17.4	Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak
500.15.18	Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	
	500.15.18.1	Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan
	500.15.18.2	Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran
	500.15.18.3	Pengawasan Norma Kesehatan Kerja

Pemrakarsa	Sekda
	

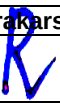
JENIS/SERIES ARSIP		
	500.15.18.4	Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya
	500.15.18.5	Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3
500.15.19	Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan	
500.15.20	Bina Penegakan Hukum	
	500.15.20.1	Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan
	500.15.20.2	Penyidikan Norma Ketenagakerjaan
	500.15.20.3	Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
	500.15.20.4	Kerjasama Penegakan Hukum
500.15.21	Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	
	500.15.21.1	Analisis dan Standardisasi bidang K 3
	500.15.21.2	Hasil kajian, perekayasaan dan penerapan teknologi dan alih teknologi K 3
	500.15.21.3	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K 3
	500.15.21.4	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3
500.15.22	Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	
	500.15.22.1	Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
	500.15.22.2	Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
	500.15.22.3	Kerjasama Tingkat Nasional

Pemrakarsa	Sekda
	

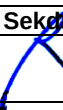
JENIS/SERIES ARSIP		
		Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
	500.15.22.4	Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
	500.15.22.5	Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
	500.15.22.6	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
500.16 PENANAMAN MODAL		
	500.16.1	Kebijakan di bidang Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.16.2	Perencanaan Penanaman Modal
	500.16.2.1	Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya
	500.16.2.2	Perencanaan Industri Manufaktur
	500.16.2.3	Perencanaan Jasa dan Kawasan
	500.16.2.4	Perencanaan Infrastruktur
	500.16.3	Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	500.16.3.1	Deregulasi Penanaman Modal
	500.16.3.2	Pengembangan Potensi Daerah
	500.16.3.3	Pemberdayaan Usaha
	500.16.3.4	Pemberdayaan Usaha Pembinaan dan Penyuluhan
	500.16.3.5	Pemberdayaan Usaha Kemitraan Usaha
	500.16.3.6	Pemberdayaan Usaha Pelayanan Usaha

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
500.16.4	Promosi Penanaman Modal	
	500.16.4.1	Pengembangan Promosi
	500.16.4.2	Analisis Strategi Promosi
	500.16.4.3	Fasilitasi Promosi Luar Negeri
	500.16.4.4	Promosi Sektoral
	500.16.4.5	Fasilitasi Promosi Daerah
	500.16.4.6	Pameran dan Sarana Promosi
500.16.5	Kerja Sama Penanaman Modal	
	500.16.5.1	Kerja Sama Bilateral dan Multilateral
	500.16.5.2	Kerja Sama Regional
	500.16.5.3	Kerja Sama Dunia Usaha Internasional
500.16.6	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
	500.16.6.1	Pemantauan Penanaman Modal
	500.16.6.2	Data Realisasi Penanaman Modal
	500.16.6.3	Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal
	500.16.6.4	Fasilitasi Penyelesaian Masalah
	500.16.6.5	Pengawasan Penanaman Modal
	500.16.6.6	Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal
500.16.7	Pelayanan Penanaman Modal	
	500.16.7.1	Pelayanan Aplikasi
	500.16.7.2	Pelayanan Perijinan
	500.16.7.3	Pelayanan Konsultasi Perijinan
	500.16.7.4	Pelayanan Non Perijinan
	500.16.7.5	Pelayanan Fasilitas
500.17 PERTANAHAN		
500.17.1	Kebijakan di bidang Pertanahan yang	

Pemrakarsa	Sekda
	

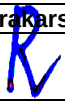
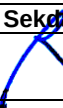
JENIS/SERIES ARSIP	
	dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.17.2	Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan
	500.17.2.1 Fasilitasi Pengadaan Tanah
	500.17.2.2 Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan
	500.17.2.3 Data dan Informasi Pertanahan
	500.17.2.4 Advokasi dan Pengendalian
500.17.3	Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah
	500.17.3.1 Penatagunaan Tanah
	500.17.3.2 Data dan Pemetaan Tematik
	500.17.3.3 Penguatan Atas Tanah
500.17.4	Sengketa Tanah
	500.17.4.1 Pengkajian dan Penanganan Sengketa
	500.17.4.2 Advokasi dan Pengendalian
500.18 TRANSMIGRASI	
500.18.1	Kebijakan di bidang Transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.18.2	Penyediaan Tanah Transmigrasi
	500.18.2.1 Fasilitasi Pengadaan Tanah
	500.18.2.2 Pengurusan Legalitas Tanah
	500.18.2.3 Dokumentasi Pertanahan
	500.18.2.4 Advokasi Pertanahan
500.18.3	Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi
	500.18.3.1 Penyiapan Lahan
	500.18.3.2 Penyiapan Sarana
	500.18.3.3 Penyiapan Prasarana
	500.18.3.4 Evaluasi Kelayakan Permukiman
500.18.4	Fasilitasi Penempatan Transmigrasi
	500.18.4.1 Penyiapan Calon Transmigrasi

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
	500.18.4.2	Penyiapan Perpindahan
	500.18.4.3	Pelaksanaan Perpindahan
	500.18.4.4	Penataan dan Adaptasi
500.18.5	Partisipasi Masyarakat	
	500.18.5.1	Promosi dan Motivasi
	500.18.5.2	Kerjasama Kelembagaan
	500.18.5.3	Kerjasama Antar Daerah
	500.18.5.4	Pelayanan Investasi
500.18.6	Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	
	500.18.6.1	Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan
	500.18.6.2	Bina Sistem Informasi
	500.18.6.3	Perencanaan Pengembangan Kawasan
	500.18.6.4	Perencanaan Pengembangan Masyarakat
	500.18.6.5	Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan
500.18.7	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat	
	500.18.7.1	Bantuan Pangan dan Kesehatan
	500.18.7.2	Fasilitas Sosial Budaya
	500.18.7.3	Pengembangan Kelembagaan
	500.18.7.4	Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi
500.18.8	Pengembangan Usaha	
	500.18.8.1	Kewirausahaan
	500.18.8.2	Produksi
	500.18.8.3	Pengolahan Hasil dan Pemasaran
	500.18.8.4	Lembaga Ekonomi dan

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
		permodalan
500.18.9	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan	
	500.18.9.1	Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana
	500.18.9.2	Pengembangan Sarana
	500.18.9.3	Pengembangan Prasarana
	500.18.9.4	Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana
500.18.10	Penyerasian Lingkungan	
	500.18.10.1	Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
	500.18.10.2	Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan
	500.18.10.3	Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi
	500.18.10.4	Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan
600	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN	
600.1	PEKERJAAN UMUM	
600.1.1	Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
600.1.2	Penatagunaan Sumber Daya Air	
	600.1.2.1	Perencanaan Wilayah Sungai
	600.1.2.2	Kelembagaan
	600.1.2.3	Pemanfaatan Sumber Daya Air
	600.1.2.4	Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air
	600.1.2.5	Pengaturan dan Pemantauan
600.1.3	Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air	
	600.1.3.1	Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air
	600.1.3.2	Manajemen Mutu

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
	600.1.3.3	Informasi dan Data Sumber Daya Air
	600.1.3.4	Keterpaduan Pemrograman
600.1.4	Pengelolaan Sumber Daya Air	
	600.1.4.1	Pengelolaan Sungai dan Pantai
	600.1.4.2	Pengelolaan Irigasi dan Rawa
	600.1.4.3	Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung
	600.1.4.4	Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku
600.1.5	Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	
	600.1.5.1	Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai
	600.1.5.2	Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa
	600.1.5.3	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung
	600.1.5.4	Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku
	600.1.5.5	Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo
600.1.6	Pengendalian Lumpur Sidoarjo (Bencana Lokal Lingkup Nasional)	
	600.1.6.1	Perencanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo
	600.1.6.2	Pemrograman Pengendalian Lumpur Sidoarjo
	600.1.6.3	Pelaksanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo
	600.1.6.4	Pengendalian Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan akibat Lumpur Sidoarjo
	600.1.6.5	Sistem Manajemen

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP	
	Keselamatan dan Kesehatan Kerja
600.1.7	Pengembangan Jaringan Jalan
	600.1.7.1 Keterpaduan Perencanaan
	600.1.7.2 Sistem Jaringan Jalan
	600.1.7.3 Lingkungan dan Keselamatan Jalan
600.1.8	Pembangunan Jalan
	600.1.8.1 Standar dan Pedoman
	600.1.8.2 Manajemen Konstruksi
	600.1.8.3 Pengelolaan Gedometrik, Perkerasan, dan Drainage
	600.1.8.4 Pengelolaan Geoteknik dan Manajemen Lereng
600.1.9	Preservasi Jalan
	600.1.9.1 Standar dan Pedoman
	600.1.9.2 Perencanaan Teknis
	600.1.9.3 Teknik Rekonstruksi
	600.1.9.4 Teknik Pemeliharaan Jalan
600.1.10	Pengelolaan Jembatan
	600.1.10.1 Standar dan Pedoman
	600.1.10.2 Perencanaan Teknis
	600.1.10.3 Teknik Jembatan
	600.1.10.4 Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus
600.1.11	Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah
	600.1.11.1 Bimbingan Teknik Jalan Daerah
	600.1.11.2 Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar
	600.1.11.3 Pembinaan Teknik Jalan Bebas Hambatan
600.1.12	Pengaturan Jalan Tol

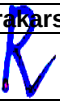
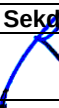
Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP						
	600.1.12.1	Persiapan pengusaha jalan tol				
	600.1.12.2	Pengadaan Investasi Jalan Tol				
	600.1.12.3	Teknik Pengaturan Jalan Tol				
	600.1.12.4	Pengambilalihan hak pengusaha jalan tol				
600.1.13	Keterpaduan Infrastruktur Permukiman					
	600.1.13.1	Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan				
	600.1.13.2	Keterpaduan Pembiayaan dan Pelaksanaan				
600.1.14	Pengembangan Kawasan Permukiman					
	600.1.14.1	Perencanaan Teknis				
	600.1.14.2	Kawasan Permukiman Perkotaan				
	600.1.14.3	Kawasan Permukiman Pedesaan				
	600.1.14.4	Kawasan Permukiman Khusus				
	600.1.14.5	Kelembagaan				
600.1.15	Pembinaan Penataan Bangunan					
	600.1.15.1	Perencanaan Teknis				
	600.1.15.2	Penataan Bangunan Gedung				
	600.1.15.3	Pengelolaan Rumah Negara				
	600.1.15.4	Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus				
	600.1.15.5	Kelembagaan				
600.1.16	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum					
	600.1.16.1	Perencanaan Teknis				
	600.1.16.2	Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan				
	600.1.16.3	Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan				
	600.1.16.4	Sistem Penyediaan Air Minum Khusus				
<table><tr><td>Pemrakarsa</td><td>Sekda</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>			Pemrakarsa	Sekda		
Pemrakarsa	Sekda					
						

JENIS/SERIES ARSIP		
	600.1.16.5	Kelembagaan
	600.1.16.6	Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
	600.1.16.7	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja
600.1.17	Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman	
	600.1.17.1	Perencanaan Teknis
	600.1.17.2	Pengelolaan Air Limbah
	600.1.17.3	Pengelolaan Persampahan
	600.1.17.4	Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus
	600.1.17.5	Kelembagaan
	600.1.17.6	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja
600.1.18	Pemantauan dan Evaluasi	
600.2	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
600.2.1	Kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
600.2.2	Perencanaan Pembiayaan Perumahan	
	600.2.2.1	Keterpaduan Perencanaan
	600.2.2.2	Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan
	600.2.2.3	Kemitraan
600.2.3	Pola Pembiayaan Perumahan	
	600.2.3.1	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Umum
	600.2.3.2	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan
	600.2.3.3	Pola Investasi Perumahan
600.2.4	Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan	

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
	600.2.4.1	Sumber Pembiayaan Primer
	600.2.4.2	Sumber Pembiayaan Sekunder
	600.2.4.3	Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya
	600.2.4.4	Sistem Pembiayaan Perumahan
	600.2.4.5	Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan
600.2.5	Perencanaan Penyediaan Perumahan	
	600.2.5.1	Keterpaduan Perencanaan
	600.2.5.2	Analisa Teknik
	600.2.5.3	Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian
	600.2.5.4	Kemitraan dan Kelembagaan
600.2.6	Penyediaan Rumah Susun	
	600.2.6.1	Perencanaan Teknik
	600.2.6.2	Penyediaan
	600.2.6.3	Penghunian, Pengalihan, dan Pemanfaatan
	600.2.6.4	Pengelolaan
600.2.7	Penyediaan Rumah Khusus	
	600.2.7.1	Perencanaan Teknik
	600.2.7.2	Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Tapak Khusus
	600.2.7.3	Bimbingan teknis dan supervisi
	600.2.7.4	Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya
	600.2.7.5	Perencanaan Teknik
	600.2.7.6	Fasilitas Backlog Rumah Swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni
	600.2.7.7	Pelaksanaan Bantuan Simultan

Pemrakarsa	Sekda
	

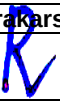
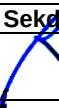
JENIS/SERIES ARSIP		
600.2.8	Penyediaan Rumah Umum dan Komersial	
	600.2.8.1	Perencanaan Teknik
	600.2.8.2	Pemberian Bantuan Rumah Umum
	600.2.8.3	Fasilitasi Hunian Berimbang
	600.2.8.4	Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan
600.2.9	Investasi Infrastruktur	
	600.2.9.1	Pelaksanaan Kebijakan Investasi Infrastruktur
	600.2.9.2	Sinkronisasi Investasi Infrastruktur
	600.2.9.3	Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur
	600.2.9.4	Pasar Infrastruktur
600.2.10	Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	
	600.2.10.1	Sistem Penyelenggaraan
	600.2.10.2	Kontrak Konstruksi
	600.2.10.3	Konstruksi Berkelanjutan
	600.2.10.4	Manajemen Mutu
600.2.11	Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi	
	600.2.11.1	Kelembagaan
	600.2.11.2	Material dan Peralatan Konstruksi
	600.2.11.3	Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri
	600.2.11.4	Usaha Jasa Konstruksi
600.2.12	Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	
	600.2.12.1	Standar dan Materi Kompetensi
	600.2.12.2	Penerapan Kompetensi
	600.2.12.3	Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi
	600.2.12.4	Pengembangan Produktivitas

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
600.2.13	Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	
	600.2.13.1	Peningkatan Kerjasama
	600.2.13.2	Pemberdayaan Jasa Konstruksi
600.2.14	Peningkatan Jasa Konstruksi	
	600.2.14.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja
	600.2.14.2	Pelaksanaan Pengendalian Mutu
600.2.15	Penerapan Teknologi Konstruksi	
	600.2.15.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kerjasama Penerapan Teknologi Konstruksi
	600.2.15.2	Pengembangan Materi
	600.2.15.3	Pendayagunaan Material dan Peralatan Konstruksi
600.2.16	Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Perumahan Rakyat (PUPR)	
	600.2.16.1	Antar Sektor
	600.2.16.2	Antar Wilayah
600.2.17	Pengembangan Kawasan Strategis	
	600.2.17.1	Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis
	600.2.17.2	Pengembangan Infrastruktur Antarkawasan Strategis
600.2.18	Pengembangan Kawasan Perkotaan	
	600.2.18.1	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan
	600.2.18.2	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Besar dan Kota Baru
	600.2.18.3	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Kecil dan

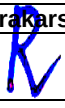
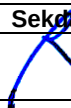
Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
		Pedesaan
	600.2.18.4	Analisa Manfaat dan Skema Pembiayaan
	600.2.18.5	Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan Rakyat (PUPR)
	600.2.19	Pemantauan dan Evaluasi
600.3	TATA RUANG (TATA KOTA)	
	600.3.1	Kebijakan di bidang Tata Ruang yang dilakukan Pemerintahan Daerah
	600.3.2	Perencanaan
	600.3.2.1	Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RT/RW)
	600.3.2.2	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
	600.3.2.3	Rencana Tata Ruang Strategis Kabupaten
	600.3.2.4	Rencana Tata Bangun Lingkungan (RTBL)
	600.3.2.5	Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Kabupaten
	600.3.2.6	Rencana Teknis Prasarana Kota
	600.3.2.7	Rencana Tekni Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kotas Prasarana Kota
	600.3.3	Pemanfaatan dan Pengendalian
	600.3.3.1	Evaluasi dan Pengawasan Penata Ruang
	600.3.3.2	Ijin Pemanfaatan Ruang
	600.3.3.3	Pembatalan Ijin Pemanfaatan Ruang

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
600.3.4	Pemetaan	
	600.3.4.1	Peta Dasar
	600.3.4.2	Survey Pemetaan Ruang Darat
	600.3.4.3	Survey Pemetaan Ruang Air
	600.3.4.4	Survey Pemetaan Ruang Udara
600.4	LINGKUNGAN HIDUP	
600.4.1	Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
600.4.2	Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	
	600.4.2.1	Inventarisasi, Penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan
	600.4.2.2	Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam
600.4.3	Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor	
	600.4.3.1	Evaluasi Penerapan
	600.4.3.2	Perencanaan Lingkungan Hidup
600.4.4	Ekonomi Lingkungan	
600.4.5	Dampak Lingkungan	
	600.4.5.1	Bimtek Dampak Lingkungan
	600.4.5.2	Penerapan sistem kebijakan Dampak lingkungan
	600.4.5.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut
600.4.6	Pemantauan dan Pengawasan	
	600.4.6.1	Manufaktur Prasarana dan Jasa
	600.4.6.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
	600.4.6.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil
Pemrakarsa	Sekda	
		

JENIS/SERIES ARSIP		
	600.4.6.4	Udara Sumber Bergerak
600.4.7	Evaluasi dan Pengembangan	
	600.4.7.1	Manufaktur, Prasarana dan Jasa
	600.4.7.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
	600.4.7.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil
	600.4.7.4	Udara Sumber Bergerak
600.4.8	Keanekaragaman Hayati dan pengendalian Kerusakan Lahan	
	600.4.8.1	Pengembangan
	600.4.8.2	Pemanfaatan
	600.4.8.3	Pengelolaan Sumber Daya Genetik
	600.4.8.4	Keamanan Hayati
	600.4.8.5	Pengendalian kerusakan Lahan
600.4.9	Kerusakan Ekosistem Perairan Darat	
	600.4.9.1	Kerusakan Ekosistem
	600.4.9.2	Rawa
600.4.10	Mitigasi dan pelestarian Fungsi Atmosfer	
	600.4.10.1	Perangkat mitigasi
	600.4.10.2	Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca
	600.4.10.3	Pengendalian Bahan Perusak Ozon
	600.4.10.4	Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan
600.4.11	Adaptasi Perubahan Iklim	
	600.4.11.1	Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim (antara lain: Pengembangan perangkat

Pemrakarsa	Sekda
	

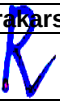
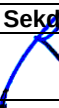
JENIS/SERIES ARSIP		
		Adaptasi Perubahan Iklim, Pemantauan dan Evaluasi Adaptasi Perusahaan Iklim)
	600.4.11.2	Kerentanan Perubahan Iklim
600.4.12	Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun	
	600.4.12.1	Registrasi dan Notifikasi
	600.4.12.2	Pemantauan Bahan Berbahaya dan Beracun
	600.4.12.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut
600.4.13	Verifikasi Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan beracun	
	600.4.13.1	Pengumpulan dan pemanfaatan
	600.4.13.2	Pengangkutan dan Pengolahan
	600.4.13.3	Penimbunan dan Dumping
	600.4.13.4	Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas batas
600.4.14	Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3	
	600.4.14.1	Pemantauan
	600.4.14.2	Tanggap darurat dan pemelihan Kontaminasi
600.4.15	Pengelolaan Sampah	
	600.4.15.1	Pembatasan sampah
	600.4.15.2	Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah
	600.4.15.3	Pembentukan Dewan Adipura
	600.4.15.4	Penetapan pemenang adipura
600.4.16	Hukum Administrasi Lingkungan	
	600.4.16.1	Pengelolaan dan pengembangan pengaduan
	600.4.16.2	Penataan hukum administrasi lingkungan
600.4.17	Penyelesaian Sengketa Lingkungan	

Pemrakarsa	Sekda
	

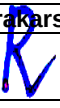
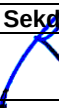
JENIS/SERIES ARSIP		
	600.4.17.1	Penyelesaian sengketa Melalui Pengadilan
	600.4.17.2	Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan
600.4.18	Penegakan hukum pidana lingkungan	
	600.4.18.1	Penyidikan
	600.4.18.2	Koordinasi penuntutan, evaluasi, dan tindak lanjut
	600.4.18.3	Koordinasi pembinaan penyidik PNS
600.4.19	Komunikasi Lingkungan	
	600.4.19.1	Pengembangan Komunikasi
	600.4.19.2	Publikasi dan Kampanye
600.4.20	Penguatan Inisiatif Masyarakat	
	600.4.20.1	Komunitas Pendidikan Lingkungan
	600.4.20.2	Kearifan Lingkungan
600.4.21	Peningkatan Peran Masyarakat	
	600.4.21.1	Masyarakat Perkotaan
	600.4.21.2	Masyarakat Pedesaan
600.4.22	Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan	
	600.4.22.1	Organisasi Sosial Masyarakat
	600.4.22.2	Organisasi Profesi Dunia Usaha
600.4.23	Data dan Informasi Lingkungan	
	600.4.23.1	Pengelolaan Data
	600.4.23.2	Pengelolaan Informasi
	600.4.23.3	Pengembangan Perangkat Lunak
	600.4.23.4	Pengembangan Sistem dan Layanan Jaringan
600.4.24	Kelembagaan Lingkungan	
	600.4.24.1	Kelembagaan dan Tata

Pemrakarsa	Sekda
	

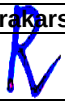
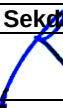
JENIS/SERIES ARSIP		
		Laksana
	600.4.24.2	Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal
600.4.25	Standarisasi dan teknologi	
	600.4.25.1	Standarisasi Manajemen dan dan Pengujian Lingkungan
	600.4.25.2	Standarisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan
	600.4.25.3	Teknologi Ramah Lingkungan
600.4.26	Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan	
	600.4.26.1	Pemantauan dan Kajian Kualitas Llingkungan
	600.4.26.2	Laboratorium Rujukan dan Pengujian
700	PENGAWASAN	
	700.1	PENGAWASAN INTERNAL
	700.1.1	Rencana Pengawasan
	700.1.1.1	Rencana Strategis Pengawasan
	700.1.1.2	Rencana Kerja Pengawas Tahunan
	700.1.1.3	Rencana Kinerja Tahunan
	700.1.1.4	Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan
	700.1.1.5	Rakor Pengawasan Tingkat Daerah
	700.1.2	Pelaksanaan Pengawasan
	700.1.2.1	Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
		Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut (TL)
700.1.2.2		Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut
700.1.2.3		Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut
700.1.2.4		Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat
700.1.2.5		Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan
700.1.2.6		Laporan Perkembangan Barang Milik Negara
700.1.2.7		Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
700.1.2.8		Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review
700.1.2.9		Good Corporate Governance (GCG)
800	KEPEGAWAIAN	
800.1	SUMBER DAYA MANUSIA	
800.1.1		Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
800.1.1.1		Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (antara lain: Bahan penyusunan

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
		rencana kebutuhan, Analisis Kebutuhan, Pengolahan Data Kebutuhan)
	800.1.1.2	Perencanaan Pertimbangan Formasi (antara lain: Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN, Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas)
	800.1.1.3	Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
	800.1.1.4	Standarisasi Jabatan (antara lain: Informasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Klasifikasi Jabatan)
800.1.2	Formasi dan Pengadaan Pegawai	
	800.1.2.1	Formasi ASN (antara lain: Usulan formasi, Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN , Persetujuan Formasi, Penetapan Formasi, Penetapan Formasi Khusus)
	800.1.2.2	Proses Rekrutmen/Pengadaan ASN (antara lain: Proses Rekrutmen ASN, Penetapan Pengumuman Kelulusan ASN)
	800.1.2.3	Pengumuman Kelulusan ASN
	800.1.2.4	Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima
	800.1.2.5	Pengangkatan ASN
	800.1.2.6	Open Biding (Seleksi Terbuka Jabatan)

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
	800.1.2.7	Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN
	800.1.2.8	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN
800.1.3	Mutasi Pegawai	
	800.1.3.1	Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN
	800.1.3.2	Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan
	800.1.3.3	Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural/Fungsional
	800.1.3.4	Perubahan Data Dasar/ Status/Kedudukan Hukum Pegawai
	800.1.3.5	Peninjauan Masa Kerja
	800.1.3.6	Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT)
800.1.4	Pengembangan Karir	
	800.1.4.1	Usulan Tugas Belajar/ Ijin Belajar/ Diklat/ Kursus/ Magang/ Ujian Dinas/ Praktek Kerja di Instansi lain/ Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta
	800.1.4.2	Penyesuaian ijazah

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
	800.1.4.3	Penyusunan Sistem Karier
	800.1.4.4	Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja
	800.1.4.5	Angka Kredit (antara lain: Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit, Penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit)
800.1.5	Kinerja Aparatur Sipil Negara	
	800.1.5.1	Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja
	800.1.5.2	Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja
	800.1.5.3	Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja
800.1.6	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN	
	800.1.6.1	Kode Etik Pegawai
	800.1.6.2	Disiplin
	800.1.6.3	Pemberhentian Dengan Hormat
	800.1.6.4	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
	800.1.6.5	Pemberhentian Sementara
	800.1.6.6	Pensiun ASN (antara lain: Administrasi Pensiun ASN, Penetapan Pensiun ASN, Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun ASN, Pensiun Pejabat Negara dan Jada/Dudanya)
800.1.7	Bantuan Hukum	

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
800.1.8	Status dan Kedudukan Pegawai	
	800.1.8.1	Status Kepegawaian
	800.1.8.2	Kedudukan Kepegawaian
	800.1.8.3	Keberatan Pegawai
	800.1.8.4	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian
800.1.9	Sistem Informasi Kepegawaian	
	800.1.9.1	Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian
	800.1.9.2	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
	800.1.9.3	Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektronik
	800.1.9.4	Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik
800.1.10	Pengawasan dan pengendalian	
	800.1.10.1	Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat
	800.1.10.2	Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan
	800.1.10.3	Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja
	800.1.10.4	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN
	800.1.10.5	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian
	800.1.10.6	Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer
800.1.11	Administrasi Pegawai	
	800.1.11.1	Surat Perintah Dinas/Surat Tugas

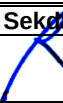
Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
	800.1.11.2	Cuti Sakit
	800.1.11.3	Cuti Bersalin
	800.1.11.4	Cuti Tahunan
	800.1.11.5	Cuti Alasan Penting
	800.1.11.6	Cuti Besar
	800.1.11.7	Cuti Di luar Tanggungan Negara
	800.1.11.8	Karpeg/KPE/Karis/Karsu
	800.1.11.9	Keanggotaan Organisasi Profesi/ Kedinasan
	800.1.11.10	Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)
	800.1.11.11	Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)
	800.1.11.12	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
	800.1.11.13	Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/ tunjangan
800.1.12	Kesejahteraan Pegawai	
	800.1.12.1	Pemeliharaan Kesehatan Pegawai
	800.1.12.2	Asuransi Pegawai/BPJS
	800.1.12.3	Tabungan Perumahan
	800.1.12.4	Bantuan Sosial
	800.1.12.5	Pakaian Dinas
	800.1.12.6	Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas
	800.1.12.7	Pemberian Tali Kasih
	800.1.12.8	Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa
	800.1.12.9	Olahraga dan Rekreasi
	800.1.12.10	Rekam Medis

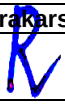
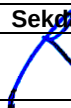
Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
800.1.13	Administrasi Perseorangan	
	800.1.13.1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)
	800.1.13.2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
	800.1.13.3	Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang disetarakan
	800.1.13.4	Sekretaris Daerah
	800.1.13.5	ASN berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional
800.1.14	Penilaian Kompetensi	
	800.1.14.1	Penilaian Kompetensi
	800.1.14.2	Hasil Penilaian Kompetensi
800.2	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
800.2.1	Kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah	
800.2.2	Pendidikan dan Pelatihan	
	800.2.2.1	Sistem Informasi program dan pembinaan diklat
	800.2.2.2	Pedoman-pedoman kediklatan
	800.2.2.3	Kurikulum-kurikulum diklat
	800.2.2.4	Modul-modul diklat
	800.2.2.5	Panduan fasilitator
	800.2.2.6	Saran/rekomendasi penyelenggaraan diklat
	800.2.2.7	Notulen sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat
	800.2.2.8	Monitoring dan evaluasi program dan pembinaan diklat
	800.2.2.9	Konsultasi, advokasi, asistensi diklat
800.2.3	Widyaiswara	
	800.2.3.1	Seleksi dan pengembangan Widyaiswara
Pemrakarsa	Sekda	
		

JENIS/SERIES ARSIP		
	800.2.3.2	Sertifikasi Widyaiswara
	800.2.3.3	Monitoring dan evaluasi Widyaiswara
	800.2.3.4	Penilaian Widyaiswara
	800.2.3.5	Konsultasi, advokasi dan asistensi Widyaiswara
	800.2.3.6	Sistem Informasi Pembinaan Widyaiswara
800.2.4	Penyelenggaraan Diklat	
	800.2.4.1	Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan Penyelenggaraan Diklat
	800.2.4.2	Penyelenggaraan Penyelenggaraan Diklat
	800.2.4.3	Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat
	800.2.4.4	Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran
	800.2.4.5	Sistem informasi diklat
	800.2.4.6	Monitoring Penyelenggara Diklat
	800.2.4.7	Monitoring dan evaluasi Pasca diklat
800.2.5	Alumni	
900	KEUANGAN	
	900.1	KEUANGAN DAERAH
	900.1.1	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan(APBD-P)
	900.1.1.1	Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)
	900.1.1.2	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
Perangkat Daerah (RKASKPD)		
	900.1.1.3	Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
	900.1.1.4	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)
900.1.2	Penyusunan Anggaran	
	900.1.2.1	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan
	900.1.2.2	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota
	900.1.2.3	Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah
	900.1.2.4	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
900.1.3	Pelaksanaan Anggaran	
	900.1.3.1	Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS
	900.1.3.2	Pendapatan
	900.1.3.3	Belanja
	900.1.3.4	Pembiayaan Daerah
	900.1.3.5	Dokumen Penatausahaan Keuangan

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
	900.1.3.6	Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
	900.1.3.7	Daftar Gaji
	900.1.3.8	Kartu Gaji
	900.1.3.9	Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)
	900.1.3.10	Laporan Keuangan
900.1.4	Pinjaman/Hibah Luar Negeri	
	900.1.4.1	Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Blue Book)
	900.1.4.2	Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book)
	900.1.4.3	Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan dokumen sejenisnya
	900.1.4.4	Dokumen Loan Agreemeent (PHLN) (antara lain: Draft Agreement, Legal Opinion, Surat Menyurat dengan Lender)
	900.1.4.5	Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri (antara lain: usulan luncuran dana)
	900.1.4.6	Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya
	900.1.4.7	Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice)
	900.1.4.8	Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri (antara lain: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya, a.l. : SPP,

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
		Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya.)
	900.1.4.9	Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) antara lain : No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA)
	900.1.4.10	Staff Appraisal Report
	900.1.4.11	Report /Laporan
	900.1.4.12	Laporan Hutang Daerah
	900.1.4.13	<i>Completion Report/Annual Report</i>
	900.1.4.14	Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri
900.1.5	Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)	
900.1.6	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)	
	900.1.6.1	Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
	900.1.6.2	Dokumen Kebijakan Akuntansi
	900.1.6.3	Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi
	900.1.6.4	Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulanan/Semesteran
900.1.7	Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan	
	900.1.7.1	Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
		Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Specimen Tanda Tangan
900.1.7.2		Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya :(antara lain: SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, bilyet giro, SPM Nihil, Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnya a.l. : Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank, Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan)
900.1.7.3		Buku Rekening Bank
900.1.7.4		Keputusan Pembukuan Rekening
900.1.7.5		Pembukuan anggaran terdiri :(antara lain: Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan, Daftar Pembukuan Pencairan/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP), dan Rekening Koran)
900.1.8		Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan
900.1.8.1		Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
	900.1.8.2	Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan
900.1.9	Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu Dari APBD (antara lain: Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu, Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu, Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Kota, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas, Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu, Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota, Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada, Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD)	
900.1.10	Pelaksanaan Anggaran PILKADA dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu	
	900.1.10.1	Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
		Pemilu
	900.1.10.2	Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu
	900.1.10.3	Berkas setor sisa dana Pilkada/Pemilu termasuk setor komisi pengadaan barang/jasa, rabat, bunga, jasa giro Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank
	900.1.10.4	Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya
900.1.11	Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah	
	900.1.11.1	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan
	900.1.11.2	Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal
	900.1.11.3	Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional
	900.1.11.4	Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah
900.1.12	Anggaran Daerah	
	900.1.12.1	Anggaran Daerah
	900.1.12.2	Dukungan Teknis Anggaran Daerah

Pemrakarsa	Sekda
	

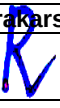
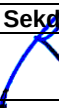
JENIS/SERIES ARSIP		
900.1.13	Pendapatan dan Investasi Daerah	
	900.1.13.1	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (antara lain: Fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah)
	900.1.13.2	Badan Usaha Milik Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan, Fasilitas serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga non keuangan, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah)
	900.1.13.3	Badan Layanan Umum Daerah (antara lain: Analisis, standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP	
	keuangan badan layanan umum daerah, Pembinaan pelaksanaan kebijakan, standardisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan keuangan badan layanan umum daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah)
900.1.13.4	Pengelolaan Kekayaan Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan , Fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi daerah)
900.1.13.5	Pinjam Dan Obligasi Daerah (antara lain: Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN, Bimbingan teknis obligasi

Pemrakarsa	Sekda
	

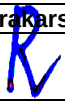
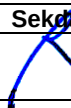
JENIS/SERIES ARSIP		
		daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah)
900.1.14	Fasilitasi Dana Perimbangan	
	900.1.14.1	Fasilitasi Dana Alokasi Umum (antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum)
	900.1.14.2	Fasilitasi Dana Alokasi Khusus (antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar. Sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus, Penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus)
	900.1.14.3	Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam (antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
		evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam)
900.1.14.4		Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya (antara lain: Sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus, Sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya)
900.1.14.5		Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan (antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan, Penyiapan dukungan teknis dana perimbangan, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan)
900.1.15	Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	
900.1.15.1		Akuntansi Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah)
900.1.15.2		Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		
		Keuangan Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah)
	900.1.15.3	Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah)
	900.1.15.4	Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli (antara lain: penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah)

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP	
900.1.15.5	Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah (antara lain: penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah)

BUPATI BULUNGAN

ttd

SYARWANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUROSU, SE
Pembina Tingkat I / IVB
NIP. 19700310 199303 1 008

Pemrakarsa	Sekda
	

B. SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMAMAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
000 UMUM						
000.1 KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN						
000.1.1	Telekomunikasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.1.2	Perjalanan Dinas Dalam Negeri					
000.1.2.1	Perjalanan Dinas Kepala Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.1.2.2	Perjalanan Dinas DPRD	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.1.2.3	Perjalanan Dinas Pegawai	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					eksternal	siapapun.	
000.1.3	Perjalanan Dinas Luar Negeri						
000.1.3.1	Perjalanan Dinas Kepala Daerah		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.1.3.2	Perjalanan Dinas DPRD		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.1.3.3	Perjalanan Dinas Pegawai		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.1.4	Penggunaan Fasilitas Kantor (antara lain: Permintaan dan Penggunaan Ruang Rapat, Gedung, Kendaraan, Wisma, Rumah Dinas dan Fasilitas Kantor Lainnya)		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
000.1.5	Rapat pimpinan (antara lain: Notula/Risalah Rapat)		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.1.6	Penyediaan Konsumsi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.1.7	Pengurusan Kendaraan Dinas						
	000.1.7.1	Pengurusan surat- surat kendaraan dinas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.1.7.2	Pemeliharaan dan perbaikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.1.7.3	Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				eksternal	siapapun.	
000.1.8	Pemeliharaan Gedung, Taman dan Peralatan Kantor					
000.1.8.1	Pertamanan/ Landscape	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.1.8.2	Penghijauan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.1.8.3	Perbaikan Gedung	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.1.8.4	Perbaikan Peralatan Kantor	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				eksternal	siapapun.	
000.1.8.5	Perbaikan Rumah Dinas/ Wisma	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.1.8.6	Kebersihan Gedung dan Taman	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.1.9	Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Komputer					
000.1.9.1	Perbaikan / Pemeliharaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.1.9.2	Pemasangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					eksternal	siapapun.	
000.1.10	Ketertiban dan Keamanan						
000.1.10.1	Pengamanan, Penjagaan, dan Pengawasan terhadap Pejabat, Kantor dan Rumah Dinas		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.1.10.2	Laporan Ketertiban dan Keamanan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.1.11	Administrasi Pengelolaan Parkir		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.1.12	Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan dan Pegawai lainnya		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					eksternal	siapapun.	
000.2 PERLENGKAPAN							
000.2.1	Inventarisasi dan Penyimpanan						
000.2.1.1	Data hasil inventarisasi dan penyimpanan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.2.1.2	Laporan dan evaluasi inventarisasi dan penyimpanan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.2.2	Pemeliharaan peralatan kantor						
000.2.2.1	Data hasil pemeliharaan kantor		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.2.2.2	Laporan dan evaluasi		Biasa	Terbuka	Pengguna	Apabila diketahui	Unit pengolah

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
pemeliharaan kantor					internal dan eksternal	oleh publik tidak merugikan siapapun.	terkait
000.2.3	Distribusi						
	000.2.3.1	Barang habis pakai	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.2.3.2	Barang milik daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.2.4	Penghapusan Barang Milik Daerah (antara lain: Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah, Daftar Barang yang dihapuskan, Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMD termasuk didalamnya proses lelang penghapusan)		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
000.2.5	Pengelolaan Database Barang Milik Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.3 PENGADAAN						
000.3.1	Rencana Pengadaan Barang dan Jasa (antara lain: Identifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran pengadaan, penetapan kebijakan umum, penyusunan kerangka Acuan Kerja (KAK), Pengumuman Rencana Umum Pengadaan)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.3.2	Pengadaan Langsung (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
000.3.3	Pengadaan Tidak Langsung/Lelang (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.3.4	Swakelola (antara lain: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.3.5	Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan (antara lain: Data base pengguna sistem informasi pengadaan barang/jasa, Data Base kontrak, Data Base Pengadaan Barang/jasa)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.3.6	Monitoring dan Evaluasi (antara lain: Laporan Hasil Monitoring, Laporan hasil evaluasi)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
000.4 PERPUSTAKAAN							
000.4.1	Kebijakan di bidang Perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
000.4.2	Deposit Bahan Pustaka		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.4.2.1	Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.4.2.2	Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman		Biasa	Terbuka	Penentu kebijakan, pengawas internal dan	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				eksternal serta penegak hukum	terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
000.4.2.3	Terbitan Internasional dan Regional	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.4.2.4	Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.4.2.5	Bibliografi dan Katalog	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.4.3	Koleksi Pustaka					

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
000.4.3.1	Pembelian	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.4.3.2	Hibah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.4.3.3	Hadiah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.4.3.4	Tukar Menukar	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.4.3.5	Implementasi Undang- Undang KCKR	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
000.4.3.6	Terbitan Internal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.4.3.7	Pendistribusian bahan pustaka surplus	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.4.3.8	Inventarisasi koleksi (Buku Induk)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.4.4	Pengolahan Bahan Pustaka	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.4.5	Pangkalan Data Katalog Koleksi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
000.4.6	Layanan Perpustakaan						
	000.4.6.1	Keanggotaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.6.2	Peminjaman	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.6.3	Pengembangan gemar baca	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.4.7	Kerjasama Perpustakaan						
	000.4.7.1	MoU	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				serta penegak hukum	pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
000.4.7.2	Perjanjian kerjasama	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
000.4.7.3	Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
000.4.8	Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan						
	000.4.8.1	Pengembangan situs web	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.8.2	Pengembangan kemas ulang informasi multimedia	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.8.3	Pengembangan program aplikasi perpustakaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.8.4	Pengembangan pangkalan data kepustakaan digital	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
000.4.9	Pangkalan Data Layanan Perpustakaan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.4.10	Konservasi						
000.4.10.1	Perawatan Bahan	Perpustakaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.4.10.2	Perbaikan Bahan	Perpustakaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.4.10.3	Penjilidan Bahan	Perpustakaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.4.11	Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				eksternal	siapapun.	
000.4.12	Transformasi Digital	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.4.13	Kurasi Digital	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.4.14	Pengembangan Perpustakaan					
	000.4.14.1 Perpustakaan Umum	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.4.14.2 Perpustakaan Khusus	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
000.4.14.3	Perpustakaan Sekolah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.4.14.4	Perpustakaan Perguruan Tinggi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.5 KEARSIPAN						
000.5.1	Kebijakan di bidang kearsipan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
000.5.2	Pembinaan Kearsipan						
000.5.2.1	Pengembangan Profesi Arsiparis (antara lain: Formasi Jabatan Arsiparis, Analisis Kebutuhan Arsiparis)		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapaapun	Unit pengolah terkait
000.5.2.2	Bimbingan Konsultasi Arsiparis		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapaapun	Unit pengolah terkait
000.5.2.3	Penilaian Arsiparis		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapaapun.	Unit pengolah terkait
000.5.2.4	Pemilihan Arsiparis Teladan (antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan, Berkas		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapaapun	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	Penetapan Arsiparis Teladan)					
000.5.2.5	Data Base Arsiparis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.5.2.6	Bimbingan Konsultasi Kearsipan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.5.2.7	Supervisi dan Evaluasi (antara lain: Perencanaan Supervisi dan Evaluasi, Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi, Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
000.5.2.8	Data Base Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.5.2.9	Fasilitasi Kearsipan (antara lain: Fasilitasi SDM Kearsipan, Fasilitasi Prasarana dan Sarana Kearsipan)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.5.2.10	Lembaga/Unit Kearsipan Teladan (antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan, Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
000.5.2.11	Jadwal Retensi Arsip (antara lain: Berkas Usulan Persetujuan JRA, Surat Persetujuan JRA dari Kepala ANRI)		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.5.3	Pengelolaan Arsip Dinamis						
000.5.3.1	Penciptaan (antara lain: Buku Registrasi Naskah Masuk dan Keluar, Buku Agenda, Kartu Kendali, Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi)		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.5.3.2	Pemberkasan Arsip Aktif (antara lain: Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas)		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMAMAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
000.5.3.3	Penataan Arsip Inaktif (antara lain: Daftar Arsip Inaktif, Daftar Arsip Inaktif Tematik)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.5.3.4	Penggunaan (antara lain: Daftar Arsip Dinamis Berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Bukti Pemimjaman Arsip)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.5.3.5	Autentikasi Arsip Dinamis (antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Dinamis)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
000.5.4	Program Arsip Vital (antara lain: Identifikasi Arsip Vital, Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital, Penyelamatan Arsip Vital, dan Pemulihan Arsip Vital)		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.5.5	Pengelolaan Arsip Terjaga (antara lain: Daftar Identifikasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga, Surat Penetapan Autentikasi Arsip Terjaga, Surat Penyerahan Arsip Terjaga, Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga, Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga)		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.5.6	Penyusutan Arsip						
	000.5.6.1	Pemindahan Arsip (antara lain: Berita Acara Pemindahan, Daftar Arsip yang dipindahkan)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMAMAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
000.5.6.2	Pemusnahan Arsip (antara lain: SK Penetapan Panitia Penilai Arsip, Pertimbangan Panitia Penilai, Permintaan Persetujuan Kepala ANRI untuk pemusnahan arsip dengan retensi sekurang-kurangnya 10 Tahun atau Persetujuan Kepala Daerah selaku Pimpinan Pencipta Arsip untuk pemusnahan arsip dengan retensi di bawah 10 Tahun, Penetapan Arsip Yang	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	Dimusnahkan, Berita Acara Pemusnahan Arsip, Daftar arsip Yang Dimusnahkan)					
000.5.6.3	Penyerahan Arsip Statis (antara lain: Pembentukan panitia penilai, Notulen rapat panitia, Surat pertimbangan panitia penilai, Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan, Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan digunakan dari pencipta arsip, Keputusan Penetapan Penyerahan, Berita	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang diserahkan)					
000.5.7		Alih Media Arsip (antara lain: Kebijakan alih media, Autentikasi, Berita Acara, Daftar Arsip yang alih mediakan)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.5.8		Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.5.8.1	Data Base Pengelolaan Arsip Aktif	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.5.8.2	Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
000.5.9	Pengelolaan Arsip Statis						
000.5.9.1	Akuisisi (antara lain: Monitoring fisik dan daftar, Verifikasi terhadap daftar arsip , Menetapkan status arsip statis, Persetujuan untuk Penyerahan, Penetapan arsip yang diserahkan Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar arsip yang diserahkan)		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.5.9.2	Penghargaan dan Imbalan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
000.5.9.3	Sejarah Lisan (antara lain: Administrasi kegiatan, Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan, Laporan Kegiatan, Hasil Wawancara (Kaset/CD/media lain sesuai perkembangan TI) dan Transkrip)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
000.5.9.4	Daftar Pencarian Arsip Statis (antara lain: pengumuman, akuisisi daftar pencarian arsip statis)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
000.5.9.5	Menyusun Sarana Bantu Temu Balik (antara lain: daftar arsip statis, inventaris arsip statis, guide	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
000.5.9.6	Preservasi Preventif (antara lain: penyimpanan, pengendalian hama terpadu, reproduksi (alih media)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.5.9.7	Preservasi Kuratif	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.5.9.8	Autentikasi Arsip Statis (antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Statis)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.5.9.9	Akses Arsip Statis (antara lain: Layanan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal	Apabila diketahui oleh publik tidak	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	arsip, Penerbitan naskah sumber)			dan eksternal	merugikan siapapun.	
000.5.10	Jasa Kearsipan (antara lain konsultasi kearsipan, manual kearsipan, penataan arsip, otomasi kearsipan, penyimpanan arsip, perawatan dan pemeliharaan arsip)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.5.11	Pengelolaan SIKN dan JIKN	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.5.12	Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.5.13	Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
000.5.14	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.5.15	Pengawasan Kearsipan						
000.5.15.1	Pengawasan Kearsipan Internal		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.5.15.2	Pengawasan Kearsipan Eksternal		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.5.15.3	Sanksi		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					serta penegak hukum	pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
000.6 PERSANDIAN							
000.6.1	Kebijakan di bidang Persandian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.6.2	Pengamanan persandian						
000.6.2.1	Pengamanan sinyal: teknik sandi dan kripto		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				hukum	lembaga pemerintahan.	
000.6.2.2	Analisis sinyal: teknik sandi dan kriptografi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
000.6.2.3	Materiil sandi: sistem dan peralatan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					eksternal serta penegak hukum	terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
000.6.3	Pengkajian persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi						
	000.6.3.1	Perencanaan Pengkajian	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.6.3.2	Administrasi Pengkajian	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.6.3.3	Pelaksanaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
000.6.3.4	Pelaporan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.6.4	Pembinaan dan Pengendalian Persandian						
000.6.4.1	Sumber Daya Manusia (SDM)		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.6.4.2	Jaring Komunikasi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.6.5	Layanan Sertifikasi Elektronik						
000.6.5.1	Perencanaan dan Administrasi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
000.6.5.2	Pelaksanaan Verifikasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.6.5.3	Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.6.5.4	Penyesuaian Sistem dan Testing	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.6.5.5	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
000.6.5.6	Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
000.6.5.7	Pelaporan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.7 PERENCANAAN PEMBANGUNAN						
000.7.1	Musyawah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang					

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
000.7.1.1	Musrenbang Provinsi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.7.1.2	Musrenbang Nasional	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.7.1.3	Musrenbang Kab/Kota	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.7.1.4	Musrenbang Kecamatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.7.1.5	Musrenbang Kelurahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
000.7.1.6	Musrenbang Desa	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.7.2	Perencanaan Pembangunan Daerah					
000.7.2.1	Rencana Pembangunan Jangka Panjang	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.7.2.2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.7.2.3	Rencana Anggaran Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.7.2.4	Rencana Pembangunan Tahunan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				eksternal	siapapun.	
000.7.2.5	Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.7.2.6	Program kerja tahunan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.7.2.7	Penetapan / Kontrak Kinerja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.7.2.8	Laporan Berkala	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.7.2.9	Laporan Insidental	Biasa	Terbuka	Pengguna	Apabila diketahui	Unit pengolah

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				internal dan eksternal	oleh publik tidak merugikan siapapun.	terkait
000.7.2.10	Evaluasi Program	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.7.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.7.4	Konsultasi Perencanaan Pembangunan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.7.5	Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.7.6	Aksi Strategis Daerah					

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
000.7.6.1	Rancangan awal perencanaan aksi strategi daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.7.6.2	Rapat pembahasan rancangan awal dengan Perangkat Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.7.6.3	Sosisalisasi dengan Perangkat Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.7.6.4	Rancangan akhir perencanaan aksi strategi daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.7.6.5	Penerapan perencana aksi strategi daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
000.7.7	Perencanaan Pendanaan Pembangunan						
000.7.7.1	Pendanaan Nasional dan Hibah		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.7.7.2	Pendanaan Daerah		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.7.7.3	Kerjasama Pembangunan Nasional		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.7.7.4	Surat Berharga Syariah Negara		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.7.7.5	Pendanaan On Top atau Inisiatif Baru		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					eksternal	siapapun.	
000.8 ORGANISASI DAN TATA LAKSANA							
000.8.1	Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kab/Kota						
	000.8.1.1	Pembentukan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.8.1.2	Pengubahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	000.8.1.3	Pembubaran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.8.2	Uraian Jabatan dan Tata Kerja						

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
000.8.2.1	Analisa Jabatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.8.2.2	Analisa Beban Kerja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.8.3	Ketatalaksanaan					
000.8.3.1	Proses Bisnis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.8.3.2	Standar Pelayanan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.8.3.3	Standar Operasional Prosedur	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			eksternal	siapapun.	
000.8.3.4 Pelayanan Publik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.8.4 Standar Kompetensi jabatan struktural dan fungsional	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.8.5 Evaluasi Kelembagaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.8.6 Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi					
000.8.6.1 Budaya Kerja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					eksternal	siapapun.	
000.8.6.2	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.8.6.3	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.9 PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN							
000.9.1	Kebijakan di bidang penelitian, pengkajian dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.9.2	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan (antara lain: Rencana Kerja, Administrasi Penelitian,		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	Pelaksanaan, Hasil Penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan, Rekomendasi)			eksternal	siapapun.	
000.9.3	Sosialisasi dan Desiminasi Hasil penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.9.4	Bimbingan teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.9.5	Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.9.6	Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi					

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
000.9.6.1	Data	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.9.6.2	Statistik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.9.6.3	Jurnal Hasil Penelitian/ Pengkajian	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.9.7	Master proceeding/jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.9.8	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
000.9.9	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
000.9.10	Seminar, Lokakarya, Temukarya, Workshop	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
100 PEMERINTAHAN						
100.1 OTONOMI DAERAH						
100.1.1	Kebijakan di bidang Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
100.1.2	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi, Bimbingan , Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
100.1.3	Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
100.1.4	Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)					
100.1.4.1	Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
100.1.4.2	Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
100.1.4.3	Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di Bidang Pemerintahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
100.1.4.4	Hubungan Antar Lembaga Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				dan eksternal serta penegak hukum	mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
100.1.4.5	Assosiasi Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
100.1.5	Peningkatan Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)					
100.1.5.1	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				penegak hukum	tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
100.1.5.2	Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
100.1.5.3	Pengembangan Kapasitas Daerah	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					penegak hukum	tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
100.1.6	LKPJ/ LKPJAMJ dan LPPD (Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi)		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
100.2 PEMERINTAHAN UMUM							
100.2.1	Kebijakan di bidang Pemerintahan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
100.2.2	Dekonsentrasi dan Kerjasama						
	100.2.2.1	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan			eksternal	siapapun.	
100.2.2.2	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
100.2.2.3	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
100.2.2.4	Fasilitasi Kecamatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				eksternal	siapapun.	
100.2.2.5	Fasilitasi Pelayanan Umum	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
100.2.3	Wilayah Administrasi dan Perbatasan					
100.2.3.1	Toponimi dan Data Wilayah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
100.2.3.2	Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				hukum	lembaga pemerintahan.	
100.2.3.3	Batas Antar Daerah Wilayah	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
100.2.3.4	Penataan Batas Wilayah Antar Kecamatan, Batas Wilayah Antar Kelurahan Satu Kecamatan Dan Batas Wilayah Kelurahan Antar Kecamatan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMAMAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				hukum	lembaga pemerintahan.	
100.2.3.5	Pemeliharaan Batas Wilayah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
100.3	HUKUM					
100.3.1	Program Legislasi					
100.3.1.1	Bahan/Materi Program Legislasi Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
100.3.1.2	Program Legislasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
100.3.2	Rancangan Peraturan Perundang- Undangan (antara lain Rancangan Peraturan Daerah, termasuk naskah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan)			eksternal	siapapun.	
100.3.3		Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah					
	100.3.3.1	Keputusan/Ketetapan Gubernur	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	100.3.3.2	Keputusan/Ketetapan Bupati	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	100.3.3.3	Keputusan/Ketetapan Walikota	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	100.3.3.4	Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				eksternal	siapapun.	
100.3.3.5	Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
100.3.3.6	Keputusan Sekretaris Daerah Kota	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
100.3.4	Instruksi/Surat Edaran					
100.3.4.1	Instruksi/Surat Edaran Provinsi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
100.3.4.2	Instruksi/Surat Edaran Kabupaten	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
100.3.4.3	Instruksi/Surat Edaran Kota	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
100.3.4.4	Instruksi/Surat Edaran Setingkat Eselon II	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
100.3.5	Surat Perintah					
100.3.5.1	Surat Perintah Gubernur	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
100.3.5.2	Surat Perintah Bupati	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
100.3.5.3	Surat Perintah Walikota	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
100.3.5.4	Surat Perintah Setingkat Eselon II	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
100.3.6	Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
100.3.7	Nota Kesepakatan/Memorandum of Understanding (MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerja Sama					
100.3.7.1	Dalam Negeri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolahan terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				eksternal	siapapun.	
100.3.7.2	Luar Negeri	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
100.3.8	Dokumentasi Hukum (antara lain: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-Peraturan yang dijadikan referensi)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
100.3.9	Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				eksternal	siapapun.	
100.3.10	Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi Pemberian Bantuan Hukum/Konsultasi Hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
100.3.11	Kasus/ Sengketa Hukum					
	100.3.11.1 Pidana Kasus/ sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				penegak hukum	tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
100.3.11.2	Perdata Kasus/sengketa perdata	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
100.3.11.3	Tata Usaha Negara	Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
100.3.11.4	Perburuhan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			hukum	lembaga pemerintahan.	
100.3.11.5 Arbitrase	Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, Pengawas internal/ek sternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
100.3.11.6	Sengketa Adat	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
100.3.12	Perijinan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
100.3.13	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)					
100.3.13.1	Hak Cipta	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
100.3.13.2	Hak Paten	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					pemerintahan.	
100.3.13.3	Hak Desain Industri	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
100.3.13.4	Hak Rahasia Dagang	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			dan eksternal serta penegak hukum	mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
100.3.13.5 Hak Merk	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
100.3.14	Permohonan HaKI yang ditolak	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
200 POLITIK						
200.1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
200.1.1	Kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
200.1.2	Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan					

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
200.1.2.1	Ketahanan Ideologi Negara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
200.1.2.2	Wawasan Kebangsaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
200.1.2.3	Bela Negara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
200.1.2.4	Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
200.1.2.5	Pembauran dan Kewarganegaraan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
200.1.3	Kewaspadaan Nasional						
200.1.3.1	Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan		Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, Pengawas internal/ eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
200.1.3.2	Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
200.1.3.3	Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan	Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, Pengawas internal/ek sternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
200.1.3.4	Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial	Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, Pengawas internal/ek sternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	
200.1.3.5	Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing	Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, Pengawas internal/ek sternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
200.1.4	Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan					

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
200.1.4.1	Ketahanan Seni	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
200.1.4.2	Ketahanan Budaya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
200.1.4.3	Agama dan Kepercayaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
200.1.4.4	Organisasi Kemasyarakatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
200.1.4.5	Masalah Sosial Kemasyarakatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
200.1.4.6	Fasilitasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
200.1.4.7	Pelaksanaan Identifikasi dan Kompilasi Organisasi Masyarakat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
200.1.4.8	Laporan Hasil Kerjasama Kegiatan Dengan Ormas/LNL	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
200.1.4.9	Evaluasi Aktifitas Ormas : Sanksi Administrasi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				hukum		
200.1.4.10	Fasilitasi Sengketa Ormas	Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
200.1.4.11	Fasilitasi Ormas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
200.1.5	Politik Dalam Negeri						
	200.1.5.1	Implementasi Kebijakan Politik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	200.1.5.2	Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	200.1.5.3	Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	200.1.5.4	Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik Yang Memperoleh Kursi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	200.1.5.5	Partai Politik Yang Tidak Memperoleh Kursi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				eksternal	siapapun.	
200.1.5.6	Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
200.1.5.7	Database Parpol	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
200.1.5.8	Pendidikan Budaya Politik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
200.1.5.9	Pemilihan Umum	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
200.1.6	Ketahanan Ekonomi					

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
200.1.6.1	Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian	Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, Pengawas internal/ek sternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
200.1.6.2	Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter	Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, Pengawas internal/ek sternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	
200.1.6.3	Perilaku Perekonomian Masyarakat	Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, Pengawas internal/ek sternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
200.1.6.4	Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi		Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, Pengawas internal/ek sternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
200.2 PEMILU							
200.2.1	Kebijakan di bidang Pemilu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
200.2.2	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih						

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
200.2.2.1	Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
200.2.2.2	Daftar Pemilih Sementara (DPS)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
200.2.2.3	Daftar Pemilih Tambahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
200.2.2.4	Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
200.2.2.5	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
200.2.3	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu						
	200.2.3.1	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari partai politik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	200.2.3.2	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual partai politik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	200.2.3.3	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari Calon Perseorangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	200.2.3.4	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faKtual	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
200.2.4	Penetapan Peserta Pemilu						

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
200.2.4.1	Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
200.2.4.2	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
200.2.4.3	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
200.2.4.4	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
200.2.4.5	Peta Daerah Pemilihan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
200.2.5	Pencalonan Pemilu					
200.2.5.1	Petunjuk teknis pencalonan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
200.2.5.2	Surat pencalonan pendaftaran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
200.2.5.3	Daftar bakal calon	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
200.2.5.4	Dokumen persyaratan masing-masing bakal calon	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					eksternal	siapapun.	
200.2.5.5	Dokumen verifikasi administrasi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
200.2.5.6	Daftar Calon Sementara dan Calon Tetap		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
200.2.6	Kampanye Pemilu						
200.2.6.1	Keputusan KPU tentang penetapan jadwal kampanye		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
200.2.6.2	Nama juru kampanye/pelaksana kampanye		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
200.2.6.3	Peringatan tertulis/penghentian kegiatan kampanye		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
200.2.7	Dana Kampanye						
200.2.7.1	Pedoman audit dana kampanye		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
200.2.7.2	Laporan dana kampanye peserta Pemilu		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
200.2.7.3	Laporan hasil audit dana kampanye		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
200.2.8	Pemungutan dan Penghitungan Suara						

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
200.2.8.1	Keputusan KPU tentang desain dan spesifikasi surat suara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
200.2.8.2	Master surat suara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
200.2.8.3	Surat suara yang terpakai	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
200.2.8.4	Surat Suara Tidak terpakai (rusak, salah, dan tidak digunakan)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
200.2.8.5	Formulir pemilu di Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
200.2.9	Penetapan Hasil Pemilu		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
200.2.10	Perselisihan Hasil Pemilu						
	200.2.10.1	Surat-surat mengenai Perselisihan Hasil Pemilu	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	200.2.10.2	Jawaban dan kesimpulan termohon	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	200.2.10.3	Salinan Putusan lembaga peradilan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
200.2.11	Laporan hasil penyelenggaraan Pemilu		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				eksternal	siapapun.	
300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN						
300.1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						
300.1.1	Kebijakan di bidang Polisi Pamong Praja yang dilakukan di Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
300.1.2	Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi Pamong Praja					
300.1.2.1	Tata Operasiona Polisi Pamong Praja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
300.1.2.2	Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
300.1.3	Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal	Apabila diketahui oleh publik tidak	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				dan eksternal	merugikan siapapun.	
300.1.4	Perlindungan Masyarakat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
300.1.5	Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
300.1.6	Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia	Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
300.2 PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN, DAN PERTOLONGAN						
300.2.1	Kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
300.2.2	Perencanaan Penanggulangan					

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
Bencana, Pencarian, dan Pertolongan						
300.2.2.1	Rencana dan standardisasi dan pengawakan dan perbekalan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
300.2.2.2	Kurikulum dan silabus, evaluasi dan monitoring	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
300.2.2.3	Tenaga pencarian pertolongan, penyiapan potensi pencarian dan pertolongan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
300.2.2.4	Permasyarakatan pencarian dan pertolongan, sertifikasi pencarian dan pertolongan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
300.2.2.5	Perencanaan dan	Biasa	Terbuka	Pengguna	Apabila diketahui	Unit pengolah

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		standardisasi, penyelenggaraan operasi SAR, Siaga dan latihan, tempat latihan			internal dan eksternal	oleh publik tidak merugikan siapapun.	terkait
300.2.2.6	Registrasi BEACON		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
300.2.3	Pencegahan dan Kesiapsiagaan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
300.2.4	Potensi Pencarian dan Pertolongan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
300.2.5	Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan						
300.2.5.1	Rencana Pendidikan dan Pelatihan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				eksternal	siapapun.	
300.2.5.2	Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
300.2.5.3	Pemasyarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
300.2.5.4	Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
300.2.5.5	Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
300.2.6	Operasi Pencarian dan Pertolongan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
300.2.7	Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
300.2.8	Operasi Komunikasi						
	300.2.8.1	Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	300.2.8.2	Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	300.2.8.3	Registrasi BEACON	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				eksternal	siapapun.	
300.2.9	Inventarisasi dan Pemeliharaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
300.2.10	Pengembangan Sistem Informasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
300.2.11	Penyajian dan Layanan Informasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
300.2.12	Pelapooran dan Evaluasi					
	300.2.12.1 Laporan Harian	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
300.2.12.2	Laporan Bulanan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
300.2.12.3	Laporoan Tahunan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
300.2.12.4	Evaluasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400 KESEJAHTERAAN RAKYAT						
400.1 PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL						
400.1.1	Kebijakan di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.1.2	Pembangunan Sumber Daya					

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.1.2.1	Fasilitasi Pendidikan ketrampilan Pengembangan Sumber Daya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.1.2.2	Fasilitasi Kesehatan Pengembangan Sumber Daya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.1.2.3	Fasilitasi Sumber daya hayati dan Pengembangan Sumber Daya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.1.2.4	Fasilitasi Mineral, energi dan lingkungan hidup	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.1.2.5	Fasilitasi Teknologi dan inovasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.1.2.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.1.2.7	Pemantauan dan evaluasi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.1.3	Peningkatan Infrastruktur						
400.1.3.1	Fasilitasi Transportasi peningkatan infrastruktur		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.1.3.2	Fasilitasi Informasi dan Telekomunikasi dalam peningkatan infrastruktur		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.1.3.3	Fasilitasi Sosial dalam peningkatan infrastruktur		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				eksternal	siapapun.	
400.1.3.4	Fasilitasi Ekonomi dalam peningkatan infrastruktur	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.1.3.5	Fasilitasi energi dalam peningkatan infrastruktur	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.1.3.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan infrastruktur	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.1.3.7	Pemantauan dan evaluasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.1.4	Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha					

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.1.4.1	Fasilitasi Invenstasi pembinaan ekonomi dan dunia usaha	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.1.4.2	Fasilitasi Kelembagaan ekonomi dan dunia usaha	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.1.4.3	Fasilitasi Usaha mikro, kecil dan menengah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.1.4.4	Fasilitasi Kemitraan usaha	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.1.4.5	Fasilitasi Pengembangan komoditas unggulan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.1.4.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ekonomi dan dunia usaha	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.1.4.7	Pemantauan dan evaluasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.1.4.8	Identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.1.4.9	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.1.4.10	Monitoring dan evaluasi Ekonomi desa tertinggal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				eksternal	siapapun.	
400.1.4.11	Identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.1.4.12	Fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.1.4.13	Monitoring dan evaluasi Masyarakat tertinggal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.1.4.14	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.1.5	Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya						
	400.1.5.1	Penguatan kapasitas lembaga lokal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.1.5.2	Penguatan organisasi masyarakat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.1.5.3	Pemberdayaan masyarakat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.1.5.4	Kerjasama antar lembaga sosial dan budaya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.1.5.5	Ketenagakerjaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.1.5.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan lembaga sosial dan budaya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.1.5.7	Pemantauan dan evaluasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.1.6	Pengembangan Daerah Khusus					
400.1.6.1	Fasilitasi pengembangan Daerah perbatasan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.1.6.2	Fasilitasi pengembangan Daerah rawan konflik dan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	bencana			eksternal	siapapun.	
400.1.6.3	Fasilitasi pengembangan Daerah Perdesaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.1.6.4	Fasilitasi pengembangan Daerah pulau terpencil dan terluar	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.1.6.5	Fasilitasi pengembangan Wilayah strategis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.1.6.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah khusus	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.1.6.7	Pemantauan dan	Biasa	Terbuka	Pengguna	Apabila diketahui	Unit pengolah

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
evaluasi				internal dan eksternal	oleh publik tidak merugikan siapapun.	terkait
400.2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
400.2.1	Kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.2.2	Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik Sosial dan Hukum					
400.2.2.1	Data gender	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.2.2.2	Advokasi dan fasilitasi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
400.2.3	Perlindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah Sosial, Tenaga Kerja, Korban Perdagangan)					
400.2.3.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.2.3.2	Data perlindungan perempuan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
400.2.3.3	Advokasi dan fasilitasi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.2.3.4	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.2.3.5	Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.2.3.6	Analisis dan penyajian informasi gender	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.2.3.7	Partisipasi publik untuk kesejahteraan ibu	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.2.4	Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Berhadapan Dengan Hukum)					

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.2.4.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.2.4.2	Data perlindungan anak	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
400.2.4.3	Advokasi dan fasilitasi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				serta penegak hukum	pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
400.2.4.4	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.2.4.5	Partisipasi publik untuk kesejahteraan anak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.2.5	Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur, Pengembangan Kota Layak Anak)					
400.2.5.1	Pemenuhan Hak Anak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				eksternal	siapapun.	
400.2.5.2	Data Klaster Hak Anak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.2.5.3	Data tumbuh kembang anak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.2.5.4	Advokasi dan fasilitasi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						pemerintahan.	
400.2.5.5	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.2.5.6	Penyelenggaraan parenting pola pengasuhan anak		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.2.6	Penghargaan terkait gender (Anugerah Parahita Ekapraya/APE)		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.2.7	Penghargaan Kabupaten Layak Anak		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					eksternal	siapapun.	
400.2.8	Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.3	PENDIDIKAN						
400.3.1	Kebijakan di bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.3.2	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, Informal						
	400.3.2.1 Bahan Ajar (Alat Permainan Edukatif)		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.3.2.2	Pelatihan Sosial	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.3.2.3	Peringatan Hari anak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.3.2.4	Block Grant	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.3.3	Pendidikan Masyarakat					
400.3.3.1	Penyelenggaraan Program	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.3.3.2	Penilaian dan pemberian bantuan sosial	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				eksternal	siapapun.	
400.3.3.3	Pembinaan Program	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.3.3.4	Lomba/Pemberian Penghargaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.3.3.5	Pameran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.3.3.6	Rakor	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.3.3.7	Sosialisasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.3.3.8	Sertifikasi dan Akreditasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.3.4	Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.3.5	Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama					
400.3.5.1	Kurikulum, bahan ajar	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.3.5.2	Block Grant	Biasa	Terbuka	Pengguna internal	Apabila diketahui oleh publik tidak	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					dan eksternal	merugikan siapapun.	
400.3.5.3	Pelatihan, Bimtek, sosialisasi,		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.3.5.4	Lomba, penghargaan, penganugerahan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.3.5.5	Bantuan operasional sekolah (BOS)		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.3.5.6	Bantuan Siswa Miskin		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.3.6	Pendidikan khusus/Layanan Khusus						

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMAMAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.3.6.1	Kurikulum,Bahan ajar, alat bantu pembelajaran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.3.6.2	Block Grant	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.3.6.3	Lomba, festival	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.3.6.4	Sosialisasi, bimtek	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.3.6.5	Pendataan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.3.6.6	Kelembagaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.3.7	Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik					
400.3.7.1	Pendataan dan Pemeetaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.3.7.2	Uji Kompetensi Guru	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.3.7.3	Sertifikasi Guru	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.3.7.4	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.3.7.5	Peningkatan kesejahteraan guru	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.3.7.6	Sosialisasi, bimtek	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.3.7.7	Block Grant	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.3.8	Sekolah Menengah Atas					
400.3.8.1	Kurikulum	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				eksternal	siapapun.	
400.3.8.2	Bahan Ajar	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.3.8.3	Pelatihan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.3.8.4	Block grant	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.3.8.5	Bimbingan teknis/sosialisasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.3.8.6	Lomba , Sayembara, festival	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.3.8.7	Bantuan operasional Sekolah (BOS)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.3.8.8	Bantuan siswa miskin	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.3.9	Pendidikan Khusus-Layanan Khusus					
400.3.9.1	Bahan ajar	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.3.9.2	Petunjuk Teknis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				eksternal	siapapun.	
400.3.9.3	Block grant	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.3.9.4	Sosialisasi, bimtek	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.3.9.5	Lomba, sayembara, jambore, festival	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.3.9.6	Kurikulum/ bahan pembelajaran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.3.9.7	Alat bantu pembelajaran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.3.9.8	Pendataan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.3.9.9	Kelembagaan (Unit kesehatan sekolah, Pendidikan jasmani adaptif, pendidikan inklusi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.3.10	Pendidik dan Tenaga Pendidik					
400.3.10.1	Pendataan dan Pemetaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.3.10.2	Uji Kompetensi Guru	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.3.10.3	Setifikasi Guru	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.3.10.4	Penilaian prestasi kerja guru dan pengawas sekolah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.3.10.5	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.3.10.6	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.3.10.7	Block grant	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.3.10.8	Bimbingan teknis/sosialisasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.3.11	Penilaian Pendidikan					
400.3.11.1	Penilaian Akademik	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.3.11.2	Penilaian Non Akademik	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
400.3.11.3	Analisis dan Sistem Informasi Penilaian	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.3.12	Data dan Statistik Pendidikan						
	400.3.12.1	Data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.3.12.2	Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.3.13	Prasarana dan Sarana Pendidikan						
	400.3.13.1	Prasarana Pendidikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.3.13.2	Sarana Pendidikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.3.13.3	Monitoring dan Evaluasi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.4 KEOLAHRAGAAN							
400.4.1	Kebijakan di bidang Keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.4.2	Pengelolaan Olahraga Pendidikan						
400.4.2.1	Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.4.2.2	Olahraga Pendidikan Tinggi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.4.2.3	Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.4.3	Pengelolaan Olahraga Rekreasi						
400.4.3.1	Olahraga Massal		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.4.3.2	Olahraga Tradisional		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.4.3.3	Olahraga Petualangan, Tantangan dan Wisata		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.4.4	Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga						

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.4.4.1	Olahraga Pendidikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.4.4.2	Olahraga Rekreasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.4.4.3	Olahraga Prestasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.4.4.4	Sekolah Khusus Olahraga	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.4.5	Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus					

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.4.5.1	Olahraga Tradisional	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.4.5.2	Layanan Khusus	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.4.6	Kemitraan dan Penghargaan Olahraga					
400.4.6.1	Kemitraan Keolahragaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.4.6.2	Penghargaan Olahraga	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.4.7	Pembibitan dan IPTEK Olahraga					

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMAMAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.4.7.1	Pembibitan Olahraga	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.4.7.2	Kompetisi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.4.7.3	IPTEK Olahraga	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.4.8	Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan					
400.4.8.1	Tenaga Keolahragaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.4.8.2	Organisasi Keolahragaan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.4.9	Industri dan Promosi Olahraga						
400.4.9.1	Industri Olahraga		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.4.9.2	Promosi Olahraga		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.4.10	Olahraga Prestasi						
400.4.10.1	Daerah		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.4.10.2	Nasional	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.4.10.3	Internasional	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.4.11	Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga					
400.4.11.1	Standardisasi Keolahragaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.4.11.2	Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.4.11.3	Infrastruktur Olahraga		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.5 KEPEMUDAAN							
400.5.1	Kebijakan di bidang Kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.5.2	Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda						
400.5.2.1	Penelusuran (Duta Kepemudaan)		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.5.2.2	Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui forum kepemudaan)		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.5.2.3	Pengembangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.5.3	Peningkatan Wawasan Pemuda					
400.5.3.1	Wawasan Kebangsaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.5.3.2	Wawasan Lingkungan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.5.3.3	Wawasan Sosial dan Hukum	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.5.4	Peningkatan Kapasitas Pemuda					

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.5.4.1	Kapasitas Iman dan Taqwa	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.5.4.2	Kapasitas IPTEK	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.5.4.3	Pemanfaatan IPTEK	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.5.5	Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/seni kepemudaan)					
400.5.5.1	Pengkajian	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.5.5.2	Pengembangan	Biasa	Terbuka	Pengguna	Apabila diketahui	Unit pengolah

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				internal dan eksternal	oleh publik tidak merugikan siapapun.	terkait
400.5.5.3	Pendayagunaan (fasilitasi)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.5.6	Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda					
400.5.6.1	Kepemimpinan : Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.5.6.2	Kepeloporan Pemuda : Kesukarelawanan. Pengembangan kepedulian, pendampingan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.5.7	Kewirausahaan					

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.5.7.1	Kelembagaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.5.7.2	Pengaderan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.5.7.3	Perintisan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.5.8	Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan					
400.5.8.1	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan : Kelembagaan dan Sumberdaya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.5.8.2	Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan : Kelembagaan dan Sumberdaya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.5.8.3	Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran: Kelembagaan dan Sumberdaya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.5.8.4	Pengawasan Kepramukaan : Kelembagaan, Program dan Sumberdaya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.5.9	Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda					
400.5.9.1	Standardisasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.5.9.2	Infrastruktur Pemuda	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.5.10	Kemitraan dan Penghargaan Pemuda					
400.5.10.1	Kemitraan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.5.10.2	Penghargaan Pemuda	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.6	KEBUDAYAAN					
400.6.1	Kebijakan di bidang Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.6.2	Pelestarian Cagar Budaya dan					

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
Permuseuman						
400.6.2.1	Registrasi Nasional	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.6.2.2	Pelindungan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.6.2.3	Pengembangan dan Pemanfaatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.6.2.4	Eksplorasi dan Dokumentasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.6.3	Pembinaan Kesenian dan Perfilman					

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.6.3.1	Pembinaan Seni Pertunjukan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.6.3.2	Pembinaan Seni Rupa	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.6.3.3	Pembinaan Seni Literasi dan apresiasi film	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.6.3.4	Dokumentasi dan Publikasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.6.4	Sejarah dan Nilai Budaya					
400.6.4.1	Sejarah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				eksternal	siapapun.	
400.6.4.2	Pemetaan nilai	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.6.4.3	Verifikasi dan Perumusan Nilai	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.6.4.4	Dokumentasi dan Publikasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.6.4.5	Dokumentasi sejarah dan nilai sejarah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.6.4.6	Publikasi sejarah dan	Biasa	Terbuka	Pengguna	Apabila diketahui	Unit pengolah

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
nilai sejarah					internal dan eksternal	oleh publik tidak merugikan siapapun.	terkait
400.6.5	Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya						
	400.6.5.1	Internalisasi nilai budaya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.6.5.2	Kekayaan budaya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.6.5.3	Warisan budaya nasional dan dunia	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.6.5.4	Diplomasi budaya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					eksternal	siapapun.	
400.7 KESEHATAN							
400.7.1	Kebijakan di bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.2	Upaya Kesehatan Dasar						
400.7.2.1	Pelayanan kedokteran keluarga		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.2.2	Praktek klinis dokter di pelayanan kesehatan primer		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.2.3	Pelaksanaan kesehatan primer		Biasa	Terbuka	Pengguna internal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				dan eksternal	merugikan siapapun.	
400.7.2.4	Kesehatan gigi dan mulut di puskesmas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.2.5	Kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.2.6	ICD 10, Destistry & Stomatology	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.2.7	Infeksi menular lewat transfusi darah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.7.2.8	Penyakit mulut di tingkat primer	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.2.9	Pembiayaan darah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.2.10	Penggunaan darah rasional	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.2.11	Unit transfusi darah, bank darah rumah sakit dan jejaring pelayanan darah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.2.12	Pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.7.2.13	Akreditasi puskesmas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.2.14	Puskesmas berprestasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.3	Upaya Kesehatan Rujukan					
400.7.3.1	Pelayanan kesehatan rujukan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.3.2	Pelayanan kedokteran, organisasi profesi dan konsorsium upaya kesehatan (KUK)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.3.3	Pelayanan rumah sakit privat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				eksternal	siapapun.	
400.7.3.4	Pelayanan kesehatan rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.3.5	Pelayanan kesehatan rumah sakit pendidikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.3.6	Pelayanan pasien jaminan kesehatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.3.7	Fasilitas pelayanan kesehatan asing dan perdagangan jasa	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.7.3.8	Badan pengawas rumah sakit	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.3.9	Perizinan dan penetapan kelas rumah sakit kelas A dan Penanam Modal Asing (PMA)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.3.10	Akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.4	Keperawatan dan keteknisian medik					
400.7.4.1	Pelayanan Keperawatan Dasar	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.7.4.2	Pelayanan keperawatan profesional di rumah sakit	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.4.3	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.4.4	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.4.5	Bina pelayanan kebidanan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.5	Penunjang medik dan sarana kesehatan					

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.7.5.1	Mikrobiologi dan imunologi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.5.2	Patologi dan toksilologi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.5.3	Radiologi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.5.4	Perizinan dan sertifikasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.5.5	Sarana dan prasarana kesehatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.7.5.6	Peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.5.7	Aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.6	Kesehatan Jiwa					
400.7.6.1	Kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.7.6.2	Bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
400.7.6.3	Etikolegal dan asesmen	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.7.6.4	Pencegahan dan penanggulangan narkoba dan sejenisnya	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
400.7.6.5	Etikolegal dan asesmen	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.7.6.6	Kesehatan jiwa kelompok beresiko		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
400.7.7	Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra						
400.7.7.1	Surveilans dan respon kejadian luar biasa		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
400.7.7.2	Imunisasi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.7.7.3	Karantina kesehatan dan kesehatan di pelabuhan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.7.4	Kesehatan matra	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.8	Pengendalian penyakit menular langsung					
400.7.8.1	Pengendalian tuberkolosis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.8.2	Pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.7.8.3	Pengendalian infeksi saluran pernafasan akut	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.8.4	Pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.8.5	Pengendalian kusta dan frambusia	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.9	Pengendalian penyakit bersumber binatang					
400.7.9.1	Pengendalian malaria	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.7.9.2	Pengendalian arbovirosis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.9.3	Pengendalian zoonosis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.9.4	Pengendalian filariasis dan kecacingan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.10	Pengendalian penyakit tidak menular					
400.7.10.1	Pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.10.2	Pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				eksternal	siapapun.	
400.7.10.3	Penyakit kanker	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.10.4	Penyakit kronis dan generatif	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.10.5	Gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.11	Penyehatan lingkungan					
400.7.11.1	Penyehatan air dan sanitasi dasar	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.7.11.2	Pemukiman dan tempat umum	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.11.3	Kawasan dan sanitasi darurat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.11.4	Higien sanitasi pangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.11.5	Pengamanan limbah, udara, radiasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.12	Pengembangan teknologi laboratorium dan penapisan teknologi pengendalian penyakit dan pengendalian lingkungan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.7.13	Gizi						
	400.7.13.1	Gizi makro	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.13.2	Gizi mikro	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.13.3	Gizi klinik dan diatetik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.13.4	Konsumsi makanan dan jasa makanan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.13.5	Kewaspadaan gizi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					eksternal	siapapun.	
400.7.14	Kesehatan ibu						
	400.7.14.1	Kesehatan ibu hamil	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.14.2	Kesehatan ibu bersalin dan nifas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.14.3	Kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.14.4	Keluarga berencana	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.7.14.5	Perlindungan kesehatan reproduksi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.15	Kesehatan anak					
400.7.15.1	Kelangsungan hidup bayi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.15.2	Kelangsungan anak balita dan pra sekolah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.15.3	Kewaspadaan penanganan balita beresiko	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.15.4	Kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					eksternal	siapapun.	
400.7.15.5	Perlindungan kesehatan anak		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.16	Kesehatan Tradisional alternatif dan komplementer						
400.7.16.1	Kesehatan tradisional keterampilan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.16.2	Kesehatan tradisional ramuan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.16.3	Kesehatan alternatif dan komplementer		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					eksternal	siapapun.	
400.7.16.4	Penapisan dan kemitraan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.17	Kesehatan kerja dan Olah raga						
400.7.17.1	Pelayanan kesehatan kerja		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.17.2	Kapasitas kerja		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.17.3	Lingkungan kerja		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.7.17.4	Kemitraan kesehatan kerja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.17.5	Kesehatan perkotaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.17.6	Kesehatan olahraga	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.18	Obat Publk dan perbekalan kesehatan					
400.7.18.1	Harga obat publik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.18.2	Pengadaan obat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				eksternal	siapapun.	
400.7.18.3	Perbekalan kesehatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.19	Produksi dan distribusi alat kesehatan					
400.7.19.1	Alat kesehatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.19.2	Produsen dan distributor alat kesehatan dan obat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.19.3	Produk diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.7.20	Kefarmasian						
	400.7.20.1	Pelayanan kefarmasian	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.20.2	Farmasi klinis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.20.3	Farmasi Komunitas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.20.4	Penggunaan obat rasional	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.21	Produksi dan distribusi kefarmasian						

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.7.21.1	Obat tradisional	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.21.2	Kosmetik dan makanan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.21.3	Narkotika, psikotropika, prekursor farmasi dan sediaan farmasi khusus	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.21.4	Kemandirian obat dan bahan baku obat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.22	Surat Keterangan, Sertifikasi dan Perijinan					

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.7.22.1	Surat keterangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.22.2	Sertifikasi dan perijinan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.23	Penanggulangan Krisis Kesehatan					
400.7.23.1	Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.23.2	Tanggap darurat dan pemulihan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.23.3	Pemantauan dan informasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					eksternal	siapapun.	
400.7.23.4	Penanggulangan krisis kesehatan dalam bidang pengendalian penyakit dan penyehatan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.23.5	Pelayanan kesehatan reproduksi situasi bencana		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.24	Pengembangan dan Jaminan Kesehatan						
400.7.24.1	Tersedianya data NHA setiap tahun		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.24.2	Tersedianya dokumen teknis penguatan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
pelaksanaan JKN					dan eksternal	merugikan siapapun.	
400.7.25	Intelegensia Kesehatan						
400.7.25.1	Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia kesehatan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.25.2	Penanggulangan masalah inteligensia kesehatan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.26	Kesehatan Haji						
400.7.26.1	Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.26.2	Peningkatan kesehatan dan pengendalian faktor risiko kesehatan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
haji					eksternal	siapapun.	
400.7.27	Promosi Kesehatan						
400.7.27.1	Sarana Promosi Kesehatan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.27.2	Pembinaan advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan peran		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.27.3	Pengembangan pesan promosi kesehatan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.27.4	Hari kesehatan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.7.28	Data dan Informasi						
	400.7.28.1	Statistik kesehatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.28.2	Analisis dan diseminasi informasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.7.28.3	Pengembangan sistem informasi dan bank data kesehatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.29	Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen						
	400.7.29.1	Penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.7.29.2	Standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.29.3	Inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.29.4	Obat Asli Indonesia		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.7.30	Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya						
400.7.30.1	Penilaian keamanan pangan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.7.30.2	Standardisasi produk pangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
400.7.30.3	Inspeksi dan sertifikasi produk pangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
400.7.30.4	Surveilan dan penyuluhan keamanan pangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
400.7.30.5	Pengawasan produk dan bahan berbahaya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
400.7.31	Rekam Medis	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					dan eksternal serta penegak hukum	mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
400.8 AGAMA DAN KEPERCAYAAN							
400.8.1	Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.8.2	Fasilitasi						
400.8.2.1	Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Prov/Kab/Kota		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.8.2.2	Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
Kepercayaan				eksternal	siapapun.	
400.8.2.3	Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dan Kepercayaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.8.2.4	Kasus Keagamaan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.8.2.5	Kasus Aliran Keagamaan		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
400.8.3	Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME						
400.8.3.1	Kelembagaan dan kepercayaan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.8.3.2	Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.8.3.3	Komunitas Kepercayaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.8.3.4	Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.8.3.5	Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.9 SOSIAL						
400.9.1	Kebijakan di bidang Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.9.2	Kesejahteraan Sosial Anak					

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.9.2.1	Kesejahteraan sosial anak balita	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.9.2.2	Kesejahteraan sosial anak terlantar	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.9.2.3	Kesejahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.9.2.4	Kesejahteraan sosial anak dengan catatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.9.2.5	Kesejahteraan sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.9.3	Rehabilitasi Sosial						
400.9.3.1	Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara, mental		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
400.9.3.2	Kelembagaan dan advokasi social		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						pemerintahan.	
400.9.3.3	Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan social		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.9.4	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial						
400.9.4.1	Gelandangan, pengemis dan pemulung		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.9.4.2	Tuna susila dan korban trafficking perempuan		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				eksternal serta penegak hukum	terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
400.9.4.3	Warga binaan lembaga pemasyarakatan meliputi penyiapan, reintegrasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.9.4.4	Pelayanan sosial orang dengan HIV / AIDS dan kelompok minoritas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.9.5	Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.9.6	Pelayanan sosial lanjut usia					

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.9.6.1	Pelayanan sosial dalam dan luar panti	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.9.6.2	Pengembangan kelembagaan meliputi pembinaan lembaga, kerjasama lembaga	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.9.6.3	Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.9.7	Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana bantuan sosial	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.9.8	Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.9.9	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial						
	400.9.9.1	Ketahanan sosial masyarakat meliputi keserasian sosial, penguatan Sumber Daya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.9.9.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.9.9.3	Pemulihan sosial meliputi penguatan sosial, reintegrasi sosial	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.9.9.4	Kerjasama meliputi kerjasama pemerintah, kerjasama non pemerintah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.9.10	Perlindungan Sosial Korban Bencana						

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
Alam						
400.9.10.1	Kesiapsiagaan dan mitigasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.9.10.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.9.10.3	Pemulihan sosial dan penguatan sosial	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.9.10.4	Kerjasama	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.9.11	Jaminan Sosial					

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.9.11.1	Seleksi dan verifikasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
400.9.11.2	Asuransi kesejahteraan sosial meliputi kelembagaan, pengelolaan premi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
400.9.11.3	Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan meliputi pendampingan dan penyaluran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
400.9.11.4	Kerjasama	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
400.9.12	Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan Sosial					

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.9.12.1	Ketahanan keluarga	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.9.12.2	Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.9.12.3	Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.9.12.4	Kemitraan dunia usaha	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.9.12.5	Karang taruna meliputi kelembagaan, pengembangan kapasitas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.9.13	Pemberdayaan komunitas adat terpencil						
	400.9.13.1	Persiapan pemberdayaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.9.13.2	Pemberdayaan sumber daya manusia	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.9.13.3	Penggalian dan pengembangan potensi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.9.13.4	Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.9.13.5	Kerjasama kelembagaan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.9.14	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan						
400.9.14.1	Identifikasi dan analisis		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.9.14.2	Pengembangan kapasitas		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.9.14.3	Penataan sosial lingkungan kumuh		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.9.14.4	Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.9.14.5	Bantuan Langsung		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.9.14.6	Kerjasama Kelembagaan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.9.15	Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial						
400.9.15.1	Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.9.15.2	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.9.15.3	Pengembangan kesetiakawanan sosial		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.9.15.4	Pengelolaan taman makam pahlawan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.10 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA							
400.10.1	Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.10.2	Pemerintahan Desa dan Kelurahan						

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.10.2.1	Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.10.2.2	Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.10.2.3	Fasilitasi Permusyawaratan Desa	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.10.2.4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.10.2.5	Pengembangan Kapasitas Desa	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.10.3	Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat						
	400.10.3.1	Lembaga Masyarakat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.10.3.2	Pembangunan Partisipatif	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.10.3.3	Pendataan Potensi Masyarakat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.10.3.4	Pengembangan Kawasan Perdesaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.10.3.5	Pelatihan Masyarakat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.10.4	Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat					
400.10.4.1	Budaya Nusantara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.10.4.2	Pemberdayaan Perempuan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.10.4.3	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.10.4.4	Kesejahteraan Sosial	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.10.4.5	Tenaga Kerja Perdesaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.10.5	Usaha Ekonomi Masyarakat					
400.10.5.1	Usaha Pertanian dan Pangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.10.5.2	Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.10.5.3	Produksi dan Pemasaran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					eksternal	siapapun.	
400.10.5.4	Usaha Ekonomi dan Keluarga		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.10.5.5	Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.10.6	Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan						
400.10.6.1	Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.10.6.2	Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				eksternal	siapapun.	
400.10.6.3	Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.10.6.4	Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.10.6.5	Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.10.7	Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.11 PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN							
400.11.1	Kebijakan di bidang Pertamanan dan Pemakaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.11.2	Pertamanan						
400.11.2.1	Perencanaan	Pertamanan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.11.2.2	Taman Kota		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.11.2.3	Tata Hias dan Ornamen Kota		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.11.3	Pemakaman						

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.11.3.1	Perencanaan Pemakaman	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.11.3.2	Pemakaman	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.11.3.3	Pelayanan Pemakaman	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.11.4	Jalur Hijau					
400.11.4.1	Perencanaan Jalur Hijau	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.11.4.2	Jalur Hijau Jalan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				eksternal	siapapun.	
400.11.4.3	Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.11.5	Peran Serta Masyarakat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.11.6	Pengawasan dan Penindakan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.11.7	Pengelolaan Data	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.11.8	Evaluasi dan Pelaporan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.12 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL						
400.12.1	Kebijakan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.12.2	Pendaftaran Penduduk					
400.12.2.1	Identitas Penduduk	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					pemerintahan.	
400.12.2.2	Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
400.12.2.3	Pindah Datang Penduduk Antar Negara	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				hukum	lembaga pemerintahan.	
400.12.2.4	Pendataan Penduduk Rentan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
400.12.2.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					dan eksternal serta penegak hukum	mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
400.12.3	Pencatatan Sipil						
400.12.3.1	Kelahiran dan Kematian		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
400.12.3.2	Perkawinan dan Perceraian		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				internal dan eksternal serta penegak hukum	dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
400.12.3.3	Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.12.3.4	Pencatatan Kewarganegaraan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
400.12.3.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.12.4	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						
	400.12.4.1	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	400.12.4.2	Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.12.4.3	Pengelolaan data Administrasi Kependudukan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
400.12.4.4	Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.12.4.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.12.5	Pengembangan Kebijakan Kependudukan						
400.12.5.1	Kuantitas Penduduk		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.12.5.2	Kualitas Penduduk		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.12.5.3	Mobilitas Penduduk		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.12.5.4	Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.12.5.5	Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.12.6	Penyerasian Kependudukan						
400.12.6.1	Indikator Kependudukan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.12.6.2	Proyeksi Penduduk		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.12.6.3	Perencanaan Kependudukan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.12.6.4	Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.12.6.5	Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13 KELUARGA BERENCANA						
400.13.1	Kebijakan di bidang Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13.2	Analisis pengaduan kebijakan pengendalian penduduk					

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.13.2.1	Pengumpulan dan pengolahan data	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13.2.2	Evaluasi dan pelaporan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13.3	Fasilitas pengaduan kebijakan pengendalian penduduk					
400.13.3.1	Penyiapan fasilitas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13.3.2	Evaluasi dan pelaporan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13.4	Profil dan proyeksi penduduk					

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.13.4.1	Data profil dan proyeksi penduduk	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13.4.2	Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13.5	Penetapan parameter pengendalian penduduk					
400.13.5.1	Penetapan sasaran parameter	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13.5.2	Evaluasi sasaran parameter	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13.6	Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk					

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.13.6.1	Pemanfaatan profil dan proyeksi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13.6.2	Pemanfaatan parameter		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13.7	Pengembangan Sistem						
400.13.7.1	Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13.7.2	Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13.8	Pengembangan Materi						
400.13.8.1	Pengembangan Materi Jalur Pendidikan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal	Apabila diketahui oleh publik tidak	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		Formal			dan eksternal	merugikan siapapun.	
	400.13.8.2	Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13.9	Monitoring dan Evaluasi						
	400.13.9.1	Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.9.2	Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13.10	Analisis Sosial		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMAMAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.13.11	Analisis Ekonomi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13.12	Analisis Dampak Politik, Pertahanan dan Keamanan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13.13	Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13.14	Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13.15	Jaminan pelayanan dan penyediaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	sarana keluarga berencana						
400.13.16	Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah						
	400.13.16.1	Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.16.2	Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13.17	Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
swasta							
400.13.18	Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13.19	Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta						
400.13.19.1	Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13.19.2	Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
swasta					eksternal	siapapun.	
400.13.20	Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan						
400.13.20.1	Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13.20.2	Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil,		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
dan perbatasan							
400.13.21	Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan						
	400.13.21.1	Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.21.2	Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13.22	Kesertaan						

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
keluarga berencana pria							
400.13.22.1	Peningkatan akses keluarga berencana pria		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13.22.2	Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13.23	Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13.24	Pencegahan PMS dan HIV/AIDS		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.13.25	Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulang an infertilitas		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13.26	Pelembagaan bina keluarga Balita dan anak						
	400.13.26.1	Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.26.2	Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13.27	Monitoring dan evaluasi						

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
bina keluarga Balita dan anak							
400.13.27.1	Monitoring bina keluarga Balita dan anak		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13.27.2	Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13.28	Pelembagaan bina ketahanan remaja						
400.13.28.1	Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.13.28.2	Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13.29	Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja						
400.13.29.1	Monitoring bina ketahanan remaja		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13.29.2	Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13.30	Pengembangan Program Bina						

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan							
400.13.30.1	Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13.30.2	Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Rentan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13.31	Pelembagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan						
400.13.31.1	Pengembangan Kelompok Bina		Biasa	Terbuka	Pengguna internal	Apabila diketahui oleh publik tidak	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan			dan eksternal	merugikan siapapun.	
400.13.31.2	Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13.32	Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan						
400.13.32.1	Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13.32.2	Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
Lansia dan Rentan				eksternal	siapapun.	
400.13.33	Pengembangan program usaha ekonomi keluarga	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13.34	Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13.35	Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga					

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.13.35.1	Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13.35.2	Pengemangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13.36	Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13.37	Pengembangan Program Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.13.38	Pelembagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera					
400.13.38.1	Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13.38.2	Pengembangan Kemiitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13.39	Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera					

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.13.39.1	Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13.39.2	Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13.40	Pengembanga n advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi						
400.13.40.1	Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13.40.2	Evaluasi dan pelaporan advokasi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal	Apabila diketahui oleh publik tidak	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		dan komunikasi, informasi, edukasi			dan eksternal	merugikan siapapun.	
400.13.41	Advokasi dan pencitraan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13.42	Komunikasi, Informasi dan Edukasi						
	400.13.42.1	Promosi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.42.2	Sarana produksi media komunikasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.42.3	Produk media komunikasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal	Apabila diketahui oleh publik tidak	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					dan eksternal	merugikan siapapun.	
400.13.43	Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13.44	Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota						
	400.13.44.1	Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.13.44.2	Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13.45	Hubungan dengan lembaga nonpemerintah						
400.13.45.1	Pengembangan hubungan dengan lembaga nonpemerintah		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13.45.2	Penguatan hubungan dengan lembaga nonpemerintah		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13.46	Tenaga Lini Lapangan						

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.13.46.1	Pengembangan tenaga lini lapangan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13.46.2	Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13.47	Institusi Masyarakat Pedesaan						
400.13.47.1	Pengembangan institusi masyarakat pedesaan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13.47.2	Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13.48	Mekanisme Operasional lini lapangan						

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.13.48.1	Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13.48.2	Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13.49	Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan						
400.13.49.1	Perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13.49.2	Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.13.50	Pengumpulan dan pengolahan data		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13.51	Analisis dan evaluasi						
	400.13.51.1	Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	400.13.51.2	Analisis dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13.52	Sistem aplikasi dan bank data						
	400.13.52.1	Pengembangan sistem aplikasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.13.52.2	Pengelolaan bank data		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13.53	Infrastruktur teknologi informasi						
400.13.53.1	Pengembangan infrastruktur teknologi informasi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13.53.2	Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.13.54	Dokumentasi dan penyebarluasan informasi						
400.13.54.1	Dokumentasi dan perpustakaan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.13.54.2	Pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.14 HUBUNGAN MASYARAKAT						
400.14.1	Keprotokolan					
400.14.1.1	Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari- hari besar)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.14.1.2	Buku tamu Keprotokolan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.14.1.3	Agenda kegiatan pimpinan daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				eksternal	siapapun.	
400.14.1.4	Kunjungan dinas dalam dan luar negeri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.14.2	Daftar nama/alamat kantor /pejabat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.14.3	Dokumentasi/ liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa bidang masing-masing, dalam berbagai media : kertas, foto/video/rekaman suara/multi media	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.14.4	Pengumpulan,pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan					
400.14.4.1	Kliping koran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal	Apabila diketahui oleh publik tidak	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				dan eksternal	merugikan siapapun.	
400.14.4.2	Brosur/Leaflet/poster/ plakat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.14.4.3	Pengumuman/pemberi taan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.14.5	Hubungan antar lembaga dan Pemerintahan Daerah					
400.14.5.1	Hubungan antar lembaga pemerintah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.14.5.2	Hubungan dengan organisasi sosial / LSM	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				eksternal	siapapun.	
400.14.5.3	Hubungan dengan perusahaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.14.5.4	Hubungan dengan Perguruan Tinggi/sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/Praktek Kerja Lapang (PKL)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.14.5.5	Forum Kehumasan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.14.5.6	Hubungan dengan Media Massa	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				eksternal	siapapun.	
400.14.6	Dengar pendapat/hearing DPRD	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.14.7	Bahan/materi pidato/sidang Muspida Provinsi/Kota/Kabupaten	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.14.8	Penerbitan Majalah,buletin,koran dan jurnal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.14.9	Publikasi melalui media cetak maupun elektronik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
400.14.10	Pameran/sayemara/lomba/festival,pe mbuatan spanduk dan iklan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.14.11	Penghargaan/tanda kenang-kenangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
400.14.12	Ucapan Terimakasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500 PEREKONOMIAN						
500.1 KETAHANAN PANGAN						
500.1.1	Kebijakan di bidang Ketahanan Pangan yang dilakukan Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.1.2	Ketersediaan dan Kerawanan Pangan					

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.1.2.1	Ketersediaan Pangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.1.2.2	Akses Pangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.1.2.3	Kerawanan Pangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.1.3	Distribusi dan Cadangan Pangan					
500.1.3.1	Distribusi Pangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.1.3.2	Harga Pangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				eksternal	siapapun.	
500.1.3.3	Cadangan Pangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.1.4	Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan					
500.1.4.1	Konsumsi Pangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.1.4.2	Penganekaragaman Pangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.1.4.3	Keamanan Pangan Segar	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					eksternal	siapapun.	
500.1.5	Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan						
	500.1.5.1	Dewan Ketahanan Pangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.1.5.2	Penghargaan Ketahanan Pangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.1.6	Swasembada Pangan (Kearifan Lokal)		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.1.7	Bimbingan Teknis		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					eksternal	siapapun.	
500.1.8	Evaluasi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.2	PERDAGANGAN						
500.2.1	Kebijakan di bidang Perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.2.2	Perdagangan Dalam Negeri						
	500.2.2.1	Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.2.2.2	Bisa Usaha Jasa Perdangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal	Apabila diketahui oleh publik tidak	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				dan eksternal	merugikan siapapun.	
500.2.2.3	Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
500.2.2.4	Informasi Perusahaan	Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.2.2.5	Pelaku Pasar	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.2.2.6	Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.2.2.7	Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.2.2.8	Pengembangan Produk Lokal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.2.2.9	Pencitraan Produk Dalam Negeri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.2.2.10	Pengembangan Sarana Distribusi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.2.2.11	Pengelolaan Sarana Distribusi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.2.2.12	Kerjasama Pengembangan Sistem Logistik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.2.2.13	Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.2.2.14	Informasi Pasar	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.2.2.15	Informasi Hasil Industri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.2.2.16	Barang Strategis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.2.2.17	Bahan Pokok Agro	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.2.3	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen					
500.2.3.1	Kelembagaan dan informasi standar	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.2.3.2	Kerjasama Standarisasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.2.3.3	Perumusan dan penerapan standar	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.2.3.4	Tata usaha	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.2.3.5	Kerjasama, informasi, dan publikasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.2.3.6	Analisa penyelenggaraan perlindungan konsumen	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.2.3.7	Bimbingan konsumen dan pelaku usaha	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.2.3.8	Fasilitas kelembagaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.2.3.9	Produk pertambangan dan aneka industri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.2.3.10	Produk pertanian, kimia dan kehutanan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.2.3.11	Jasa	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.2.3.12	Kerjasama	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.2.3.13	Sarana dan Kerjasama	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.2.3.14	Kelembagaan dan dan penilaian	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.2.3.15	UTTP dan Standar Ukuran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.2.3.16	Pengawasan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.2.3.17	Balai pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.2.3.18	Balai Pengujian UTP	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.2.4	Perdagangan Berjangka Komoditi					
500.2.4.1	Pengkajian pasar	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.2.4.2	Pengawasan Transaksi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.2.4.3	Pengawasan Keuangan dan Audit	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				eksternal	siapapun.	
500.2.4.4	Pengkajian pasar	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.2.4.5	Pengembangan Pasar	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.2.4.6	Sistem informasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.2.4.7	Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.2.4.8	Pengawasan pasar lelang	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.2.4.9	Pengawasan sistem gudang	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.2.5	Bimbingan Teknis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.2.6	Evaluasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.3 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH						

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.3.1	Kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.3.2	Kelembagaan Koperasi dan UKM						
	500.3.2.1	Organisasi dan Badan Hukum Koperasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.3.2.2	Tata Laksana Koperasi dan UKM	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.3.2.3	Keanggotaan Koperasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.3.2.4	Pengendalian dan Akuntabilitas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					eksternal	siapapun.	
500.3.3	Produksi						
	500.3.3.1	Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.3.3.2	Kehutanan dan Perkebunan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.3.3.3	Perikanan dan Peternakan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.3.3.4	Industri Kerajinan dan Pertambangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.3.3.5	Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.3.4	Pembiayaan						
500.3.4.1	Program Pendanaan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.3.4.2	Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.3.4.3	Urusan Permodalan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.3.4.4	Asuransi dan Jasa Keuangan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				eksternal	siapapun.	
500.3.4.5	Pembiayaan dan Penjaminan Kredit	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.3.4.6	Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.3.5	Pemasaran dan Jaringan Usaha					
500.3.5.1	Perdagangan Dalam Negeri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.3.5.2	Ekspor dan Impor	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.3.5.3	Sarana dan Prasarana Pemasaran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.3.5.4	Kemitraan dan Jaringan Usaha	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.3.5.5	Informasi dan Publikasi Bisnis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.3.5.6	Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.3.6	Pengembangan Sumber Daya Manusia					
500.3.6.1	Pengembangan Kewirausahaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				eksternal	siapapun.	
500.3.6.2	Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.3.6.3	Peran Serta Masyarakat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.3.6.4	Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.3.6.5	Advokasi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					serta penegak hukum	pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
500.3.7	Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha						
	500.3.7.1	Produktifitas dan Mutu	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.3.7.2	Restrukturisasi Usaha	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.3.7.3	Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.3.7.4	Fasilitasi Investasi UKMK	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.3.7.5	Pengembangan Sarana Bisnis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.3.8	Pengkajian Sumber Daya UKMK					
500.3.8.1	Penelitian Koperasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.3.8.2	Penelitian UKM	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.3.8.3	Penelitian Sumber Daya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					eksternal	siapapun.	
500.3.8.4	Pengembangan Perkaderan UMK		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.3.9	Kerja Sama Hubungan Antar Lembaga		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.3.10	Pedagang Kaki Lima (PKL)						
500.3.10.1	Peraturan Perundang- Undangan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.3.10.2	Sarana dan Prasarana		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.3.11	Monitoring dan Evaluasi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.4	KEHUTANAN						
500.4.1	Kebijakan di bidang Kehutanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.4.2	Penyuluhan						
	500.4.2.1	Program Kerja Penyuluhan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.4.2.2	Materi Penyuluhan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.4.2.3	Program Penyuluhan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.4.2.4	Sarana Penyuluhan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.4.2.5	Pengembangan Tenaga Penyuluhan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.4.2.6	Pelaksanaan Penyuluhan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.4.2.7	Pemberdayaan Masyarakat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.4.2.8	Deseminasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.4.2.9	Evaluasi, dan Laporan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.4.3	Planologi Kehutanan					
500.4.3.1	Perencanaan Makro Kawasan Hutan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.4.3.2	Penataan Ruang Kawasan Hutan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
500.4.3.3	Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.4.3.4	Pengukuhan dan Penataaan Kawasan Hutan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				serta penegak hukum	pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
500.4.3.5	Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
500.4.3.6	Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				dan eksternal serta penegak hukum	mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
500.4.3.7	Inventarisasi Sumber Daya Hutan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.4.3.8	Pemantauan Sumber Daya Hutan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
500.4.3.9	Pemetaan Sumber Daya Hutan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.4.3.10	Jaringan Data Spasial	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
500.4.3.11	Penggunaan Kawasan Hutan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.4.3.12	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.4.3.13	Informasi Penggunaan Kawasan Hutan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.4.3.14	Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.4.3.15	Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
500.4.3.16	Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.4.4	Bina Usaha Kehutanan						
500.4.4.1	Data areal HPH /HTI/IUPHHK		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
500.4.4.2	SK HPH/HTI/IUPHHK		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				pemerintahan.	
500.4.4.3 Kerjasama	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
500.4.4.4 Pembatalan/Penolakan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			dan eksternal serta penegak hukum	mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
500.4.4.5 Perpanjangan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

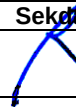
JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.4.4.6	Modal dan Peralatan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
500.4.4.7	Investasi Industri	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMAMAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.4.4.8	Peralatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.4.4.9	Tenaga Kerja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.4.4.10	Pemegang Saham	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.4.4.11	Neraca Perusahaan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				hukum	lembaga pemerintahan.	
500.4.4.12	Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.4.4.13	Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
500.4.4.14	Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.4.4.15	Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.4.4.16	Target Produksi RKT dan Beban Kerja	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
500.4.4.17	Produksi Kayu	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.4.4.18	Produksi non kayu	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
500.4.4.19	Industri Kayu HPH/HTI/IUPHHK	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.4.4.20	Industri Kayu Non HPH/HTI/IUPHHK	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
500.4.4.21	Industri Non Kayu	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.4.4.22	Hutan Tanaman Industri Pulp	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
500.4.4.23	Hutan Tanaman Industri Pertukangan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.4.4.24	Pelanggaran dan Sanksi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
500.4.4.25	Pemblokiran	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.4.4.26	Denda	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.4.4.27	Pencabutan Areal HPH/HTI/IUPHHK	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
500.4.4.28	Pola Pemanfaatan Hutan Produksi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.4.4.29	Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal	Apabila diketahui oleh publik tidak	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				dan eksternal	merugikan siapapun.	
500.4.4.30	Informasi Sumber Daya Hutan Produksi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.4.4.31	Pengembangan Investasi Usaha	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.4.4.32	Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.4.4.33	Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam/Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.4.4.34	Produksi Hutan Alam	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.4.4.35	Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.4.4.36	Pengembangan Hutan Tanaman Industri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.4.4.37	Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.4.4.38	Pengembangan Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman/Rencana	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
Kerja Usaha Produksi							
500.4.4.39	Penilaian Kinerja Pengembangan Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.4.4.40	Pembiayaan Hutan Tanaman		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.4.4.41	Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.4.4.42	Peredaran Hasil Hutan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.4.4.43	Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.4.4.44	Penertiban Peredaran Hasil Hutan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.4.4.45	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.4.4.46	Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer Hasil Hutan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolahan terkait
500.4.4.47	Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolahan terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.4.4.48	Pembinaan HPH/HTI/IUPHHK	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
500.4.4.49	Pembinaan TPTI/TPTJ/Silvikultur	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.4.5	Standardisasi dan Lingkungan						
500.4.5.1	Standardisasi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.4.5.2	Sarana Pengujian Hasil Hutan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.4.5.3	Pengembangan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.4.5.4	Pemasaran Hasil Hutan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.4.5.5	Pengendalian Lingkungan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				eksternal	siapapun.	
500.4.5.6	Angkutan Hasil Hutan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.4.5.7	Tanda Pengenal Perusahaan Tata Usaha Hasil Hutan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.4.5.8	Legalitas Tata Usaha Hasil Hutan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.4.5.9	Palu Tok Kualitas Tata Usaha Hasil Hutan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.4.5.10	Pass Angkutan Hasil Hutan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.4.5.11	Sertifikat Ekspor Hasil Hutan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
500.4.6	Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam					

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.4.6.1	Flora dan Fauna yang Dilindungi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.4.6.2	Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.4.6.3	Lembaga Konservasi/Kebun Binatang	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.4.6.4	Konvensi Keanekaragaman Hayati	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.4.6.5	Kawasan Konservasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.4.6.6	Pengamanan Hutan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.4.6.7	Program dan Evaluasi Penyidikan dan Perlindungan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.4.6.8	Penyidikan dan Perlindungan Wilayah Hutan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.4.6.9	Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.4.6.10	Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.4.6.11	Bina Cinta Alam	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.4.6.12	Kader Konservasi Sumber Daya Alam	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.4.6.13	Data organisasi pencinta alam dan kader konservasi SDA	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.4.7	Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial					
500.4.7.1	Pengelolaan Benih	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.4.7.2	Kebun Benih	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.4.7.3	Tegakan Benih	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.4.7.4	Pengadaan Benih	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.4.7.5	Pengujian dan Penyimpanan Benih	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.4.7.6	Lalu Lintas Angkutan Benih	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.4.7.7	Pembibitan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.4.7.8	Lalu Lintas Angkutan Benih	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.4.7.9	Pengembangan Usaha Perbenihan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.4.7.10	Pengendalian Peredaran Benih	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.4.7.11	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.4.7.12	Tanaman Reboisasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.4.7.13	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.4.7.14	Perhutanan Sosial	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.4.7.15	Pengendalian Perladangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.4.8	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan					

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMAMAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.4.8.1	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Kehutanan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.4.8.2	Monitoring dan Evaluasi Penelitian	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.4.8.3	Diseminasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.4.8.4	Gelar Teknologi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.4.8.5	Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.5 KELAUTAN DAN PERIKANAN							
500.5.1	Kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.5.2	Perikanan Tangkap						
500.5.2.1	Data dan Statistik Perikanan Tangkap		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.5.2.2	Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.5.2.3	Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Tangkap Ikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.5.2.4	Pendaftaran Kapal Perikanan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.5.2.5	Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.5.2.6	Perbantuan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.5.2.7	Alokasi Usaha Penangkapan Ikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.5.2.8	Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.5.2.9	Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.5.2.10	Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.5.2.11	Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.5.2.12	Kelembgaan Usaha Penangkapan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.5.2.13	Investasi dan Permodalan Usaha	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.5.2.14	Kenelayanan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.5.2.15	Pembinaan Pengelolaan Usaha	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.5.2.16	Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.5.3	Perikanan Budidaya						
500.5.3.1	Potensi Lahan dan Air		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.5.3.2	Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.5.3.3	Pengelolaan Induk Perbenihan ikan air tawar		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.5.3.4	Perbenihan Skala Kecil		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.5.3.5	Informasi dan Distribusi Pembenihan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				eksternal	siapapun.	
500.5.3.6	Budidaya Air Tawar	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.5.3.7	Budidaya Ikan Hias	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.5.3.8	Sertifikasi Budidaya Perikanan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.5.3.9	Data dan Statistik Perikanan Budidaya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.5.3.10	Hama dan Penyakit Ikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.5.3.11	Perlindungan Lingkungan Budidaya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.5.3.12	Investasi dan Permodalan Usaha Budidaya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.5.3.13	Kewirausahaan Budidaya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.5.3.14	Pelayanan Usaha Budidaya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.5.3.15	Kelembagaan dan Ketenagaakerjaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.5.3.16	Promosi Usaha dan Budaya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.5.4	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan					
500.5.4.1	Standarisasi Pengolahan Hasil	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.5.4.2	Pengembangan Produk	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.5.4.3	Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.5.4.4	Industri Pengolahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.5.4.5	Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.5.4.6	Standarisasi Pengembangan Produk Non Konsumsi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.5.4.7	Promosi dan Jaringan Ikan Hias	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.5.4.8	Pengembangan Industri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.5.4.9	Sarana dan Prasarana Pengembangan Produk Non Konsumsi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.5.4.10	Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.5.4.11	Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.5.4.12	Jaringan Distribusi dan Kemitraan Pemasaran Dalam Negeri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.5.4.13	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Dalam Negeri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.5.4.14	Sarana dan Prasarana Pemasaran Dalam Negeri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.5.4.15	Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.5.4.16	Analisis dan Informasi Pemasaran Luar Negeri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.5.4.17	Pengembangan Ekspor	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMAMAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.5.4.18	Pengembangan Impor	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.5.4.19	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Luar Negeri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.5.4.20	Pelayanan Usaha	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.5.4.21	Kemitraan Usaha	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.5.4.22	Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.5.4.23	Investasi dan Permodalan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.5.4.24	Informasi dan Promosi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.5.5	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil					
500.5.5.1		Sangat Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

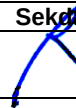
JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			hukum		
500.5.5.2	Sangat Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara.	Unit pengolah terkait
500.5.5.3	Sangat Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			hukum		
500.5.5.4	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.5.5.5	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.5.5.6	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				pemerintahan.	
500.5.5.7	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.5.5.8	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
500.5.5.9	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.5.5.10	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolahan terkait
500.5.5.11	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolahan terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.5.5.12	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
500.5.5.13	Sangat Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.5.5.14	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
500.5.5.15	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.5.5.16	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.5.5.17	Biasa	Terbuka	Pengguna internal	Apabila diketahui oleh publik tidak	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				dan eksternal	merugikan siapapun.	
500.5.5.18		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.5.5.19		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.5.5.20		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.5.6	Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan					

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.5.6.1	Pengawasan Penangkapan Wilayah Barat	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolahan terkait
500.5.6.2	Pengawasan Penangkapan Wilayah Timur	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolahan terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.5.6.3	Pengawasan Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
500.5.6.4	Pengawasan Usaha Budidaya	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.5.6.5	Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
500.5.6.6	Pengawasan Pencemaran Perairan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.5.6.7	Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
500.5.6.8	Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya Non Hayati	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.5.6.9	Logistik dan Operasional Wilayah Barat	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
500.5.6.10	Logistik dan Operasional Wilayah Timur	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.5.6.11	Perawatan Kapal Pengawas	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
500.5.6.12	Pengawakan Kapal Pengawas	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.5.6.13	Sistem Pemantauan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolahan terkait
500.5.6.14	Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolahan terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.5.6.15	Pemantauan Sumber Daya Perikanan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
500.5.6.16	Pengembangan Infrastruktur Pengawasan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.5.6.17	Penyidikan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
500.5.6.18	Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.5.6.19	Kerja Sama Penegakan Hukum dan Fasilitas PPNS Perikanan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
500.5.6.20	Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.5.7	Karantina Ikan						
	500.5.7.1	Pemeriksaan Ikan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.5.7.2	Penahanan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			hukum	lembaga pemerintahan.	
500.5.7.3 Pengasingan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.5.7.4	Pengamatan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
500.5.7.5	Pengakuan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.5.7.6	Penolakan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
500.5.7.7	Pemusnahan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.5.7.8	Persyaratan lalu Lintas Pemasukan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
500.5.7.9	Persyaratan lalu Lintas Pengeluaran	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.5.7.10	Permohonan Sertifikat	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
500.5.7.11	Pemasukan Formulir	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.5.7.12	Pemasukan Sertifikat	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
500.5.7.13	Evaluasi dan Monitoring Sertifikat	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.5.7.14	Surat Perintah	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
500.5.7.15	Rekomendasi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.5.7.16	Penutupan Suatu Area	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolahan terkait
500.5.7.17	Pelanggaran Lalu Lintas Ikan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolahan terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.5.7.18	Pengawasan Peraturan Perkarantinaaan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
500.5.7.19	Pengawasan Pelaksanaan Operasional	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.5.7.20	Instalasi Karantina Sementara	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
500.5.7.21	Lokasi Karantina	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.6 PERTANIAN							
500.6.1	Kebijakan di bidang Pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.6.2	Perlindungan hortikultura						
500.6.2.1	Perlindungan Tanaman Buah		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.6.2.2	Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.6.2.3	Perlindungan Tanaman Florikultura		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.6.2.4	Dampak iklim dan Persyaratan Teknis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.6.3	Perbenihan Hortikultura					
500.6.3.1	Penilaian Varietas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.6.3.2	Pengawasan Mutu Benih	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.6.3.3	Budidaya dan Pascapanen Florikultura	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.6.4	Perluasan dan Pengelolaan Lahan					

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.6.4.1	Basis Data Lahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.6.4.2	Pengendalian Lahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.6.4.3	Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.6.4.4	Perluasan Kawasan Tanaman Pangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.6.4.5	Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Pernakan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.6.5	Pengelolaan Air Irigasi						
	500.6.5.1	Pengembangan Sumber Air	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.5.2	Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.5.3	Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.5.4	Kelembagaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.6.6	Pembiayaan Pertanian						

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.6.6.1	Pembiayaan Program	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.6.6.2	Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.6.6.3	Pembiayaan agribisnis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.6.6.4	Kelembagaan dan Pemberdayaan agribisnis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.6.7	Pupuk Pestisida					
500.6.7.1	Pupuk Organik dan Pembenah Tanah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				eksternal	siapapun.	
500.6.7.2	Pupuk Anorganik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.6.7.3	Pestisida	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.6.7.4	Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.6.8	Alat dan Mesin Pertanian					
500.6.8.1	Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMAMAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.6.8.2	Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.6.8.3	Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.6.9	Perbenihan Tanaman Pangan					
500.6.9.1		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.6.9.2		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.6.9.3		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					eksternal	siapapun.	
500.6.9.4			Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.6.10	Budidaya Serealia						
	500.6.10.1	Padi Irigasi dan Rawa	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.10.2	Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.6.10.3	Jagung	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.6.10.4	Serealiala Lain	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.6.11	Budidaya Aneka Kacang dan Umbi					
500.6.11.1	Kedelai	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.6.11.2	Ubi Kayu	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.6.11.3	Aneka Kacang	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.6.11.4	Aneka Umbi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					eksternal	siapapun.	
500.6.12	Tanaman Pangan						
500.6.12.1	Pengelolaan Data Organisasi Pengganggu Tumbuhan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.6.12.2	Dampak Perubahan Iklim		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.6.12.3	Teknoogi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.6.12.4	Pengelolaan Pengendalian Hama Tepadu		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.6.13	Pascapanen Tanaman Pangan					
500.6.13.1	Padi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.6.13.2	Jagung dan Sereal alin	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.6.13.3	Kedelai dan Aneka Kacang	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.6.13.4	Aneka Umbi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.6.14	Pengolahan Hasil Pertanian					

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.6.14.1	Tanaman Pangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.6.14.2	Holtikurtura	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.6.14.3	Perkebunan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.6.14.4	Peternakan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.6.15	Mutu dan Standarasi					
500.6.15.1	Standardisasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				eksternal	siapapun.	
500.6.15.2	Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.6.15.3	Akreditasi dan Kelembagaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.6.15.4	Kerjasama dan Harmonisasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.6.16	Pengembangan Usaha dan Investasi					
500.6.16.1	Kemitraan dan Kewirausahaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.6.16.2	Investasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.6.16.3	Promosi Dalam Negeri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.6.16.4	Promosi Luar Negeri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.6.17	Pemasaran Domestik					
500.6.17.1	Informasi Pasar	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.6.17.2	Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				eksternal	siapapun.	
500.6.17.3	Sarana dan Kelembagaan Pasar	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.6.17.4	Jaringan Pemasaran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.6.18	Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan (antara lain : Rencana Kerja, TOR/ Proposal, Pembentukan Tim Kerja dan Surat menyurat)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.6.19	Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan					
500.6.19.1	Hasil Penelitian dan Pengembangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal	Apabila diketahui oleh publik tidak	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					dan eksternal	merugikan siapapun.	
500.6.19.2	Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.6.20	Diseminasi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.6.21	Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian						
500.6.21.1	Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.6.21.2	Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Publikasi lainnya		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				eksternal	siapapun.	
500.6.22	Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.6.23	Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.6.24	Data Penelitian dan Pengembangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.6.25	Evaluasi Penelitian/ Pengkajian dan Pengembangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.6.26	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)					

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.6.26.1	Hak Cipta	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
500.6.26.2	Hak Paten Sederhana	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.6.26.3	Hak Paten Biasa	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
500.6.26.4	Hak Merek	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.6.26.5	Pendaftaran Varietas Tanaman	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
500.6.26.6	Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim dan Tahunan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.6.26.7	Permohonan HKI yang ditolak		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
500.6.27	Pelayanan Perijinan Pertanian						
500.6.27.1	Sarana I (bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian)		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
500.6.27.2	Sarana II (bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		pengalihan saham perkebunan)					
500.6.27.3		Sarana III (bidang bibit, karkas,daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.6.28	Pelayanan Hukum						
500.6.28.1		Sertifikasi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.6.28.2	Pertimbangan Hukum	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
500.6.29	Karantina Pertanian					
500.6.29.1	Karantina Tumbuhan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				pemerintahan.	
500.6.29.2 Karantina Hewan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
500.6.30 Bimbingan Teknis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.6.31	Evaluasi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.7 PETERNAKAN							
500.7.1	Kebijakan di bidang Peternakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.7.2	Peternakan dan Kesehatan Hewan						
500.7.2.1	Perbibitan Ternak (antara lain: Produksi Bibit Ternak Ruminansia, Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia, Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak, Pengembangan Bibit Ternak, Surat		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran)					
500.7.2.2	Pakan Ternak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.7.2.3	Budidaya Ternak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.7.2.4	Kesehatan Hewan (antara lain: Pengamatan Penyakit Hewan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Perlindungan Hewan, Kelembagaan dan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	Sumber Daya Kesehatan Hewan, Pengawasan Obat Hewan)					
500.7.2.5	Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen (antara lain: Pascapanen, Higien Sanitasi, Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan, Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan, Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.7.3	Bimbingan Teknis		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.7.4	Evaluasi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.8 PERKEBUNAN							
500.8.1	Kebijakan di bidang Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.8.2	Tanaman Semusim						
	500.8.2.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.8.2.2	Perbenihan Tanaman Semusim		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.8.2.3	Budidaya Teknologi Budidaya Tanaman Semusim		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.8.2.4	Pemberdayaan Tanaman Semusim		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.8.3	Tanaman Rempah & Penyegar						
500.8.3.1	Identifikasi dan Pendayaguunaan Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.8.3.2	Perbenihan Tanaman Rempah & Penyegar	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.8.3.3	Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.8.3.4	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Rempah & Penyegar	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.8.4	Tanaman Tahunan					
500.8.4.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya, Tanaman Tahunan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.8.4.2	Perbenihan Tanaman Tahunan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					eksternal	siapapun.	
500.8.4.3	Budidaya Tanaman Tahunan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.8.4.4	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.8.5	Perlindungan Perkebunan						
500.8.5.1	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim, Perlindungan Perkebunan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.8.5.2	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.8.5.3	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.8.5.4	Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.8.6	Pascapanen dan Pembinaan Usaha						
500.8.6.1	Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMAMAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.8.6.2	Pascapanen Tanaman Tahunan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.8.6.3	Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.8.6.4	Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.8.7	Bimbingan Teknis Perkebunan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.8.8	Evaluasi Perkebunan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.9 PERINDUSTRIAN							
500.9.1	Kebijakan di bidang Perindustrian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.9.2	Iklim Usaha dan Kerja Sama						
500.9.2.1	Industri Manufaktur		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.9.2.2	Industri Agro		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.9.2.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.9.2.4	Industri Kecil dan Menengah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.9.3	Promosi Industri					
500.9.3.1	Industri Manufaktur	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.9.3.2	Promosi Industri Agro	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.9.3.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.9.3.4	Industri Kecil dan Menengah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					eksternal	siapapun.	
500.9.4	Standarisasi dan Teknologi						
	500.9.4.1	Industri Manufaktur	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.9.4.2	Industri Agro	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.9.4.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.9.4.4	Industri Kecil dan Menengah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				eksternal	siapapun.	
500.9.5	Hak atas Kekayaan Intelektual					
500.9.5.1	Industri Manufaktur	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
500.9.5.2	Industri Agro	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				penegak hukum	tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
500.9.5.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.9.5.4	Industri Kecil dan Menengah		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
500.9.6	Industri Hijau						
500.9.6.1	Industri Manufaktur		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.9.6.2	Industri Agro		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.9.6.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.9.6.4	Industri Kecil dan Menengah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.9.7	Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.9.8	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri (Provinsi dan Kabupaten/Kota)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.9.9	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan Industri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.9.10	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.9.11	Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.9.12	Standarisasi					
500.9.12.1	Standar	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.9.12.2	Penyiapan Penerapan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.9.12.3	Infrastruktur Standar	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				eksternal	siapapun.	
500.9.13	Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri					
500.9.13.1	Kebijakan Industri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.9.13.2	Perpajakan dan Tarif	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.9.13.3	Pengembangan Model Industrial	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.9.14	Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup					

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.9.14.1	Industri Hijau		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.9.14.2	Lingkungan Hidup		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.9.14.3	Energi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.9.15	Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual						
500.9.15.1	Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.9.15.2	Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.9.15.3	Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.9.16	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						
500.10.1	Kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.2	Rekomendasi Kegeologian						

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.10.2.1	Mitigasi Gunung Api, Gempa Bumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.2.2	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
500.10.2.3	Pertambangan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			serta penegak hukum	pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
500.10.2.4 Panas Bumi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
500.10.2.5 Geosains	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.10.2.6	Pengukuran Time Domain Electromagnetic (TDEM)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolahan terkait
500.10.2.7	Kelayakan Lingkungan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolahan terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.10.3	Penelitian Kegeologian						
	500.10.3.1	Administrasi pelaksanaan penelitian	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.3.2	Administrasi tenaga penelitian	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.3.3	Administrasi penggunaan peralatan penelitian	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.3.4	Log-book peralatan survei/peralatan uji/kalibrasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.3.5	Hasil penelitian dan penyelidikan kegeologian	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				internal dan eksternal serta penegak hukum	dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
500.10.3.6	Sumber Daya Geologi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
500.10.3.7	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					eksternal	siapapun.	
500.10.3.8	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.3.9	Survei Geologi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.4	Inventarisasi dan evaluasi kegeologian						
500.10.4.1	Sumber Daya Geologi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.4.2	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMAMAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.10.4.3	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.4.4	Survei Geologi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.4.5	Konservasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.5	Administrasi Pelayanan Kegeologian dan Penyajian Data dan Informasi					
500.10.5.1	Peta potensi dan sebaran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.10.5.2	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.5.3	Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami, Semburan Lumpur/Gas serta kebakaran Batubara		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.5.4	Survei Geologi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.6	Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi						
500.10.6.1	Rencana Induk Jaringan Gas Bumi		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				internal dan eksternal serta penegak hukum	dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
500.10.6.2	Rencana dan Realisasi Investasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.6.3	Penetapan Harga Minyak Mentah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.6.4	Penetapan Bagii Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak dan Gas Bumi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				eksternal serta penegak hukum	terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
500.10.6.5	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNB	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

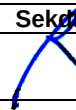
JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.10.6.6	Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
500.10.6.7	Rekomendasi Kemampuan Produksi Barang dan Jasa Dalam Negeri		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.6.8	Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) dan Rencana Impor Barang (RIB)		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.7	Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi						

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.10.7.1	Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi (Konvensional dan Non Konvensional)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolahan terkait
500.10.7.2	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pemanfaatan Data Migas untuk presentasi makalah, publikasi makalah, pembukaan data, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Izin Pengiriman Data ke	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolahan terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	Luar Negeri, Unitisasi Lapangan Minyak dan Gas Bumi, Rekomendasi Pengalihan Interest, Rekomendasi Penyisihan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Penyiapan Dokumen Pengakhiran Kontrak, Laporan Data Survei Seismik, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi per semester, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi Tahunan)					

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.10.7.3	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Rekomendasi Penggunaan Data Eksplorasi (publikasi makalah, analisa laboratorium, Reprocessing), Penetapan Pengusahaan Minyak Bumi dari Sumur Tua, Penetapan Pengusahaan Lapangan Produksi yang Dikembalikan Kepada Pemerintah, Buku Cadangan Minyak dan Gas Bumi, Data Cadangan Strategis/Penyangga	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolahan terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Pemantauan Data Produksi Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Inventarisasi Mutu Minyak dan Gas Bumi)					
500.10.7.4	Pengembangan lapangan Minyak dan Gas Bumi (POD)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.10.7.5	Perpanjangan Kontrak KKS	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
500.10.7.6	Penetapan Alokasi dan Harga Gas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.7.7	Partisipasi Interest	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.10.7.8	Tumpang Tindih Lahan		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
500.10.8	Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi						
500.10.8.1	Perumusan pedoman, prosedur, layanan serta pengawasan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain (antara lain: Pedomam dan Prosedur, Layanan Usaha (Izin/rekomendasi/pen andasahan), Pengawasan)					
500.10.8.2	Fasilitasi dan pertimbangan pelanggaran	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.10.8.3	Penetapan Harga dan Subsidi Bahan Bakar yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.9	Teknik dan Lingkungan					
500.10.9.1	Perumusan pelaksanaan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) / Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.9.2	Registrasi Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) (antara lain: Berkas permohonan, Berita Acara Hasil Evaluasi, Salinan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	Sertifikat NPT, Register NPT)					
500.10.9.3	Buku Register Welding Procedure Specification (WPS)/ Procedure Qualification Record (PQR)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.9.4	Register dan Sertifikat Kualifikasi Juru Las	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.9.5	Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
Keselamatan Operasi)					pemerintahan.	
500.10.9.6	Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
500.10.9.7	Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.10.9.8	Dokumen Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Hulu dan Hilir (antara lain: Dokumen Permohonan Pengajuan persetujuan penunjukkan Calon kepala/wakil kepala teknik tambang minyak dan gas bumi, Surat Undangan Presentasi, Makalah Presentasi, Surat Persetujuan/ Pengesahan penunjukan kepala/wakil Kepala Teknik Tambang Minyak dan Gas Bumi)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.10.9.9	Penghargaan Keselamatan Kerja (antara lain: Surat Permohonan Mendapatkan Penghargaan, Surat Penugasan Dalam Rangka Verifikasi, Berkas Hasil Evaluasi Verifikasi, Salinan Tanda Penghargaan, Dokumen Pengajuan dan penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.9.10	Usaha penunjang	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.10.10	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi						
	500.10.10.1	Perencanaan Program Kerja Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.10.2	Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.10.3	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.10.4	Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					penegak hukum	tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
500.10.11	Penyiapan Program Energi Terbarukan dan Konservasi Energi						
	500.10.11.1	Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.11.2	Usul Program Aneka Energi Pemerintah Daerah dan Lembaga	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.11.3	Penyiapan Program Pemanfaatan Energi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.10.11.4	Proyeksi Kebutuhan Energi dari EBT		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.11.5	Perencanaan Pemanfaatan Energi dari EBT		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.11.6	Penyusunan Neraca Energi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.11.7	Road Map di Bidang EBT		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.12	Panas Bumi						
500.10.12.1	Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				eksternal	siapapun.	
500.10.12.2	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.12.3	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Peralatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.12.4	Rekomendasi Bahan Peledak	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.10.12.5	Perizinan penggunaan gudang bahan peledak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
500.10.12.6	Izin Tangki Bahan Bakar Cair	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
500.10.12.7	Persetujuan sertifikasi Welding Prosedure Specification (WPS) dan Prosedure Qualification Record (PQR) dan kualifikasi Juru Las	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
500.10.12.8	Penerbitasn Izin Usaha Panas Bumi (IUP)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.10.12.9	Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.12.10	Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung (IPL)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.12.11	Penetapan kapasitas usaha panas bumi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.12.12	Penetapan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.12.13	Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.10.12.14	Pelaksanaan Kerja Sama Panas Bumi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
500.10.12.15	Inventarisasi, Verifikasi dan Evaluasi Obvitnas Bidang Panas Bumi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
500.10.12.16	Monitoring Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
500.10.12.17	Pembinaan dan Pengawasan Investasi Panas Bumi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat	Unit pengolahan terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					dan eksternal serta penegak hukum	mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
500.10.13	Bioenergi						
	500.10.13.1	Penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BNN)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.13.2	Pengadaan Bahan Bakar Nabati (BBN)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.13.3	Penerbitan Rekomendasi Ekspor - Impor	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.10.13.4	Penetapan Indeks Harga Pasar BBN (HIP BBN)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.13.5	Evaluasi/Revisi HIP BBN	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.13.6	Database Pengusahaan Bioenergi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.13.7	Penetapan Badan Usaha sebagai Pengelola Energi Biomassa atau Biogas untuk Pembangkit Listrik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.13.8	Penetapan Spesifikasi Bahan Bakar Nabati	Biasa	Terbuka	Pengguna internal	Apabila diketahui oleh publik tidak	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					dan eksternal	merugikan siapapun.	
500.10.13.9	Usul Program Bioenergi Pemerintah Daerah dan Lembaga		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.14	Aneka Energi						
500.10.14.1	Penerbitan Izin Usaha Aneka Energi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.14.2	Penetapan Kapasitas Usaha		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.14.3	Rekomendasi Kompetensi dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.10.14.4	Rekomendasi Persetujuan Perubahan Pemegang Saham		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.14.5	Persetujuan Rencana Impor Barang (RIB)		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.15	Konservasi Energi						
500.10.15.1	Audit Energi melalui program kemitraan Konservasi Energi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.15.2	Monitoring Implementasi hasil audit energi melalui program kemitraan konservasi energi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.15.3	Pembinaan dan pengawasan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal	Apabila diketahui oleh publik tidak	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	pelaksanaan manajemen energi di pengguna energi di atas 6.000 TOE			dan eksternal	merugikan siapapun.	
500.10.15.4	Pengawasan sertifikasi label dan tanda hemat energi pada lampu swabalast	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.15.5	Penyusunan daftar peralatan/teknologi efisiensi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.15.6	Penyusunan emisi energi gas rumah kaca	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.15.7	Pemberian insentif dan disinsentif konservasi energi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.10.15.8	Profil investasi efisiensi energi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.15.9	Invesment Grade Audit (IGA)		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.15.10	Bimbingan Teknis Bidang EBTKE		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.16	Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE						
500.10.16.1	Usul Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.10.16.2	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.16.3	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang EBTKE		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.16.4	Evaluasi Program Kerja		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.17	Bina Program Tenaga Listrik						
500.10.17.1	Investasi dan pendanaan tenaga listrik (antara lain: Dokumen grant/hibah/loan agreement luar negeri, Monitoring loan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan penanganan permasalahan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan kegiatan investasi dan pendanaan tenaga listrik)					
500.10.17.2	Pengembangan listrik pedesaan (antara lain: Data program listrik perdesaan, Data rasio elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RD), Monitoring dan evaluasi listrik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		perdesaan, Listrik untuk masyarakat tidak mampu)					
500.10.17.3	Data dan Informasi Ketenagalistrikan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.18	Bina Usaha Ketenagalistikan						
500.10.18.1	Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan (antara lain: Pelayanan izin usaha penyediaan tenaga listrik (IO, IUPL-S, dan IUPL), Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan, Data laporan berkala pemegang Izin)		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.18.2	Harga dan Subsidi Listrik		Biasa	Terbuka	Pengguna internal	Apabila diketahui oleh publik tidak	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				dan eksternal	merugikan siapapun.	
500.10.18.3	Hubungan komersial tenaga listrik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.18.4	Perlindungan konsumen listrik (antara lain: Penanganan pengaduan konsumen listrik, Dokumen Pengawasan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen Evaluasi realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen evaluasi pemberian	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		kompensasi pinalti tingkat mutu pelayanan PT PLN (Persero)					
500.10.19	Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan						
	500.10.19.1	Kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.19.2	Penyiapan kompetensi dan pengawasan tenaga teknik ketenagalistrikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.19.3	Usaha penunjang ketenagalistrikan (antara lain: Dokumen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL),	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	Dokumen Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telematika (IPJ Telematika), Dokumen Penandasahan Rencana Impor Barang (RIB)					
500.10.19.4	Perlindungan lingkungan ketenagalistrikan (antara lain: Dokumen forum keselamatan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, Dokumen pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sektor	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		ketenagalistrikan, Laporan pembinaan dan pengawasan lingkungan, Dokumen perhitungan faktor emisi Clean Development Mechansim (CDM)					
500.10.20	Sertifikasi						
	500.10.20.1	Dokumen Sertifikasi Produk peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.20.2	Dokumen Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.20.3	Dokumen Penerbitan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Instalasi Tenaga	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
Listrik					eksternal	siapapun.	
500.10.20.4	Dokumen Pembinaan dan pengawasan sertifikat laik operasi (SLO) instalasi tenaga listrik		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.20.5	Registrasi Sertifikasi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.21	Akreditasi Ketenagalistrikan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.22	Standarisasi Kompetensi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.10.23	Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Bidang Ketenagalistrikan						
	500.10.23.1	Perumusan rancangan SNI bidang ketenagalistrikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapaapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.23.2	Forum konsensus rancangan SNI bidang ketenagalistrikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapaapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.23.3	Program pemberlakuan SNI wajib bidang ketenagalistrikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapaapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.23.4	Dokumen pengawasan penerapan SNI wajib bidang ketenagalistrikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapaapun.	Unit pengolah terkait
500.10.24	Standardisasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan						

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.10.24.1	Klasifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.24.2	Kualifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.24.3	Dokumen penunjukan LIT (Lembaga Inspeksi Teknis)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.24.4	Laporan berkala pemegang penunjukan LIT	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.24.5	Laporan hasil pengawasan penunjukan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.10.25	Bina Program Mineral dan Batubara						
	500.10.25.1	Penyiapan dan Perencanaan Program Mineral dan Batubara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.25.2	Rencana Induk Mineral dan Batubara	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.10.25.3	Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Bidang Mineral dan Batubara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.10.25.4	Data dan Informasai Mineral dan Batubara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.25.5	Pelaporan Program Mineral dan Batubara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.25.6	Perencanaan, Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Mineral dan Batubara melalui lelang reguler	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.25.7	Data dan Informasi Wilayah Mineral dan Batubara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.25.8	Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal	Apabila diketahui oleh publik tidak	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					dan eksternal	merugikan siapapun.	
500.10.25.9	Pengembangan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.26	Pembinaan Pengusahaan Mineral						
500.10.26.1	Ketenagakerjaan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.26.2	Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.10.26.3	Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan mineral		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
500.10.26.4	Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan mineral		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.26.5	Laporan/data kegiatan eksplorasi mineral		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.26.6	Pengawasan produksi dan pemasaran		Biasa	Terbuka	Pengguna internal	Apabila diketahui oleh publik tidak	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	mineral (logam, bukan logam batuan, radioaktif, dan mineral jarang)				dan eksternal	merugikan siapapun.	
500.10.26.7	Perizinan usaha pertambangan mineral		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
500.10.26.8	Kontrak Karya (KK)		Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.10.26.9	Pengelolaan barang Kontrak Karya (KK)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.26.10	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.26.11	Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan mineral	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.26.12	Teguran kepada pengusahan Kontrak Karya (KK)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.26.13	Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
pertambangan mineral				eksternal	siapapun.	
500.10.26.14	Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.26.15	Pelaporan usaha pertambangan mineral	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.26.16	Penghargaan usaha pertambangan mineral	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.26.17	Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
Mineral							
500.10.27	Pembinaan Pengusahaan Batubara						
	500.10.27.1	Ketenagakerjaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.27.2	Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.27.3	Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan batubara	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.10.27.4	Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan batubara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
500.10.27.5	Laporan/data kegiatan eksplorasi batubara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
500.10.27.6	Pengawasan produksi dan pemasaran batubara (bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut) antara lain: Laporan Produksi dan Penjualan Batubara PKP2B, IUP hingga Laporan Kontrak Penjualan Pertambangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
Batubara							
500.10.27.7	Perizinan Usaha Pertambangan Batubara		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.27.8	Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)		Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, Pengawas internal/ek sternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
500.10.27.9	Pengelolaan Barang		Biasa	Terbuka	Pengguna	Apabila diketahui	Unit pengolah

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) antara lain: Persetujuan Pengadaan Barang Modal (Masterlist) PKP2B hingga Data Asset Perusahaan Batubara			internal dan eksternal	oleh publik tidak merugikan siapapun.	terkait
500.10.27.10	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)	Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, Pengawas internal/ek sternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional,	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					dan/ atau ketertiban umum	
500.10.27.11	Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.27.12	Teguran kepada pengusahan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)	Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, Pengawas internal/ek sternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	
500.10.27.13	Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan batubara	Rahasia	Tertutup	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
500.10.27.14	Pedoman/petunjuk teknis pertambangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal	Apabila diketahui oleh publik tidak	Unit pengolahan terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir				dan eksternal	merugikan siapapun.	
500.10.27.15	Pelaporan usaha pertambangan batubara		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.27.16	Penghargaan usaha pertambangan batubara		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.27.17	Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.28	Penerimaan Negara						

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.10.28.1	Penerimaan Negara Bukan Pajak		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.28.2	Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.28.3	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.29	Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara						
500.10.29.1	Perumusan RSNI (Rancangan Standar Nasional Indonesia)/ RSKKNI (Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	Indonesia) antara lain: Draft Rancangan, Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI), dan Standar Nasional Indonesia (SNI)					
500.10.29.2	Pengawasan Standardisasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.29.3	Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.29.4	Pengawasan Keselamatan Kegiatan dan Keselamatan Pekerja (antara lain: Laporan Kecelakaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	Tambang/Statistik hingga Laporan Hasil Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)					
500.10.29.5	Pemeriksaan teknis dan pengujian instalasi dan peralatan tambang (antara lain: Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi dan Peralatan Tambang hingga Berita Acara Hasil Inspeksi)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.29.6	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.29.7	Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal	Apabila diketahui oleh publik tidak	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)			dan eksternal	merugikan siapapun.	
500.10.29.8	Rekomendasi bahan kimia	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.29.9	Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (antara lain: Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)/Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) hingga Surat Penetapan Jaminan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
Pasca Tambang)							
500.10.29.10	Laporan berkala teknik dan lingkungan pertambangan/ laporan tahunan pelaksanaan reklamasi (antara lain: Laporan Bulanan Terjadinya Pencemaran (LPL-5) hingga Laporan Tahunan Pelaksanaan Reklamasi)		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.29.11	Pemberian Penghargaan (antara lain: Pemberian Penghargaan Lingkungan Pertambangan, Pemberian		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	Penghargaan Keselematan Kerja, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan lingkungan Pertambangan, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan)					
500.10.29.12	Pengawasan lingkungan pertambangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.29.13	Usaha Jasa Mineral dan Batubara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.10.29.14	Pembinaan dan pengawasan usaha jasa mineral dan batubara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
500.10.29.15	Rekomendasi Teknis (antara lain: Pengajuan Rekomendasi Teknis, Hasil Evaluasi Dokumen Pengajuan Rekomendasi Teknis, Surat Rekomendasi Teknis)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
500.10.29.16	Persetujuan Teknis (antara lain: Pengajuan Persetujuan Teknis, Hasil Evaluasi Dokumen Pengajuan Persetujuan Teknis, Surat Persetujuan Teknis)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.10.29.17	Pengawasan Teknis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
500.10.29.18	Pengawasan Konservasi Mineral dan Batubara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
500.10.29.19	Pembinaan Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara (antara lain: Sosialisasi Standardisasi, Bimbingan Teknis Lingkungan Pertambangan, Bimbingan Teknis/Sosialisasi Pertambangan)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
500.10.30	Program Penelitian dan Pengembangan					

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.10.30.1	Rencana Penelitian dan Pengembangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.30.2	Pengembangan dan inovasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.30.3	Dokumen penerapan/pemanfaatan/pendayagunaan/replikasi/prototipe hasil penelitian/pengkajian/pengembangan/inovasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.30.4	Advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.30.5	Diseminasi hasil	Biasa	Terbuka	Pengguna	Apabila diketahui	Unit pengolah

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi			internal dan eksternal	oleh publik tidak merugikan siapapun.	terkait
500.10.30.6	Pembinaan penelitian/Pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.30.7	Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.30.8	Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		pengetahuan dan teknologi					
500.10.30.9	Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
500.10.30.10	Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
500.10.30.11	Forum komunikasi penelitian,	Biasa	Terbuka	Pengguna internal	Apabila diketahui oleh publik tidak	Unit pengolah terkait	

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi			dan eksternal	merugikan siapapun.	
500.10.30.12		Layanan jasa penelitian, pengembangan, penerapan IPTEK	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.30.13		Sertifikasi personil peneliti bidang Sumber Daya Mineral	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.31	Sarana Litbang						
500.10.31.1		Administrasi penggunaan peralatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.31.2		Log-book Peralatan Survei/Peralatan Uji Kalibrasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

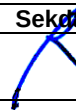
JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					eksternal	siapapun.	
500.10.32	Afiliasi						
	500.10.32.1	Proyek Percontohan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.32.2	Promosi dan Layanan Jasa Teknologi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.32.3	Pembinaan Penelitian dan Pengembangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.10.32.4	Penyajian Informasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.10.33	Penelitian dan Pengembangan Kegeologian						
	500.10.33.1	Pemetaan dan penelitian geologi, geokimia, dan geofisika kelautan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.10.33.2	Energi Kelautan dan Kewilayahan Penelitian Energi dan kewilayahan pantai	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				hukum	lembaga pemerintahan.	
500.10.33.3	Penelitian sumber daya energi dan mineral kelautan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.10.33.4	Penelitian Sumber Daya Mineral Kelautan		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
500.10.34	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi						
500.10.34.1	Teknologi Eksplorasi		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			hukum	lembaga pemerintahan.	
500.10.34.2 Teknologi Eksploitasi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
500.10.34.3 Laboratorium	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			dan eksternal serta penegak hukum	mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
500.10.34.4 Study	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.34.5 Teknologi Proses	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.34.6 Teknologi Aplikasi Produk	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.34.7 Teknologi Gas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal	Apabila diketahui oleh publik tidak	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					dan eksternal	merugikan siapapun.	
500.10.35	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral Batubara						
	500.10.35.1	Teknologi Eksploitasi Tambang dan Pengolahan Sumber Daya	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.10.35.2	Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan mineral	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.10.35.3	Teknologi Pemanfaatan Batubara		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.36	Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan						
500.10.36.1	Energi baru terbarukan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.36.2	Teknologi Ketenagalistrikan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.10.36.3	Lingkungan dan Konservasi Energi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.10.36.4	Penelitian dan Pengembangan Teknologi PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dan Konservasi Energi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11 PERHUBUNGAN							
500.11.1	Kebijakan di bidang Perhubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.2	Jaringan Prasarana dan Pelayanan						
500.11.2.1	Penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.2.2	Penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
C				eksternal	siapapun.	
500.11.2.3	Penetapan lokasi terminal barang utama	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.2.4	Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.2.5	Jaringan trayek angkutan antar kota/provinsi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.2.6	Jaringan lintas pada jaringan jalan primer	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.11.2.7	Penetapan kelas jalan primer	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.2.8	Kualifikasi teknis petugas terminal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.2.9	Jaringan transportasi jalan sekunder	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.3	Pengembangan Transportasi Jalan					
500.11.3.1	Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.3.2	Pengembangan transportasi jalan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					eksternal	siapapun.	
500.11.4	Pengujian Kendaraan Bermotor						
	500.11.4.1	Pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.4.2	Sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.4.3	Sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.4.4	Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.5	Teknologi Kendaraan Bermotor						

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.11.5.1	Sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.5.2	Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.5.3	Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.5.4	Harmonisasi dan standardisasi regulasi kendaraan bermotor		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.6	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas						
500.11.6.1	Analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		perkotaan			eksternal	siapapun.	
500.11.6.2	Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.7	Perlengkapan Jalan						
500.11.7.1	Pedoman teknis perlengkapan jalan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.7.2	Penimbangan kendaraan bermotor di jalan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.7.3	Akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.11.7.4	Kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.7.5	Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.8	Angkutan Penumpang						
500.11.8.1	Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.8.2	Izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.11.8.3	Izin trayek antar kota antar provinsi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.8.4	Izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas negara & antar kota/provinsi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.8.5	Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.8.6	Pemberian subsidi angkutan umum	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.11.8.7	Angkutan perintis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.8.8	Penghargaan perusahaan angkutan umum	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.9	Angkutan Barang					
500.11.9.1	Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.9.2	Tarif angkutan barang	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.9.3	Izin operasi angkutan barang tertentu	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				eksternal	siapapun.	
500.11.9.4	Pembinaan angkutan barang	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.9.5	Izin dispensasi angkutan jalan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.10	Monitoring Operasional					
500.11.10.1	Pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.10.2	Pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan					
500.11.10.3	Berkas Pelanggaran Perda		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.11	Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil						
500.11.11.1	Pedoman Teknis		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.11.2	Penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.11.11.3	Bimtek PPNS	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.11.4	Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.12	Analisa dan Evaluasi Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan					
500.11.12.1	Pendataan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.12.2	Analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, &	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
penyeberangan						
500.11.13	Pengembangan Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan					
500.11.13.1	Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (peta jaringan, blueprint jaringan)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
500.11.13.2	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
penyeberangan							
500.11.14	Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.15	Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan						
	500.11.15.1	Perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.15.2	Pengawasan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau dan penyeberangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.16	Rancang Bangun Pelabuhan Sungai,						

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
Danau dan Penyeberangan						
500.11.16.1	Perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.16.2	Pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.16.3	Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.16.4	Penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		sungai, danau dan penyeberangan					
500.11.17	Kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.18	Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan						
	500.11.18.1	Manajemen lalu lintas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.18.2	Tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.18.3	Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan sungai & danau	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.11.18.4	Sertifikasi inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.19	Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan						
500.11.19.1	Pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.19.2	Penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.19.3	Perambuan sungai, danau dan penyeberangan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					eksternal	siapapun.	
500.11.20	Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan						
500.11.20.1	Penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.20.2	Persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.21	Tarif dan Keperintisan						
500.11.21.1	Perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.11.21.2	Kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.22	Bina Sistem Transportasi Perkotaan						
500.11.22.1	Jaringan Transportasi Perkotaan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.22.2	Transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.22.3	Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.23	Lalu Lintas Perkotaan						

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.11.23.1	Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.23.2	Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.23.3	Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.24	Angkutan Perkotaan						
500.11.24.1	Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.11.24.2	Jaringan trayek perkotaan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.24.3	Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.25	Pengaduan Moda Transportasi Perkotaan						
500.11.25.1	Penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.11.25.2	Pengaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.25.3	Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.26	Dampak Transportasi Perkotaan					

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.11.26.1	Penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.26.2	Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.26.3	Masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.26.4	Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.26.5	Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
perkotaan							
500.11.26.6	Masterplan transportasi perkotaan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.27	Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan						
500.11.27.1	Monitoring dan evaluasi data kecelakaan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.27.2	Kualifikasi unit pengkajian		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.27.3	Pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan			eksternal	siapapun.	
500.11.28	Pengembangan Keselamatan						
	500.11.28.1	Program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.28.2	Harmonisasi kebijakan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.29	Promosi dan Kemitraan Keselamatan						
	500.11.29.1	Promosi Keselamatan : penyuluhan, publikasi dan destinasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
penyeberangan							
500.11.29.2	Kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.30	Bina Keselamatan Angkutan Umum						
500.11.30.1	Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.30.2	Keselamatan Awak Angkutan Umum dan awak kapal sungai dan danau		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.11.31	Audit Keselamatan						
	500.11.31.1	Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.31.2	Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.11.31.3	Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.32	Inspeksi Keselamatan						

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.11.32.1	Pedoman keselamatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.32.2	Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.32.3	Investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.33	Parkir					
500.11.33.1	Surat Tugas Juru Parkir	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.11.33.2	Izin tempat khusus parkir swasta		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.11.33.3	Surat Tugas TKP Pemerintah		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.12 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
500.12.1	Kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.12.2	Telekomunikasi						
500.12.2.1	Layanan Jaringan Telekomunikasi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.12.2.2	Layanan Jasa Telekomunikasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.12.2.3	Penomoran Telekomunikasi dan Informatika	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.12.2.4	Kelayakan Sistem Telekomunikasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.12.3	Penyiaran					
500.12.3.1	Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.12.3.2	Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					eksternal	siapapun.	
500.12.4	Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal						
	500.12.4.1	Telekomunikasi Khusus Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.4.2	Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.4.3	Layanan Khusus Penyiaran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.4.4	Pelayanan Kewajiban Universal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					eksternal	siapapun.	
500.12.4.5	Pengembangan Infrastruktur		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.12.5	Pengendalian Informatika						
500.12.5.1	Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.12.5.2	Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.12.5.3	Monitoring dan Evaluasi Penyiaran		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.12.5.4	Pencegahan dan Penertiban		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.12.6	e- Government						
500.12.6.1	Tata Kelola e- Government		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.12.6.2	Teknologi dan Infrastruktur e- Government	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
500.12.6.3	Interoperabilitas dan Interkonektivitas e- Government	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.12.6.4	Aplikasi Layanan Kepemerintahan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
500.12.6.5	Aplikasi Layanan Publik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.12.7	e- Business					

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.12.7.1	Tata Kelola e-Business	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
500.12.7.2	Teknologi dan Infrastruktur e-Business	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.12.7.3	Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Business	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
500.12.7.4	Aplikasi Layanan e-Business	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.12.8	Pemberdayaan Informatika Masyarakat						
	500.12.8.1	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.8.2	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.12.9	Pemberdayaan Industri Informatika						
	500.12.9.1	Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.9.2	Industri Perangkat Informatika Pengguna	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.12.9.3	Industri Perangkat Lunak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.12.9.4	Industri Konten Multimedia	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.12.10	Keamanan Informasi					
500.12.10.1	Tata Kelola Keamanan Informasi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.12.10.2	Teknologi Keamanan Informasi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
500.12.10.3	Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.12.10.4	Penyidikan dan Penindakan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
500.12.10.5	Budaya Keamanan Informasi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.12.11	Komunikasi Publik						
	500.12.11.1	Tata Kelola Komunikasi Publik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.11.2	Pengelolaan Opini Publik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.11.3	Layanan Komunikasi Publik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.12.12	Pengolahan dan Penyediaan Informasi						
	500.12.12.1	Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.12.12.2	Informasi Perekonomian		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.12.12.3	Informasi Kesejahteraan Rakyat		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.12.13	Pengelolaan Media Publik						
500.12.13.1	Media Cetak		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.12.13.2	Media Online		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.12.13.3	Media Luar Ruang dan Audio Visual		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					eksternal	siapapun.	
500.12.14	Kemitraan Komunikasi						
	500.12.14.1	Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.14.2	Kemitraan Media dan Dunia Usaha	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.12.14.3	Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.12.15	Infrastruktur Informatika						

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.12.15.1 Jaringan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
500.12.15.2 Piranti Teknologi Informatika	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.12.15.3	Keamanan Informatika	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
500.12.16	Sistem dan Data					
500.12.16.1	Portal dan Konten	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					pemerintahan.	
500.12.16.2	Pengumpulan dan Pengolahan Data	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.12.16.3	Pengembangan Aplikasi		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
500.12.17	Pusat Kerjasama						
500.12.17.1	Kerja Sama daerah		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
500.12.17.2	Kerja Sama Bilateral		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
500.12.18	Pusat Informasi dan Hubungan						

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
Masyarakat						
500.12.18.1	Pelayanan Informasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.12.18.2	Hubungan Masyarakat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.12.18.3	Bimbingan Teknis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.12.19	Evaluasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.13 PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.13.1	Kebijakan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.13.2	Pengembangan Destinasi Wisata						
	500.13.2.1	Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.13.2.2	Pengembangan Daya Tarik Wisata	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.13.2.3	Industri Pariwisata	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.13.2.4	Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					eksternal	siapapun.	
500.13.2.5	Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.13.3	Pemasaran Pariwisata						
500.13.3.1	Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.13.3.2	Promosi Pariwisata Luar Negeri		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.13.3.3	Promosi Pariwisata Dalam Negeri		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.13.3.4	Pencitraan Indonesia		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.13.4	Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya						
500.13.4.1	Pengembangan industri Perfilman		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.13.4.2	Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.13.4.3	Pengembangan Seni Rupa		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.13.5	Ekonomi Kreatif Berbasi Media, Desain, dan IPTEK						

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.13.5.1	Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.13.5.2	Desain dan Arsitektur		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.13.5.3	Kerjasama dan Fasilitasi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.13.6	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif						
500.13.6.1	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataaan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.13.6.2	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.13.6.3	Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.13.6.4	Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.14 STATISTIK						
500.14.1	Kebijakan di bidang Statistik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.14.2	Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi					

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMAMAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.14.2.1	Perencanaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.14.2.2	Persiapan (antara lain: Penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus, Penyusunan Kuesioner, Penyusunan konsep dan definisi, Penyusunan metodologi (cakupan, organisasi, lapangan, ukuran statistik, prosedur), Penyusunan buku pedoman (pencacahan, pengawasan,	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	pengolahan), Penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah, Penyusunan pedoman sosialisasi, Sosialisasi kegiatan kepada stakeholder dan sumber data (leaflet, poster, pertemuan), Pelaksanaan pertemuan koordinasi (intern dan ekstern), Pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT), Pelaksanaan pelatihan petugas, Penyusunan program pengolahan (rule validasi, pemeriksaan data					

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	entri, tabulasi), Pelatihan petugas pengolahan, Perancangan tabel, Pelaksanaan Ujicoba					
500.14.2.3	Pelaksanaan Lapangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.14.2.4	Pengolahan (antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/pengirim an, pengelompokan/ Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding),	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi)					
500.14.2.5	Analisis dan Penyajian Hasil Sensus	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.14.2.6	Diseminasi hasil sensus	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.14.3	Survei					
500.14.3.1	Perencanaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.14.3.2	Persiapan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
500.14.3.3	Pelaksanaan Lapangan (antara lain: Pelaksanaan listing, Pemilihan sampel, Pengumpulan data, Pemeriksaan, Pengawasan Lapangan, Monitoring kualitas)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
500.14.3.4	Pengolahan (antara lain: Pengelolaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal	Apabila diketahui oleh publik tidak	Unit pengolahan terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMAMAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	dokumen (penerimaan/ pengiriman, pengelompokkan/ Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi)			dan eksternal	merugikan siapapun.	
500.14.3.5	Analisis dan Penyajian Hasil Survei (antara lain: Pembahasan angka hasil pengolahan, Penyusunan angka sementara,	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		Penyusunan angka tetap, Penyusunan/pembahasan draft publikasi, Analisis data, Penyusunan publikasi)					
500.14.3.6		Diseminasi hasil Survei	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.14.4	Konsolidasi Data Statistik						
500.14.4.1		Kompilasi Data	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.14.4.2		Analisis data	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.14.4.3	Penyusunan Publikasi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.14.5	Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei, dan Konsolidasi Data Statistik		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.15 KETENAGAKERJAAN							
500.15.1	Kebijakan di bidang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.15.2	Perencanaan Tenaga Kerja						
500.15.2.1	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.15.2.2	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.15.3	Pengembangan Standarisasi Kompetensi						
500.15.3.1	Penerapan Standar Kompetensi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.15.3.2	Pengembangan Standarisasi Kompetensi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.15.3.3	Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.15.3.4	Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.15.3.5	Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.15.4	Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja						
500.15.4.1	Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.15.4.2	Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.15.4.3	Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.15.4.4	Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.15.5	Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan					
500.15.5.1	Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.15.5.2	Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.15.5.3	Tenaga Pelatihan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					eksternal	siapapun.	
500.15.5.4	Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.15.6	Bina Pemagangan						
500.15.6.1	Pemagangan Dalam Negeri		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.15.6.2	Pemagangan Luar Negeri		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.15.6.3	Perizinan dan Advokasi Pemagangan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.15.6.4	Promosi dan Jenjang Pemagangan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.15.7	Produktivitas dan Kewirausahaan						
500.15.7.1	Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.15.7.2	Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.15.7.3	Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.15.7.4	Pengembangan Kewirausahaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.15.8	Pengembangan Pasar Kerja					
500.15.8.1	Informasi Pasar Kerja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.15.8.2	Analisis Pasar Kerja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.15.8.3	Bursa Kerja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.15.8.4	Analisis Jabatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					eksternal	siapapun.	
500.15.9	Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri						
	500.15.9.1	Antar Kerja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.9.2	Penempatan Tenaga Kerja Khusus	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.9.3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.9.4	Pemberdayaan Pengantar Kerja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMAMAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					eksternal	siapapun.	
500.15.10	Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal						
500.15.10.1	Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.15.10.2	Pengembangan Padat Karya		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.15.10.3	Terapan Teknologi Tepat Guna		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.15.10.4	Pemberdayaan Pendampingan dan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal	Apabila diketahui oleh publik tidak	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
Kerjasama Antar Lembaga					dan eksternal	merugikan siapapun.	
500.15.11	Standardisasi Profesi						
	500.15.11.1	Sistem Informasi dan Registrasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.11.2	Pembakuan Akreditasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.15.12	Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi						
	500.15.12.1	Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.12.2	Perjanjian Kerja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal	Apabila diketahui oleh publik tidak	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				dan eksternal	merugikan siapapun.	
500.15.12.3	Kesejahteraan Pekerja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.15.12.4	Analisis Diskriminasi Syarat Kerja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.15.13	Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial					
500.15.13.1	Organisasi Pekerja dan Pengusaha	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.15.13.2	Kelembagaan Hubungan Industrial	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					eksternal	siapapun.	
500.15.13.3	Pemasyarakatan Hubungan Industrial		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.15.14	Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial						
500.15.14.1	Pengupahan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.15.14.2	Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.15.15	Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial						

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.15.15.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.15.15.2	Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.15.15.3	Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.15.16	Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja						
500.15.16.1	Pengawasan Norma Kerja		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.15.16.2	Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.15.16.3	Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.15.17	Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak						
500.15.17.1	Pengawasan Norma Kerja Perempuan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.15.17.2	Pengawasan Norma Kerja Anak		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.15.17.3	Kerjasama Lintas Sektoral		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.15.17.4	Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.15.18	Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja						
500.15.18.1	Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.15.18.2	Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.15.18.3	Pengawasan Norma Kesehatan Kerja		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.15.18.4	Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.15.18.5	Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.15.19	Laporan Hasil Pengawasan Ketenagaakerjaan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.15.20	Bina Penegakan Hukum						

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.15.20.1	Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
500.15.20.2	Penyidikan Norma Ketenagakerjaan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.15.20.3	Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
500.15.20.4	Kerjasama Penegakan Hukum	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.15.21	Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)						
	500.15.21.1	Analisis dan Standardisasi bidang K3	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.21.2	Hasil kajian, perencanaan dan penerapan teknologi dan alih teknologi K 3	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.21.3	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K3	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	500.15.21.4	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.15.22	Pengembangan SDM dan Kompetensi						

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
K3							
500.15.22.1	Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.15.22.2	Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.15.22.3	Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.15.22.4	Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.15.22.5	Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
dan Kompetensi K3					eksternal	siapapun.	
500.15.22.6	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.16 PENANAMAN MODAL							
500.16.1	Kebijakan di bidang Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.16.2	Perencanaan Penanaman Modal						
500.16.2.1	Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.16.2.2	Perencanaan Industri Manufaktur		Biasa	Terbuka	Pengguna internal	Apabila diketahui oleh publik tidak	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				dan eksternal	merugikan siapapun.	
500.16.2.3	Perencanaan Jasa dan Kawasan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.16.2.4	Perencanaan Infrastruktur	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.16.3	Pengembangan Iklim Penanaman Modal					
500.16.3.1	Deregulasi Penanaman Modal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.16.3.2	Pengembangan Potensi Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				eksternal	siapapun.	
500.16.3.3	Pemberdayaan Usaha	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.16.3.4	Pemberdayaan Usaha Pembinaan dan Penyuluhan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.16.3.5	Pemberdayaan Usaha Kemitraan Usaha	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.16.3.6	Pemberdayaan Usaha Pelayanan Usaha	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.16.4	Promosi Penanaman Modal					

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.16.4.1	Pengembangan Promosi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.16.4.2	Analisis Strategi Promosi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.16.4.3	Fasilitasi Promosi Luar Negeri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.16.4.4	Promosi Sektoral	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.16.4.5	Fasilitasi Promosi Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.16.4.6	Pameran dan Sarana Promosi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.16.5	Kerja Sama Penanaman Modal						
500.16.5.1	Kerja Sama Bilateral dan Multilateral		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.16.5.2	Kerja Sama Regional	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolahan terkait
500.16.5.3	Kerja Sama Dunia Usaha Internasional	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolahan terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.16.6	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal						
	500.16.6.1	Pemantauan Penanaman Modal	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	500.16.6.2	Data Realisasi Penanaman Modal	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				hukum	lembaga pemerintahan.	
500.16.6.3	Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
500.16.6.4	Fasilitasi Penyelesaian Masalah	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				dan eksternal serta penegak hukum	mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
500.16.6.5	Pengawasan Penanaman Modal	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.16.6.6	Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
500.16.7	Pelayanan Penanaman Modal						
500.16.7.1	Pelayanan Aplikasi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.16.7.2	Pelayanan Perijinan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.16.7.3	Pelayanan Konsultasi Perijinan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.16.7.4	Pelayanan Non Perijinan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.16.7.5	Pelayanan Fasilitas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.17 PERTANAHAN						
500.17.1	Kebijakan di bidang Pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.17.2	Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan					

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.17.2.1	Fasilitasi Pengadaan Tanah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.17.2.2	Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.17.2.3	Data dan Informasi Pertanahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.17.2.4	Advokasi dan Pengendalian	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.17.3	Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah					

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.17.3.1	Penatagunaan Tanah	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
500.17.3.2	Data dan Pemetaan Tematik	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.17.3.3	Penguatan Atas Tanah		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
500.17.4	Sengketa Tanah						
500.17.4.1	Pengkajian dan Penanganan Sengketa		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					pemerintahan.	
500.17.4.2	Advokasi dan Pengendalian	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
500.18	TRANSMIGRASI					
500.18.1	Kebijakan di bidang Transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					eksternal serta penegak hukum	terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
500.18.2	Penyediaan Tanah Transmigrasi						
	500.18.2.1	Fasilitasi Pengadaan Tanah	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.18.2.2	Pengurusan Legalitas Tanah	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
500.18.2.3	Dokumentasi Pertanahan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.18.2.4	Advokasi Pertanahan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
500.18.3	Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi					
500.18.3.1	Penyiapan Lahan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			hukum	lembaga pemerintahan.	
500.18.3.2 Penyiapan Sarana	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.18.3.3	Penyiapan Prasarana	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
500.18.3.4	Evaluasi Kelayakan Permukiman	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.18.4	Fasilitasi Penempatan Transmigrasi						
	500.18.4.1	Penyiapan Calon Transmigrasi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	500.18.4.2	Penyiapan Perpindahan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					pemerintahan.	
500.18.4.3	Pelaksanaan Perpindahan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.18.4.4	Penataan dan Adaptasi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
500.18.5	Partisipasi Masyarakat					
500.18.5.1	Promosi dan Motivasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.18.5.2	Kerjasama Kelembagaan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
500.18.5.3	Kerjasama Antar Daerah	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.18.5.4	Pelayanan Investasi		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
500.18.6	Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi						
500.18.6.1	Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				hukum	lembaga pemerintahan.	
500.18.6.2	Bina Sistem Informasi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
500.18.6.3	Perencanaan Pengembangan Kawasan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.18.6.4	Perencanaan Pengembangan Masyarakat		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.18.6.5	Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
500.18.7	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat						
500.18.7.1	Bantuan Pangan dan Kesehatan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.18.7.2	Fasilitas Sosial Budaya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.18.7.3	Pengembangan Kelembagaan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
500.18.7.4	Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.18.8	Pengembangan Usaha					

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.18.8.1	Kewirausahaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.18.8.2	Produksi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.18.8.3	Pengolahan Hasil dan Pemasaran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.18.8.4	Lembaga Ekonomi dan permodalan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.18.9	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan					

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
500.18.9.1	Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.18.9.2	Pengembangan Sarana	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.18.9.3	Pengembangan Prasarana	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.18.9.4	Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.18.10	Penyerasian Lingkungan					
500.18.10.1	Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				eksternal	siapapun.	
500.18.10.2	Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.18.10.3	Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
500.18.10.4	Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN						
600.1 PEKERJAAN UMUM						

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
600.1.1	Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Unit pengolah terkait
600.1.2	Penatagunaan Sumber Daya Air					
600.1.2.1	Perencanaan Wilayah Sungai	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
600.1.2.2	Kelembagaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
600.1.2.3	Pemanfaatan Sumber Daya Air	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.1.2.4	Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.1.2.5	Pengaturan dan Pemantauan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
600.1.3	Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air					

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
600.1.3.1	Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.1.3.2	Manajemen Mutu	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.1.3.3	Informasi dan Data Sumber Daya Air	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.1.3.4	Keterpaduan Pemrograman	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.1.4	Pengelolaan Sumber Daya Air					
600.1.4.1	Pengelolaan Sungai dan Pantai	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				eksternal	siapapun.	
600.1.4.2	Pengelolaan Irigasi dan Rawa	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.1.4.3	Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.1.4.4	Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.1.5	Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air					
600.1.5.1	Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				eksternal	siapapun.	
600.1.5.2	Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.1.5.3	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.1.5.4	Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.1.5.5	Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.1.6	Pengendalian Lumpur Sidoarjo					

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(Bencana Lokal Lingkup Nasional)						
600.1.6.1	Perencanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
600.1.6.2	Pemrograman Pengendalian Lumpur Sidoarjo	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					pemerintahan.	
600.1.6.3	Pelaksanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
600.1.6.4	Pengendalian Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan akibat Lumpur Sidoarjo	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolahan terkait
600.1.6.5	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolahan terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
600.1.7	Pengembangan Jaringan Jalan						
	600.1.7.1	Keterpaduan Perencanaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.1.7.2	Sistem Jaringan Jalan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Karena akan memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD	Bidang Terkait
	600.1.7.3	Lingkungan dan Keselamatan Jalan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.1.8	Pembangunan Jalan						

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
600.1.8.1	Standar dan Pedoman	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.1.8.2	Manajemen Konstruksi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
600.1.8.3	Pengelolaan Gedometrik, Perkerasan, dan Drainage	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.1.8.4	Pengelolaan Geoteknik dan Manajemen Lereng	Biasa	Terbuka	Pengguna internal	Apabila diketahui oleh publik tidak	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				dan eksternal	merugikan siapapun.	
600.1.9	Preservasi Jalan					
600.1.9.1	Standar dan Pedoman	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.1.9.2	Perencanaan Teknis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.1.9.3	Teknik Rekonstruksi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.1.9.4	Teknik Pemeliharaan Jalan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
600.1.10	Pengelolaan Jembatan						
	600.1.10.1	Standar dan Pedoman	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.1.10.2	Perencanaan Teknis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.1.10.3	Teknik Jembatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.1.10.4	Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.1.11	Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah						

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
600.1.11.1	Bimbingan Teknik Jalan Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.1.11.2	Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
600.1.11.3	Pembinaan Teknik Jalan Bebas Hambatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.1.12	Pengaturan Jalan Tol					

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
600.1.12.1	Persiapan pengusahaan jalan tol	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
600.1.12.2	Pengadaan Investasi Jalan Tol	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
600.1.12.3	Teknik Pengaturan Jalan Tol		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.1.12.4	Pengambilalihan hak pengusahaan jalan tol		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.1.13	Keterpaduan Infrastruktur Permukiman						
600.1.13.1	Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
600.1.13.2	Keterpaduan Pembiayaan dan Pelaksanaan		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
600.1.14	Pengembangan Kawasan Permukiman						
600.1.14.1	Perencanaan Teknis		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.1.14.2	Kawasan Permukiman Perkotaan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
600.1.14.3	Kawasan Permukiman Pedesaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.1.14.4	Kawasan Permukiman Khusus	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.1.14.5	Kelembagaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.1.15	Pembinaan Penataan Bangunan					
600.1.15.1	Perencanaan Teknis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.1.15.2	Penataan Bangunan Gedung	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					eksternal	siapapun.	
600.1.15.3	Pengelolaan Rumah Negara		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.1.15.4	Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.1.15.5	Kelembagaan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.1.16	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum						
600.1.16.1	Perencanaan Teknis		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				eksternal	siapapun.	
600.1.16.2	Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.1.16.3	Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.1.16.4	Sistem Penyediaan Air Minum Khusus	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.1.16.5	Kelembagaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
600.1.16.6	Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
600.1.16.7	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
600.1.17	Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman					
600.1.17.1	Perencanaan Teknis	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
600.1.17.2	Pengelolaan Air Limbah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
600.1.17.3	Pengelolaan Persampahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.1.17.4	Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.1.17.5	Kelembagaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.1.17.6	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.1.18	Pemantauan dan Evaluasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
600.2 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN							
600.2.1	Kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.2.2	Perencanaan Pembiayaan Perumahan						
600.2.2.1	Keterpaduan Perencanaan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.2.2.2	Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.2.2.3	Kemitraan		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					dan eksternal serta penegak hukum	mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
600.2.3	Pola Pembiayaan Perumahan						
600.2.3.1	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Umum		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.2.3.2	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.2.3.3	Pola Investasi Perumahan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.2.4	Pendayagunaan Sumber Pembiayaan						

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
Perumahan						
600.2.4.1	Sumber Pembiayaan Primer	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.2.4.2	Sumber Pembiayaan Sekunder	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.2.4.3	Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.2.4.4	Sistem Pembiayaan Perumahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.2.4.5	Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					eksternal	siapapun.	
600.2.5	Perencanaan Penyediaan Perumahan						
600.2.5.1	Keterpaduan Perencanaan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.2.5.2	Analisa Teknik		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.2.5.3	Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.2.5.4	Kemitraan dan Kelembagaan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
600.2.6	Penyediaan Rumah Susun						
	600.2.6.1	Perencanaan Teknik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.2.6.2	Penyediaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.2.6.3	Penghunian, Pengalihan, dan Pemanfaatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.2.6.4	Pengelolaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.2.7	Penyediaan Rumah Khusus						

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
600.2.7.1	Perencanaan Teknik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.2.7.2	Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Tapak Khusus	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.2.7.3	Bimbingan teknis dan supervisi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.2.7.4	Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.2.7.5	Perencanaan Teknik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
600.2.7.6	Fasilitas Backlog Rumah Swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.2.7.7	Pelaksanaan Bantuan Simultan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.2.8	Penyediaan Rumah Umum dan Komersial					
600.2.8.1	Perencanaan Teknik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.2.8.2	Pemberian Bantuan Rumah Umum	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
600.2.8.3	Fasilitas Hunian Berimbang	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.2.8.4	Fasilitas Penyediaan Lahan Perumahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.2.9	Investasi Infrastruktur					
600.2.9.1	Pelaksanaan Kebijakan Investasi Infrastruktur	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
600.2.9.2	Sinkronisasi Investasi	Terbatas	Tertutup	Penentu	Apabila diketahui	Unit pengolah

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
Infrastruktur				kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	terkait
600.2.9.3	Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.2.9.4	Pasar Infrastruktur	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.2.10	Penyelenggaraan Jasa Konstruksi					

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
600.2.10.1	Sistem Penyelenggaraan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
600.2.10.2	Kontrak Konstruksi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
600.2.10.3	Konstruksi Berkelanjutan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
600.2.10.4	Manajemen Mutu	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.2.11	Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi					
600.2.11.1	Kelembagaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
600.2.11.2	Material dan Peralatan Konstruksi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.2.11.3	Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.2.11.4	Usaha Jasa Konstruksi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.2.12	Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi					
600.2.12.1	Standar dan Materi Kompetensi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
600.2.12.2	Penerapan Kompetensi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.2.12.3	Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.2.12.4	Pengembangan Produktivitas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.2.13	Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi					
600.2.13.1	Peningkatan Kerjasama	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					serta penegak hukum	pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
600.2.13.2	Pemberdayaan Jasa Konstruksi		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
600.2.14	Peningkatan Jasa Konstruksi						
600.2.14.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				eksternal	siapapun.	
600.2.14.2	Pelaksanaan Pengendalian Mutu	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.2.15	Penerapan Teknologi Konstruksi					
600.2.15.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kerjasama Penerapan Teknologi Konstruksi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.2.15.2	Pengembangan Materi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.2.15.3	Pendayagunaan Material dan Peralatan Konstruksi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
600.2.16	Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Perumahan Rakyat (PUPR)						
	600.2.16.1	Antar Sektor	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	600.2.16.2	Antar Wilayah	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					hukum	lembaga pemerintahan.	
600.2.17	Pengembangan Kawasan Strategis						
600.2.17.1	Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
600.2.17.2	Pengembangan Infrastruktur Antarkawasan		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
Strategis					internal dan eksternal serta penegak hukum	dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
600.2.18	Pengembangan Kawasan Perkotaan						
	600.2.18.1	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.2.18.2	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Besar dan Kota Baru	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.2.18.3	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Kecil dan Pedesaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
600.2.18.4	Analisa Manfaat dan Skema Pembiayaan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.2.18.5	Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan Rakyat (PUPR)		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.2.19	Pemantauan dan Evaluasi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.3	TATA RUANG (TATA KOTA)						
600.3.1	Kebijakan di bidang Tata Ruang yang dilakukan Pemerintahan Daerah		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.3.2	Perencanaan						

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
600.3.2.1	Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RT/RW)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
600.3.2.2	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
600.3.2.3	Rencana Tata Ruang Strategis Kabupaten	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
600.3.2.4	Rencana Tata Bangun Lingkungan (RTBL)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
600.3.2.5	Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Kabupaten	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
600.3.2.6	Rencana Teknis Prasarana Kota	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
600.3.2.7	Rencana Tekni Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kotas Prasarana Kota		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
600.3.3	Pemanfaatan dan Pengendalian						
600.3.3.1	Evaluasi dan Pengawasan Penata Ruang		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.3.3.2	Ijin Pemanfaatan Ruang		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
600.3.3.3	Pembatalan Ijin Pemanfaatan Ruang	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
600.3.4	Pemetaan					
600.3.4.1	Peta Dasar	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
600.3.4.2	Survey Pemetaan Ruang Darat	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				eksternal serta penegak hukum	terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
600.3.4.3	Survey Pemetaan Ruang Air	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
600.3.4.4	Survey Pemetaan Ruang Udara	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
600.4 LINGKUNGAN HIDUP						
600.4.1	Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					hukum	lembaga pemerintahan.	
600.4.2	Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup						
600.4.2.1	Inventarisasi, Penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
600.4.2.2	Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
600.4.3	Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor					
600.4.3.1	Evaluasi Penerapan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
600.4.3.2	Perencanaan Lingkungan Hidup	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
600.4.4	Ekonomi Lingkungan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.4.5	Dampak Lingkungan						
	600.4.5.1	Bimtek Dampak Lingkungan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.4.5.2	Penerapan sistem kebijakan Dampak lingkungan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.4.5.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.4.6	Pemantauan dan Pengawasan						

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
600.4.6.1	Manufaktur Prasarana dan Jasa	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.4.6.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.4.6.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.4.6.4	Udara Sumber Bergerak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.4.7	Evaluasi dan Pengembangan					
600.4.7.1	Manufaktur, Prasarana dan Jasa	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				eksternal	siapapun.	
600.4.7.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.4.7.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.4.7.4	Udara Sumber Bergerak	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.4.8	Keanekaragaman Hayati dan pengendalian Kerusakan Lahan					
600.4.8.1	Pengembangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				eksternal	siapapun.	
600.4.8.2	Pemanfaatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.4.8.3	Pengelolaan Sumber Daya Genetik	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.4.8.4	Keamanan Hayati	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.4.8.5	Pengendalian kerusakan Lahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.4.9	Kerusakan Ekosistem Perairan Darat					

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
600.4.9.1	Kerusakan Ekosistem	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.4.9.2	Rawa	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.4.10	Mitigasi dan pelestarian Fungsi Atmosfer					
600.4.10.1	Perangkat mitigasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.4.10.2	Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
600.4.10.3	Pengendalian Bahan Perusak Ozon		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.4.10.4	Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.4.11	Adaptasi Perubahan Iklim						
600.4.11.1	Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim (antara lain: Pengembangan perangkat Adaptasi Perubahan Iklim, Pemantauan dan Evaluasi Adaptasi Perusahaan Iklim)		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.4.11.2	Kerentanan Perubahan Iklim		Biasa	Terbuka	Pengguna internal	Apabila diketahui oleh publik tidak	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					dan eksternal	merugikan siapapun.	
600.4.12	Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun						
	600.4.12.1	Registrasi dan Notifikasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.4.12.2	Pemantauan Bahan Berbahaya dan Beracun	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.4.12.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.4.13	Verifikasi Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan beracun						

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
600.4.13.1	Pengumpulan dan pemanfaatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.4.13.2	Pengangkutan dan Pengolahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.4.13.3	Penimbunan dan Dumping	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.4.13.4	Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas batas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.4.14	Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3					

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
600.4.14.1	Pemantauan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.4.14.2	Tanggap darurat dan pemeliharaan Kontaminasi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
600.4.15	Pengelolaan Sampah					
600.4.15.1	Pembatasan sampah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.4.15.2	Daur Ulang dan	Biasa	Terbuka	Pengguna	Apabila diketahui	Unit pengolah

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	Pemanfaatan Sampah				internal dan eksternal	oleh publik tidak merugikan siapapun.	terkait
600.4.15.3	Pembentukan Dewan Adipura		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.4.15.4	Penetapan pemenang adipura		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.4.16	Hukum Administrasi Lingkungan						
600.4.16.1	Pengelolaan dan pengembangan pengaduan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.4.16.2	Penataan hukum administrasi lingkungan		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					dan eksternal serta penegak hukum	mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
600.4.17	Penyelesaian Sengketa Lingkungan						
	600.4.17.1	Penyelesaian sengketa Melalui Pengadilan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
600.4.17.2	Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
600.4.18	Penegakan hukum pidana lingkungan					
600.4.18.1	Penyidikan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
600.4.18.2	Koordinasi penuntutan, evaluasi, dan tindak lanjut	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
600.4.18.3	Koordinasi pembinaan penyidik PNS		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.4.19	Komunikasi Lingkungan						
600.4.19.1	Pengembangan Komunikasi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.4.19.2	Publikasi dan Kampanye		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.4.20	Penguatan Inisiatif Masyarakat						
600.4.20.1	Komunitas Pendidikan Lingkungan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
600.4.20.2	Kearifan Lingkungan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.4.21	Peningkatan Peran Masyarakat					
600.4.21.1	Masyarakat Perkotaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.4.21.2	Masyarakat Pedesaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.4.22	Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan					
600.4.22.1	Organisasi Sosial Masyarakat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
600.4.22.2	Organisasi Profesi Dunia Usaha		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.4.23	Data dan Informasi Lingkungan						
600.4.23.1	Pengelolaan Data		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.4.23.2	Pengelolaan Informasi		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.4.23.3	Pengembangan Perangkat Lunak		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.4.23.4	Pengembangan Sistem dan Layanan Jaringan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					eksternal	siapapun.	
600.4.24	Kelembagaan Lingkungan						
	600.4.24.1	Kelembagaan dan Tata Laksana	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.4.24.2	Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.4.25	Standarisasi dan teknologi						
	600.4.25.1	Standarisasi Manajemen dan dan Pengujian Lingkungan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	600.4.25.2	Standarisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
Jasa Lingkungan					eksternal	siapapun.	
600.4.25.3	Teknologi Ramah Lingkungan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.4.26	Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan						
600.4.26.1	Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
600.4.26.2	Laboratorium Rujukan dan Pengujian		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
700 PENGAWASAN							
700.1 PENGAWASAN INTERNAL							

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
700.1.1	Rencana Pengawasan						
	700.1.1.1	Rencana Strategis Pengawasan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	700.1.1.2	Rencana Kerja Pengawas Tahunan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					pemerintahan.	
700.1.1.3	Rencana Kinerja Tahunan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
700.1.1.4	Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				dan eksternal serta penegak hukum	mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
700.1.1.5	Rakor Pengawasan Tingkat Daerah	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
700.1.2	Pelaksanaan Pengawasan					
700.1.2.1	Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP),	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak	Inspektorat

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMAMAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut (TL)			internal dan eksternal serta penegak hukum	dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
700.1.2.2	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Inspektorat

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
700.1.2.3	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Inspektorat
700.1.2.4	Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Inspektorat

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
700.1.2.5	Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Inspektorat
700.1.2.6	Laporan Perkembangan Barang Milik Negara	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Inspektorat

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
700.1.2.7	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
700.1.2.8	Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
700.1.2.9	Good Corporate Governance (GCG)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
800 KEPEGAWAIAN						
800.1 SUMBER DAYA MANUSIA						
800.1.1	Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara					
800.1.1.1	Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (antara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMAMAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	lain: Bahan penyusunan rencana kebutuhan, Analisis Kebutuhan, Pengolahan Data Kebutuhan)			eksternal	siapapun.	
800.1.1.2	Perencanaan Pertimbangan Formasi (antara lain: Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN, Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
800.1.1.3	Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
800.1.1.4	Standarisasi Jabatan (antara lain: Informasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal	Apabila diketahui oleh publik tidak	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		Jabatan, Kompetensi Jabatan, Klasifikasi Jabatan)			dan eksternal	merugikan siapapun.	
800.1.2	Formasi dan Pengadaan Pegawai						
800.1.2.1	Formasi ASN (antara lain: Usulan formasi, Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN , Persetujuan Formasi, Penetapan Formasi, Penetapan Formasi Khusus)		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
800.1.2.2	Proses Rekrutmen/Pengadaan ASN (antara lain: Proses Rekrutmen ASN, Penetapan Pengumuman		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMAMAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
Kelulusan ASN)				serta penegak hukum	pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
800.1.2.3	Pengumuman Kelulusan ASN	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
800.1.2.4	Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
800.1.2.5	Pengangkatan ASN	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
800.1.2.6	Open Biding (Seleksi Terbuka Jabatan)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
800.1.2.7	Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
800.1.2.8	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
800.1.3	Mutasi Pegawai					
800.1.3.1	Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara,	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN					
800.1.3.2	Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
800.1.3.3	Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural/Fungsional	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				hukum	lembaga pemerintahan.	
800.1.3.4	Perubahan Data Dasar/ Status/ Kedudukan Hukum Pegawai	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
800.1.3.5	Peninjauan Masa Kerja	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				dan eksternal serta penegak hukum	mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
800.1.3.6	Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
800.1.4	Pengembangan Karir					

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
800.1.4.1	Usulan Tugas Belajar/ Ijin Belajar/ Diklat/ Kursus/ Magang/ Ujian Dinas/ Praktek Kerja di Instansi lain/ Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
800.1.4.2	Penyesuaian ijazah	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
800.1.4.3	Penyusunan Sistem Karier	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
800.1.4.4	Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
800.1.4.5	Angka Kredit (antara lain: Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit, Penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit)		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
800.1.5	Kinerja Aparatur Sipil Negara						
800.1.5.1	Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					pemerintahan.	
800.1.5.2	Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
800.1.5.3	Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
800.1.6	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN					
800.1.6.1		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			hukum	lembaga pemerintahan.	
800.1.6.2	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
800.1.6.3	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			dan eksternal serta penegak hukum	mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
800.1.6.4	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
800.1.6.5		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
800.1.6.6	Pensiun ASN (antara lain: Administrasi Pensiun ASN, Penetapan Pensiun ASN, Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun ASN, Pensiun Pejabat Negara dan Jada/Dudanya)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
800.1.7	Bantuan Hukum	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
800.1.8	Status dan Kedudukan Pegawai					
800.1.8.1	Status Kepegawaian	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					pemerintahan.	
800.1.8.2	Kedudukan Kepengawaaian	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
800.1.8.3	Keberatan Pegawai	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				penegak hukum	tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
800.1.8.4	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
800.1.9	Sistem Informasi Kepegawaian					

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
800.1.9.1	Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
800.1.9.2	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
800.1.9.3	Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektronik	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
800.1.9.4	Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
800.1.10	Pengawasan dan pengendalian						
800.1.10.1	Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
800.1.10.2	Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					pemerintahan.	
800.1.10.3	Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

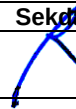
JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
800.1.10.4	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
800.1.10.5	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
800.1.10.6	Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorar	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
800.1.11	Administrasi Pegawai					
800.1.11.1	Surat Perintah Dinas/Surat Tugas	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					pemerintahan.	
800.1.11.2	Cuti Sakit	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
800.1.11.3	Cuti Bersalin	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
800.1.11.4	Cuti Tahunan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
800.1.11.5	Cuti Alasan Penting	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
800.1.11.6	Cuti Besar	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
800.1.11.7	Cuti Di luar Tanggungans Negara	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
800.1.11.8	Karpeg/KPE/Karis/ Karsu	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
800.1.11.9	Keanggotaan Organisasi Profesi/ Kedinasan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
800.1.11.10	Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
800.1.11.11	Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
800.1.11.12	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
800.1.11.13	Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/ tunjangan		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
800.1.12	Kesejahteraan Pegawai						
800.1.12.1	Pemeliharaan Kesehatan Pegawai		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
800.1.12.2	Asuransi Pegawai/BPJS		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
800.1.12.3	Tabungan Perumahan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
800.1.12.4	Bantuan Sosial	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
800.1.12.5	Pakaian Dinas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
800.1.12.6	Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
800.1.12.7	Pemberian Tali Kasih	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
800.1.12.8	Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
800.1.12.9	Olahraga dan Rekreasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
800.1.12.10	Rekam Medis	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
800.1.13	Administrasi Perseorangan					

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
800.1.13.1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
800.1.13.2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
800.1.13.3	Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang disetarakan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
800.1.13.4	Sekretaris Daerah	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
800.1.13.5	ASN berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
800.1.14	Penilaian Kompetensi					
800.1.14.1	Penilaian Kompetensi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					pemerintahan.	
800.1.14.2	Hasil Penilaian Kompetensi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
800.2 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
800.2.1	Kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh	Biasa	Terbuka	Pengguna internal	Apabila diketahui oleh publik tidak	Unit pengolahan terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
Pemerintah daerah					dan eksternal	merugikan siapapun.	
800.2.2	Pendidikan dan Pelatihan						
800.2.2.1	Sistem Informasi program dan pembinaan diklat		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
800.2.2.2	Pedoman-pedoman kediklatan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
800.2.2.3	Kurikulum-kurikulum diklat		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
800.2.2.4	Modul-modul diklat		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
800.2.2.5	Panduan fasilitator	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
800.2.2.6	Saran/rekomendasi penyelenggaraan diklat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
800.2.2.7	Notulen sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
800.2.2.8	Monitoring dan evaluasi program dan pembinaan diklat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
800.2.2.9	Konsultasi, advokasi, asistensi diklat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
800.2.3	Widyaiswara						
	800.2.3.1	Seleksi dan pengembangan Widyaiswara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	800.2.3.2	Sertifikasi Widyaiswara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	800.2.3.3	Monitoring dan evaluasi Widyaiswara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	800.2.3.4	Penilaian Widyaiswara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	800.2.3.5	Konsultasi, advokasi dan asistensi Widyaiswara	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					eksternal	siapapun.	
800.2.3.6	Sistem Informasi Pembinaan Widyaiswara		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
800.2.4	Penyelenggaraan Diklat						
800.2.4.1	Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan Penyelenggaraan Diklat		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
800.2.4.2	Penyelenggaraan Penyelenggaraan Diklat		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
800.2.4.3	Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
800.2.4.4	Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
800.2.4.5	Sistem informasi diklat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
800.2.4.6	Monitoring Penyelenggara Diklat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
800.2.4.7	Monitoring dan evaluasi Pasca diklat	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
800.2.5	Alumni	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
900 KEUANGAN							
900.1 KEUANGAN DAERAH							
900.1.1	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan(APBD-P)						
900.1.1.1	Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
900.1.1.2	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD)		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
900.1.1.3	Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
900.1.1.4	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
900.1.2	Penyusunan Anggaran					
900.1.2.1	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
900.1.2.2	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
900.1.2.3	Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
900.1.2.4	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD	Biasa	Terbuka	Pengguna internal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)			dan eksternal	merugikan siapapun.	
900.1.3	Pelaksanaan Anggaran						
	900.1.3.1	Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.3.2	Pendapatan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.3.3	Belanja	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.3.4	Pembiayaan Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				eksternal	siapapun.	
900.1.3.5	Dokumen Penatausahaan Keuangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
900.1.3.6	Pertanggungjawaban Penggunaan Dana	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
900.1.3.7	Daftar Gaji	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
900.1.3.8	Kartu Gaji	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
900.1.3.9	Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
900.1.3.10	Laporan Keuangan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
900.1.4	Pinjaman/Hibah Luar Negeri						
900.1.4.1	Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Blue Book)		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
900.1.4.2	Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
900.1.4.3	Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan dokumen sejenisnya	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
900.1.4.4	Dokumen Loan Agreement (PHLN) (antara lain: Draft Agreement, Legal Opinion, Surat Menyurat dengan Lender)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
900.1.4.5	Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri (antara lain: usulan luncuran dana)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
900.1.4.6	Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
900.1.4.7	Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
900.1.4.8	Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri (antara lain: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	lampirannya, a.l. : SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya.)					
900.1.4.9	Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) antara lain : No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
900.1.4.10	Staff Appraisal Report	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
			serta penegak hukum	pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
900.1.4.11 Report /Laporan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
900.1.4.12 Laporan Hutang Daerah	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
				dan eksternal serta penegak hukum	mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	
900.1.4.13	<i>Completion Report/Annual Report</i>	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
900.1.4.14	Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
900.1.5	Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
900.1.6	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
900.1.6.1	Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)		Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
900.1.6.2	Dokumen Kebijakan Akuntansi	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
900.1.6.3	Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
900.1.6.4	Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
900.1.7	Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan					

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
900.1.7.1	Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Specimen Tanda Tangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
900.1.7.2	Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya :(antara lain: SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM- LS, SPM-DU, bilyet giro, SPM Nihil, Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	Pendukungnya a.l. : Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank, Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan)					
900.1.7.3	Buku Rekening Bank	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
900.1.7.4	Keputusan Pembukuan Rekening	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
900.1.7.5	Pembukuan anggaran terdiri :(antara lain: Buku Kas Umum (BKU), Buku	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		Pembantu, Register dan Buku Tambahan, Daftar Pembukuan Pencairan/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP), dan Rekening Koran)					
900.1.8		Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan					
	900.1.8.1	Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	900.1.8.2	Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn dan Denda	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan					
900.1.9	Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu Dari APBD (antara lain: Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu, Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu, Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Kota, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas, Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu, Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota, Dokumen	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMAMAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada, Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD)					
900.1.10	Pelaksanaan Anggaran PILKADA dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu					
900.1.10.1	Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
900.1.10.2	Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
900.1.10.3	Berkas setor sisa dana Pilkada/Pemilu termasuk setor komisi pengadaan barang/jasa, rabat, bunga, jasa giro Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
900.1.10.4	Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran /Revisinya					
900.1.11		Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah					
	900.1.11.1	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
900.1.11.2	Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
900.1.11.3	Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
900.1.11.4	Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah	Terbatas	Tertutup	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
900.1.12	Anggaran Daerah					
900.1.12.1	Anggaran Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
900.1.12.2	Dukungan Teknis Anggaran Daerah	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
900.1.13	Pendapatan dan Investasi Daerah					

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMAMAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
900.1.13.1	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (antara lain: Fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	pajak daerah dan retribusi daerah)					
900.1.13.2	Badan Usaha Milik Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan, Fasilitas serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga non keuangan, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
900.1.13.3	Badan Layanan Umum Daerah (antara lain: Analisis, standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Pembinaan pelaksanaan kebijakan, standardisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan keuangan badan layanan umum daerah,	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah)					
900.1.13.4	Pengelolaan Kekayaan Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan , Fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
daerah)						
900.1.13.5	Pinjam Dan Obligasi Daerah (antara lain: Fasilitas pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik daerah, Fasilitas pelaksanaan kebijakan obligasi daerah, Fasilitas pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN, Bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP			KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah)					
900.1.14	Fasilitasi Dana Perimbangan						
900.1.14.1	Fasilitasi Dana Alokasi Umum (antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum, Penyiapan pelaksanaan		Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	monitoring dan evaluasi dana alokasi umum)					
900.1.14.2	Fasilitasi Dana Alokasi Khusus (antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar. Sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus, Penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
900.1.14.3	Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam (antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	hasil pajak dan sumber daya alam, Sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam)					
900.1.14.4	Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya (antara lain: Sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus, Sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya,	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya)					
900.1.14.5	Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan (antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan, Penyiapan dukungan teknis dana perimbangan, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
900.1.15	Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah					

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
900.1.15.1	Akuntansi Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
900.1.15.2	Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah)					
900.1.15.3	Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP		KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
900.1.15.4	Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli (antara lain: penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah)	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
900.1.15.5	Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah (antara lain: penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan	Biasa	Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

Pemrakarsa	Sekda
	

JENIS/SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEMANAN	KLASIFIKASI AKSES	HAK AKSES	DASAR PETIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
daerah, penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah)					

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan
Kepala Bagian Hukum,

SUROSO, SE
Pembina TK.I/IVb
NIP. 197003101993031008

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Pemrakarsa	Sekda
	